

**PENERAPAN PSAK 68 : PENGUKURAN NILAI WAJAR  
KONVERGENSI IFRS (*INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING  
STANDARDS*) DAN DAMPAKNYA PADA PILIHAN KEBIJAKAN  
AKUNTANSI DI INDONESIA**

**(Studi Perbandingan Pada Laporan Keuangan Tahunan dari Perusahaan  
Manufaktur dan Properti & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2012-2015)**



**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

Nama : Hidayat Wahyu Pradana

No. Mahasiswa : (14312625)

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2021**

**PENERAPAN PSAK 68 : PENGUKURAN NILAI WAJAR  
KONVERGENSI IFRS (*INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING  
STANDARDS*) DAN DAMPAKNYA PADA PILIHAN KEBIJAKAN  
AKUNTANSI DI INDONESIA**

**(Studi Perbandingan Pada Laporan Keuangan Tahunan dari Perusahaan  
Manufaktur dan Properti & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2012-2015)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan

Ekonomika UII

Diajukan Oleh :

Nama : Hidayat Wahyu Pradana

No. Mahasiswa : (14312625)

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 12 April 2021



is  
METHRAI  
TEMPEL  
315F9AJX110586044  
(Indraya Wahyu Pradana)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN PSAK 68 : PENGUKURAN NILAI WAJAR  
KONVERGENSI IFRS (*INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING  
STANDARDS*) DAN DAMPAKNYA PADA PILIHAN KEBIJAKAN  
AKUNTANSI DI INDONESIA**

**(Studi Perbandingan Pada Laporan Keuangan Tahunan dari Perusahaan  
Manufaktur dan Properti & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2012-2015)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

Nama : Hidayat Wahyu Pradana

No.Mahasiswa : 14312625

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal .17. / 3. / 21

Dosen Pembimbing,

Drs. Yuran Najamudin, M.B.A.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PENERAPAN PSAK 68 : PENGUKURAN NILAI WAJAR KONVERGENSI IFRS  
(INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS) DAN DAMPAKNYA PADA  
PILIHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN PADA  
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DARI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN  
PROPERTI**

Disusun Oleh : **HIDAYAT WAHYU PRADANA**  
Nomor Mahasiswa : **14312625**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Senin, 07 Juni 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Yunan Najamudin, Drs., M.B.A.



Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## HALAMAN MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya”.

**(Q.S Al Baqarah : 45-46)**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, jika engkau telah selesai (dengan suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan kepada Allah hendak kamu berharap”.

**(Q.S Al Insyrah : 6-8)**

“Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan”. **(Imam Syafi’i)**

“Di dunia nyata, orang pintar adalah orang yang melakukan kesalahan dan belajar dari hal tersebut. Di sekolah, orang pintar adalah orang yang tidak boleh melakukan kesalahan”. **(Robert T Kiyosaki)**

“Jika kamu memikirkan jangka panjang, kamu dapat menghasilkan keputusan yang sangat baik yang tidak akan kamu sesali”. **(Jeff Bezos)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### **“Skripsi Dalam Bentuk Karya Ilmiah Penelitian Ini Saya Persembahkan Untuk”**

Kedua orangtuaku tercinta yang dengan sabar merawat dan membesarkan aku hingga tumbuh menjadi dewasa ini dan menghargai proses yang ditempuh putramu dalam menempuh pendidikan yang relatif membutuhkan waktu serta selalu memberikan motivasi untuk terus berjuang melawan rasa lelah, cobaan dan pembentukan karakter berpendirian kuat. Hingga detik ini akhirnya saya bisa mencapai apa yang saya perjuangkan dan semoga akan bermanfaat untuk kedepannya. Untuk Keluargaku Bapak Adib Sujatmiko, Ibu Endri Nurhani, serta Muhammad Alfian Alfarizi dan Yoppy Arya Sandy sebagai saudara kandung.

Dan teman-temanku organisasi seperjuangan DPM UII, LEM UII serta organisasi UKM PSHT UII yang juga ikut dalam mendukung perjuanganku dalam menempuh jalan yang terjal yaitu penyusunan karya ilmiah penelitian SKRIPSI yang sempat tidak terselesaikan tepat waktu karena kendala pemahaman dan pengetahuan. Dan Alhamdulillah aku bisa menyelesaikan skripsiku dengan lancar.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan karya ilmiah penelitian dalam bentuk skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“Penerapan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dan Dampaknya pada Pilihan Kebijakan Akuntansi di Indonesia”** (Studi Perbandingan Pada Laporan Keuangan Tahunan dari Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015) ini disusun dan diajukan selain memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana (Strata-1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia ini juga disusun serta diajukan sebagai pembaharuan atas suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan



kontribusi berupa sumbangan pemikiran bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang pasar modal dan praktisi akuntansi.

Proses penyusunan skripsi yang disusun oleh penulis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan, baik berupa do'a, perjuangan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis, mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT, yang selalu memberikan petunjuk, kekuatan, ridho serta kasih sayang yang tak terduga kepada setiap Hamba-Nya.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Adib Sujatmiko dan Ibu Endri Nurhani yang selalu mendukung dengan do'a, kasih sayang, motivasi, dukungan moral, dukungan materi serta dukungan daya juang kepada penulis.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Drs. Yunan Najamudin, M.B.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasihat, serta arahan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan bermanfaat untuk

memudahkan jalan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini, kemudian ada Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang juga membantu dalam menyelesaikan administrasi perkuliahan, serta *Cleaning Service* yang selalu membantu saya dalam menemukan barang berharga saya yang sewaktu-waktu pernah terjadi kehilangan ketika duduk di bangku perkuliahan.

8. Teman-teman seperjuangan ketika duduk di bangku perkuliahan walaupun ada yang berbeda angkatan, (Akmal, Vina, Sari, Erviana, Aji, Dira, Andro, Hammam, Tistin, Dinar dan Nadhim) yang selalu memberikan banyak nasehat, motivasi, daya juang serta berbagai wawasan berupa ilmu untuk membangkitkan moral saya jadi semangat untuk berkarir sebagai seorang professional di bidang passion saya untuk kedepannya.
9. Teman-teman organisasi seperjuangan DPM UII dan LEM UII, (Indra, Risang, Dewi, Jarjit, Husein, Yngwie dan Muhajir) yang selalu bilang “Dayat kalo mengerjakan skripsi jika masih belum paham tanya, jangan tertutup”. Ini merupakan nasihat yang bijak dan saya pribadi berhak menerimanya.
10. Teman-teman organisasi seperjuangan UKM PSHT UII (Eko, Jepp, Awandot, Isti, Suratni, Tri, Afif dan Toni) yang selalu bilang ke saya “Dayat kalo mengerjakan skripsi jangan dibawa serius terus, berlebihan juga kurang baik itu”. Ini merupakan nasihat yang cukup bijak dari teman-teman saya supaya saya dapat bertukar pikiran jika sewaktu-waktu ada kesulitan sehingga pikiran saya jadi tenang dan rileks tidak terlalu tegang.

11. Teman-teman semua Jurusan FBE UII dari segala angkatan serta semua pihak yang turut membantu penulis dalam melancarkan jalannya proses penyusunan skripsi yang tidak bisa ditunjuk satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil skripsi dalam bentuk karya ilmiah penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini agar kedepan walaupun ada kekurangan harapannya tetap mampu memberikan manfaat di bidang akademik serta praktisi akuntansi.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

***Wassalamualaikum Wr. Wb***

Yogyakarta, 12 April 2021

Penulis



(Hidayat Wahyu Pradana)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN</b>	
<b>HIPOTESIS</b> .....	<b>19</b>
2.1 Tinjauan Teoritis .....	19
2.1.1 Teori Regulasi.....	19
2.1.2 <i>Positive Accounting Theory</i> (PAT).....	20
2.2 Rerangka Acuan Konseptual .....	20

2.2.1	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Rerangka Acuan Konseptual .....	21
2.2.2	Tujuan dan Fungsi Rerangka Konseptual .....	22
2.2.3	Badan Penyusun Standar Akuntansi Keuangan (1973-2007) .....	22
2.2.4	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).....	22
2.2.5	<i>International Financial Reporting Standards (IFRS)</i> .....	23
2.3	Kebijakan Akuntansi .....	25
2.3.1	Pengungkapan Kebijakan Akuntansi .....	25
2.4	PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar.....	27
2.5	Kerangka Konseptual Penelitian .....	32
2.6	Perumusan Hipotesis .....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Populasi dan Sampel .....	38
3.1.1	Pemilihan Populasi dan Sampel.....	38
3.2	Variable Penelitian dan Definisi Operasional Variable .....	40
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	45
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	46
3.5	Metode Analisis.....	48
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN .....		53
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	53
4.2	Analisa Data .....	54
4.2.1	Uji Normalitas .....	55
4.2.2	Distribusi Pemilihan Metode	

Pengukuran .....	58
4.2.3 Uji Hipotesis .....	61
4.2.3.1 Aset Tetap (PP&E) .....	62
4.2.3.2 Properti Investasi .....	68
4.2.3.3 Imbalan Kerja .....	76
4.2.3.4 Aset Takberwujud.....	80
4.2.3.5 Instrumen Keuangan Diperdagangkan.....	87
4.2.3.6 Instrumen Keuangan Derivatif Lindung Nilai .....	94
4.2.3.7 Instrumen Keuangan Derivatif .....	101
4.2.3.8 Instrumen Keuangan Tersedia untuk Dijual .....	107
4.2.3.9 Instrumen Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo.....	113
4.2.3.10 Instrumen Keuangan Piutang.....	117
4.2.3.11 Instrumen Keuangan Pinjaman .....	121
4.2.3.12 Instrumen Keuangan Hutang Obligasi .....	126
BAB V PENUTUP.....	132
5.1 Kesimpulan.....	132
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	135
5.3 Saran Penelitian Berikutnya.....	135

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian .....33



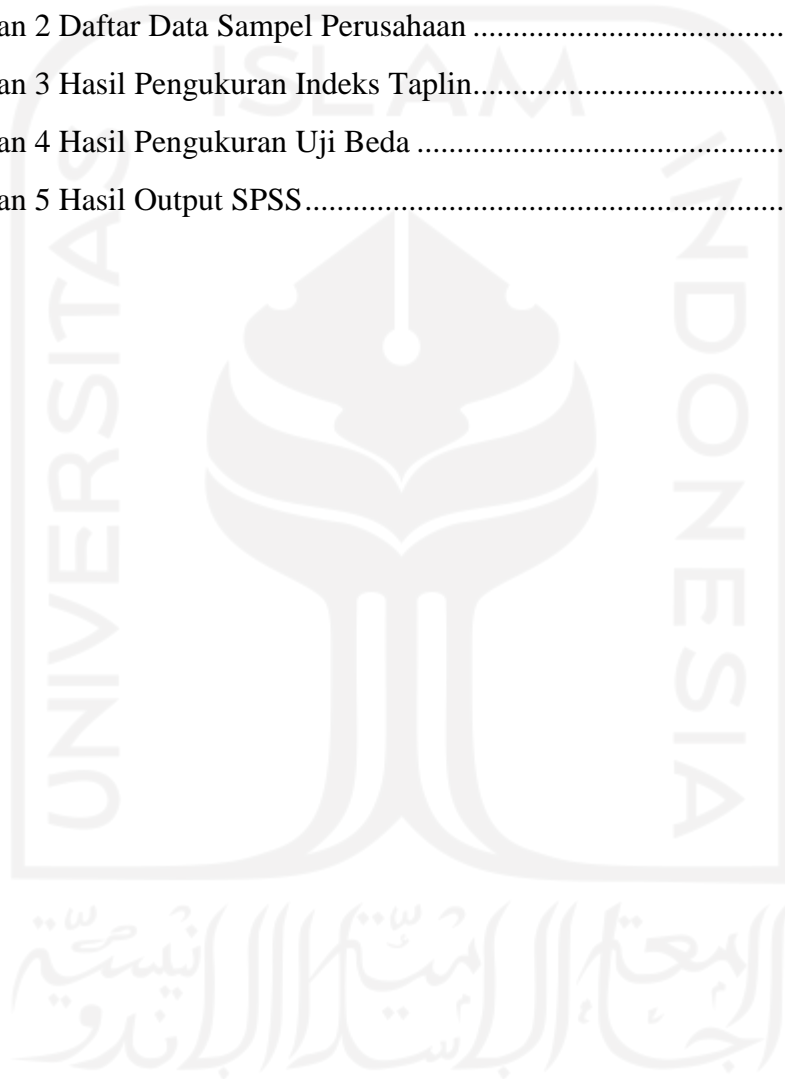
## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Contoh Perhitungan Indeks-T untuk Satu Negara.....	45
Tabel 4.1 Prosedur Penarikan Sampel Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate terdaftar di BEI Periode 2012-2015.....	54
Tabel 4.2 Uji Normalitas .....	55
Tabel 4.3 Distribusi Pemilihan Metode Pengukuran.....	58
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Hipotesis.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Survei & Riset Penelitian dari TICMI .....	141
Lampiran 2 Daftar Data Sampel Perusahaan .....	142
Lampiran 3 Hasil Pengukuran Indeks Taplin.....	146
Lampiran 4 Hasil Pengukuran Uji Beda .....	194
Lampiran 5 Hasil Output SPSS.....	217



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis penerapan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar Konvergensi IFRS dan dampaknya pada pilihan Kebijakan Akuntansi di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini laporan keuangan tahunan dari seluruh perusahaan manufaktur dan properti & real estate terdaftar di BEI periode 2012-2015. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 556 data laporan keuangan tahunan. Dalam penelitian ini kategori variable yang digunakan untuk mengelompokkan obyek yang diteliti adalah PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar. Objek yang diteliti dalam Kebijakan Akuntansi adalah Aset Tetap, Properti Investasi, Aset Takberwujud, Imbalan Kerja, Instrumen Keuangan terdiri dari : Derivatif, Derivatif Lindung Nilai, Diperdagangkan, Tersedia untuk Dijual, Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, Piutang, Pinjaman dan Hutang Obligasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa konten terdiri dari dua bagian yaitu, analisa menggunakan pengukuran indeks taplin (Index-T) dan analisa untuk uji beda statistik. Skor penilaian untuk indeks taplin yaitu 1 menerapkan nilai wajar, 0 metode biaya, 0 menerapkan nilai wajar, 1 metode biaya, 0,5 menerapkan kedua metode. Kemudian untuk skor penilaian untuk uji beda statistik yaitu 0,5 metode biaya dan 1 nilai wajar. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan jumlah perusahaan yang menerapkan nilai wajar untuk Aset Tetap, Imbalan Kerja, Aset Takberwujud, Piutang, dan Pinjaman, hal ini menunjukkan adanya kenaikan daya banding atau daya banding tinggi ketika menerapkan metode biaya. Sedangkan untuk Properti Investasi, Instrumen Keuangan terdiri dari Diperdagangkan, Derivatif Lindung Nilai, Derivatif, Tersedia untuk Dijual dan Hutang Obligasi tidak ada perbedaan, hal ini menunjukkan adanya kenaikan daya banding atau daya banding tinggi ketika menerapkan nilai wajar, kecuali Instrumen Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo yang menunjukkan daya banding tinggi ketika menerapkan metode biaya.

**Kata Kunci :** PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar, Metode Biaya, Indeks Taplin (Index-T), Uji Beda, Kebijakan Akuntansi

## **ABSTRACT**

*This study aims to investigate and analyst the impact PSAK 68 Fair Value Measurement of International Financial Reporting Standards (IFRS) Convergence Accounting Policy Choice in Indonesia. The population in this study is all of manufacturing and property & real estate company listed in Indonesia Stock Exchange on period 2012-2015 annual report financial statements. The sampling method used of purposive sampling with the result 556 data sample. Variable category used to grouping object under study is PSAK 68 Fair Value Measurement. Object studied in accounting policy is Property, Plant & Equipment, Investment Property, Intangible Asset, Employee Benefits, Financial Instruments : Derivative, Derivative Hedging, Traded, Available for Sale, Held to Maturity, Receivable, Loan and Bond Payable. Tech data analyst used is content analysis consist of index-T and Paired Sample Test, Wilcoxon Test, McNemar Test. Value score for index-T is 1 fair value, 0 cost method, 0 fair value, 1 cost method and 0,5 both method. Then value score Paired Sample Test, Wilcoxon Test, McNemar Test is 0,5 cost method and 1 fair value. The result of hypothesis has significant differents amount company applied fair falue is Property, Plant & Equipment, Employee Benefits, Intangible Asset, Financial Instruments : Receivable and Loan. This study shows that decrease in the comparability fair value and increase in the comparability which applied cost method. While accounting policy that is Investment Property, Financial Instruments : Traded, Derivative, Derivative Hedging, Available for Sale, and Bond Payable had no significant differents. This study shows that increase in the comparability which applied fair value, except Held to Maturity is increase in the comparability applied cost method.*

**Keywords** : PSAK 68 Fair Value Measurement, Cost Method, Index-T, Paired Sample Test, Wilcoxon Test, McNemar Test, Accounting Policy

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi informasi yang berkembang pesat membuat informasi menjadi tersedia di seluruh dunia. Pesatnya teknologi informasi ini merupakan akses bagi banyak investor untuk memasuki pasar modal di seluruh dunia, yang tidak terhalangi oleh batasan negara, misalnya : Investor dari Belanda bisa dengan mudah berinvestasi di Jepang, Amerika, Singapore, atau bahkan Indonesia. Kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi apabila perusahaan-perusahaan masih memakai prinsip pelaporan keuangan yang berbeda-beda. Amerika memakai FASB dan US GAAP, Indonesia memakai PSAK-nya IAI, uni eropa memakai IAS dan IASB. Hal tersebut melatarbelakangi perlunya adopsi IFRS saat ini. Pada era globalisasi ini sudah saatnya diberlakukan sistem akuntansi secara internasional di tiap negara, atau harmonisasi, agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan, memahami jalannya dalam analisis pasar, mempermudah hubungan baik dengan pelanggan, investor, kreditor serta berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Gamayuni, 2009) Penggunaan seperangkat standar akuntansi berkualitas tinggi akan memberikan fasilitas investasi dan pengambilan keputusan ekonomis lainnya melewati lintas batas, meningkatkan efisiensi pasar, dan mengurangi biaya untuk peningkatan modal. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) semakin menjadi perangkat standar akuntansi yang diterima secara global yang memenuhi

kebutuhan dunia, dengan semakin bertambahnya pasar modal global yang terintegrasi. (Ankarath Nandakumar, Kalpesh J. Mehta, 2012)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mencanangkan bahwa Standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan. Pada tahun 2012 tersebut diharapkan Indonesia sudah mengadopsi keseluruhan IFRS, sedangkan khusus untuk perbankan diharapkan tahun 2010. (IAI, 2009)

Hal yang melatarbelakangi perlunya adopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) saat ini yaitu adanya Dinamika Perekonomian Global. Adanya pergeseran siklus ekonomi global pada tahun 2013 dimulai dengan beralihnya *landscape* ekonomi dunia ditandai bertumbuhnya ekonomi negara maju dan melambatnya ekonomi negara berkembang atau dalam istilah (*emerging market*), dimana negara (*emerging market*) ini menjadi penopang utama ekonomi dunia.

Pergeseran kedua ialah adanya kebijakan pengurangan stimulus ekonomi dari negara-negara maju termasuk Amerika Serikat dikenal dalam istilah (*tapering off*) oleh The Fed (*Federal Reserve*) pada triwulan I 2013 hingga triwulan III 2014. Hal ini bermula dari membaiknya perekonomian AS pada saat adanya pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan stimulus fiskal akibat terjadinya resesi sejak tahun 2009 yang mendorong munculnya kebijakan *quantitative easing* dengan melakukan pembelian aset keuangan jangka panjang pada tahun 2012. Kemudian di tahun 2013

seiring dengan tren perbaikan perekonomian AS, pemerintah AS melakukan langkah pengurangan stimulus ekonomi (*tapering off*) dengan menjual aset keuangan jangka panjang tersebut sehingga aliran dana masuk yang diinvestasikan dari negara-negara berkembang mengalami koreksi. Akibatnya mata uang negara-negara (*emerging market*) mengalami tekanan termasuk Indonesia. Rupiah mengalami depresiasi yang cukup tajam disebabkan adanya penarikan dana aliran modal investasi dari negara-negara (*emerging market*) ke negara maju. Sehingga dengan adanya depresiasi nilai tukar rupiah akan mempengaruhi kenaikan biaya produksi di Indonesia terutama impor yang mengakibatkan terjadinya inflasi. Dampaknya yang terjadi adalah kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebesar 175 basis poin sebesar 7,5% pada tahun 2013 kembali meningkat di akhir tahun 2014 menjadi 7,75% serta kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai 30% di akhir tahun 2013. (BI, 2013)

Pergeseran terakhir dimulai dengan berlanjutnya tren penurunan harga komoditas dunia pada tahun 2014 serta adanya kenaikan suku bunga pada tahun 2015. Harga komoditas global masih dalam tren menurun sejalan dengan permintaan dunia, terutama negara-negara berkembang (*emerging market*), dan meningkatnya pasokan komoditas. Sementara itu, berhubungan terjadinya perubahan *landscape* ekonomi global, permintaan domestik Amerika Serikat (AS) yang menguat akan meningkatkan permintaan ekspor Indonesia ke AS. Beberapa komoditas utama yang diperkirakan meningkat yakni tekstil, karet olahan, elektrikal dan alas kaki. Faktanya hingga tahun 2015 masih berlanjut terjadinya

perlambatan pemulihan perekonomian secara global. Penurunan harga komoditas ekspor Indonesia sampai dengan tahun 2015 terutama bersumber pada penurunan karet, minyak kelapa sawit dan batubara. Harga karet melemah 18,6% selama tahun 2015 disebabkan turunnya permintaan Tiongkok terhadap karet alam terkait permasalahan lingkungan. Selain itu harga karet juga melemah sejalan dengan harga minyak dunia yang menurun, mengingat minyak berfungsi sebagai barang substitusi utama dari komoditas karet. Sedangkan batubara menurun disebabkan oleh kebijakan pemerintah Tiongkok untuk melindungi industri dalam negeri dan kebijakan pengurangan emisi karbon dalam pembangkit listrik. Kemudian untuk minyak kelapa sawit terjadi penurunan harga sebesar 8,2% dipicu oleh *oversupply* minyak kelapa sawit di Malaysia. Selain itu, rendahnya harga kacang kedelai dan minyak dunia sebagai barang substitusi turut menurunkan harga minyak kelapa sawit. Tren penurunan harga komoditas global ini dipengaruhi oleh strategi pemerintahan Tiongkok yang mengalihkan sumber pertumbuhan ekonominya dari investasi dan ekspor kepada konsumsi. Dalam pembahasan ini, transformasi ekonomi Tiongkok ditempuh demi mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan yang merupakan tujuan jangka panjang ekonomi Tiongkok.

Kemudian selanjutnya terjadi kenaikan suku bunga. The Fed menaikkan FFR (*Federal Funds Rate*) pada FOMC (*Federal Open Market Committee*) Desember 2015 sebesar 25 bps. Kenaikan suku bunga ini dilakukan sejalan dengan membaiknya indikator ekonomi AS, ditandai dengan perbaikan tenaga kerja selama tahun 2015 yang turut mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sejalan

dengan penurunan harga BBM di AS, sehingga nilai mata uang dollar kembali menguat. Kenaikan suku bunga ini berdampak pada turunnya kinerja bursa saham global pada semester II 2015 serta pemburukan pasar saham Tiongkok dimana depresiasi nilai tukar yuan juga terjadi. Depresiasi nilai tukar yuan yang terjadi telah meningkatkan posisi utang luar negeri korporasi Tiongkok.

Perubahan *landscape* ekonomi global tersebut memberikan dampak lanjutan terhadap perekonomian melalui jalur perdagangan. Dengan semakin terintegrasinya perekonomian global, dinamika terjadi di suatu negara akan berdampak terhadap negara lain. (BI, 2015)

Respon kebijakan yang ditempuh di berbagai negara-negara dunia, terutama negara berkembang atau *emerging market* (EM) cenderung luas dibandingkan dengan kebijakan di negara-negara maju. Untuk kebijakan moneter di negara (*emerging market*) langkah yang diikuti yakni kebijakan fiskal dan struktural. Pada tahun 2015 Indonesia menempuh kebijakan fiskal yang mendorong stimulus ekonomi. Sebagai upaya mendorong permintaan domestik dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang, Pemerintah Indonesia meningkatkan belanja modal untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis melalui pemulihan neraca perdagangan nasional akibat terjadinya inflasi serta defisit fiskal. Selain itu untuk reformasi struktural juga diterapkan dalam rangka penyediaan infrastruktur memadai, perbaikan iklim investasi, dan penanganan masalah kependudukan. Respon kebijakan tersebut bertujuan memitigasi gejolak pasar keuangan sebagai



dampak dari lemahnya ekonomi dan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. (BI, 2015)

Pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat, disertai perbedaan arah kebijakan moneter di negara maju menjadi fokus perhatian kerjasama internasional. Evaluasi yang dilakukan ini mencermati tren penguatan dollar AS, normalisasi kebijakan moneter AS, melemahnya ekonomi Tiongkok, dan penurunan harga komoditas global. Respon dari kondisi tersebut adalah kerjasama untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan berkualitas, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan resiliensi kawasan.

Upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yakni kerjasama di bidang perdagangan. Bank Indonesia menjalin kerjasama *bilateral currency swap agreement* (BCSA) guna meningkatkan transaksi perdagangan bilateral dengan negara mitra serta mengurangi ketergantungan terhadap Dollar AS. Kemudian upaya lain Indonesia untuk mendukung stabilitas sistem keuangan bisa dilakukan dengan mereformasi transaksi *over the counter* (OTC) di pasar derivatif. Reformasi ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur, terutama aspek transparansi dan pengelolaan risiko kredit di pasar derivatif serta membatasi risiko yang berdampak negatif. (BI, 2015)

Hal itulah menyebabkan munculnya isu yang melatarbelakangi perlunya adopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) bahkan hingga saat ini, apabila mengacu pada situasi dan kondisi terjadinya dinamika perekonomian global

yang mengakibatkan pasang surut dari input ke output kegiatan. Terjadinya penurunan input bisa berdampak pada pelemahan perekonomian global sebaliknya terjadinya kenaikan input yang didukung oleh pasar bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian global.

Berdasarkan data historis ada 2 dewan penyusun standar yaitu IASB yang merupakan organisasi internasional dan bertanggungjawab atas penerbitan IFRS, dan FASB (*Financial Accounting Standards Board*) yang merupakan organisasi di Amerika Serikat yang bertanggungjawab atas penerbitan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*). FASB dan organisasi pendahulunya memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun dalam penerbitan GAAP yang terdiri antara lain SFAC (*Statements of Financial Accounting Concepts*), SFAS (*Statements of Financial Accounting Standards*), FASB *Interpretations* dan FASB *Technical Bulletins*. (Dr. Sony Warsono-bin-Hardono, MAFIS, 2011) di satu sisi, terdapat beberapa kesamaan antara IFRS dan GAAP. Namun demikian, di sisi lain, juga terdapat perbedaan di antara keduanya. Salah satu contoh perbedaan adalah pengembangan IFRS diklaim mendasarkan diri pada *principles-based* dan menggunakan pengukuran terutama berbasis nilai wajar (*fair value*) yang mengacu pada harga pasar, sedangkan pengembangan GAAP dipertimbangkan mendasarkan diri pada *rules-based* dan menggunakan pengukuran terutama berbasis nilai perolehan atau metode biaya (*historical cost*). Maka perbedaan-perbedaan yang terjadi diharapkan dapat diminimalkan dan pada akhirnya dihapuskan melalui konvergensi di antara kedua standar tersebut. Pada dasarnya IASB dan FASB

keduanya menyadari kebutuhan perlunya standar tunggal pelaporan keuangan global yang berkualitas tinggi.

Isu berikutnya dalam adopsi IFRS adalah aturan pengukuran nilai wajar. Aturan dari IFRS terkait pengukuran nilai wajar yakni *mixed method*, artinya memilih menggunakan metode biaya atau nilai wajar, meskipun ada kebijakan akuntansi tertentu mewajibkan menerapkan nilai wajar. (Khomsatun, 2016)

Di Indonesia, standar pengukuran nilai wajar pertama baru berlaku efektif per 1 Januari 2008 yaitu PSAK 13 : Properti Investasi dan PSAK 16 tentang Aset Tetap. Kemudian tahun-tahun berikutnya disusul oleh standar lain sampai pada 1 Januari 2012, DSAK IAI telah berhasil menyelesaikan proses konvergensi IFRS tahap pertama. DSAK IAI terus melanjutkan proses konvergensi IFRS di tahun 2013 dan 2014, melalui konvergensi tahap kedua, dimana ada yang direvisi termasuk PSAK 24 (Revisi 2013) : Imbalan Kerja yang disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK 24 (Revisi 2013) ini menggantikan PSAK 24 (2010) yang diadopsi dari IAS 19 efektif per 1 Januari 2015. Kemudian ada yang sudah di amandemen termasuk PSAK 24 tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja yang disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 28 Oktober 2015 dan merupakan adopsi dari *Amandement to IAS 19 Defined Benefit Plans: Employee Contributions* efektif per 1 Juli 2014. Penyesuaian tahunan juga sudah dilakukan termasuk PSAK 24 (Penyesuaian 2016) telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 28 September 2016 dan merupakan adopsi dari *Annual Improvements to IFRS 2012-2014 Cycle*

yang efektif per 1 Januari 2016. Berikutnya PSAK 13 : Properti Investasi dan PSAK 16 : Aset Tetap diterapkan entitas untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 berlaku secara prospektif. Ketiga PSAK tersebut bersifat pilihan dalam pengukuran nilai wajar. Sebenarnya PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran sudah lebih dahulu disahkan, namun efektif berlaku baru dimulai per 1 Januari 2010 (mengalami penundaan berlaku efektif yang awalnya per 1 Januari 2009). PSAK 55 Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran juga diterapkan entitas untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 berlaku secara retrospektif. (IAI, 2014) Selanjutnya PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar juga diterapkan entitas untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 berlaku secara prospektif. (IAI, 2014) Dalam instrumen keuangan ini, ada yang bersifat pilihan dan wajib dalam menerapkan pengukuran nilai wajar. (Khomsatun, 2016)

Penelitian ini diterapkan pada Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 yang menurut DSAK IAI pada periode 2012 sudah dikonvergensi IFRS tahap pertama, kemudian periode 2015 juga sudah dikonvergensi IFRS tahap kedua. Alasan memilih Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate yakni pada periode 2012-2015 terdapat risiko kredit yang mendorong terjadinya penurunan harga komoditas dan depresiasi nilai tukar rupiah sehingga mengakibatkan tingginya biaya produksi perusahaan dan biaya tenaga kerja. Penerapan pengukuran nilai wajar ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memberikan informasi terkait kebijakan berupa solusi

dalam memitigasi gejolak pasar keuangan sebagai dampak dari pelemahan perekonomian secara global.

Beberapa penelitian terdahulu terkait Penerapan Pengukuran Nilai Wajar Konvergensi IFRS dan dampaknya pada pilihan kebijakan akuntansi di Indonesia dilakukan oleh (Khomsatun, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK 13 untuk Properti Investasi tidak signifikan, sehingga tidak ada beda antara sebelum dan ketika masa konvergensi PSAK 13 atas daya banding laporan keuangan perusahaan di Indonesia yang memiliki aset properti investasi. Belum banyaknya perusahaan yang menggunakan nilai wajar dimungkinkan karena pengukuran nilai wajar perlu biaya tinggi untuk mendatangkan appraisal. Hal ini sependapat menurut penelitian di luar negeri yaitu (Carletti, 2008) yang menyebutkan bahwa nilai historis masih lebih berguna dibanding nilai wajar.

Hasil penelitian (David Cairns, Dianne Massoudi, 2011) menunjukkan berbeda untuk perusahaan Australia sebagian besar menggunakan nilai wajar dibandingkan biaya, sedangkan di UK mengalami hal yang sama yakni lebih banyak menggunakan nilai wajar.

Kemudian PSAK 16 : Aset Tetap, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khomsatun, 2016) menunjukkan bahwa ada perbedaan antara masa sebelum dan pada saat konvergensi PSAK 16. Berdasarkan pengukuran index-T mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan daya banding signifikan. Terjadi kenaikan ini disebabkan awalnya perusahaan melakukan revaluasi aset sesuai kebijakan

pemerintah beralih ke metode biaya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (David Cairns, Dianne Massoudi, 2011) menunjukkan sama, perbedaannya adalah perusahaan melakukan revaluasi menimbulkan biaya tinggi untuk melakukan appraisal dan penentuan sendiri diragukan keandalannya.

Untuk PSAK 19 : Aset takberwujud, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khomsatun, 2016) menunjukkan bahwa untuk aset tak berwujud tidak signifikan artinya tidak ada perubahan dalam pengukuran aset tak berwujud di Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan oleh (David Cairns, Dianne Massoudi, 2011) yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak signifikan. Hal ini disebabkan sulitnya menentukan keandalan dari aset takberwujud, sehingga perusahaan memilih menggunakan metode biaya.

Kemudian penelitian terkait Instrumen Keuangan PSAK 55 : Pengakuan dan Pengukuran, Instrumen Keuangan diperdagangkan. Hasil penelitian dari (Khomsatun, 2016) menunjukkan bahwa tidak signifikan, dikarenakan semua yang mempunyai instrumen keuangan yang diperdagangkan menggunakan nilai wajar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (David Cairns, Dianne Massoudi, 2011) untuk perusahaan di Australia. Perusahaan UK mengalami kenaikan daya banding disebabkan penggunaan nilai wajar awalnya hanya untuk perusahaan bank dan asuransi dan kini semua perusahaan. Hal ini karena penentuan nilai wajar tersedia di pasar modal.

Untuk Instrumen Keuangan tersedia untuk dijual PSAK 55 Pengakuan dan Pengukuran, hasil penelitian dari (Khomsatun, 2016) menunjukkan tidak signifikan artinya bahwa perbedaannya sedikit sebelum dan ketika penerapan PSAK 55 untuk instrumen keuangan tersedia dijual. Hasil penelitian menunjukkan sama untuk penelitian yang dilakukan oleh (David Cairns, Dianne Massoudi, 2011) untuk daya banding perusahaan di UK. Akan tetapi di Australia menunjukkan adanya daya banding yang signifikan. Perusahaan di UK masih sama dengan perusahaan di Indonesia yaitu masih ada yang menggunakan metode biaya setelah berlaku adopsi IFRS. Sedangkan di perusahaan Australia semua perusahaan menggunakan nilai wajar. Meskipun demikian, daya banding laporan keuangan di Indonesia tinggi.

Berikutnya Instrumen keuangan dimiliki hingga jatuh tempo PSAK 55 Pengakuan dan Pengukuran, hasil penelitian dari (Khomsatun, 2016) menunjukkan tidak signifikan artinya hanya ada 1 perusahaan yang menggunakan nilai wajar, disebabkan adanya daya banding lebih tinggi di Indonesia ketika menerapkan metode biaya.

Berikutnya Instrumen keuangan Pinjaman dan Piutang PSAK 55 Pengakuan dan Pengukuran, hasil penelitian dari (Khomsatun, 2016) menunjukkan tidak signifikan artinya tidak ada perubahan kebijakan perusahaan dalam menerapkan nilai wajar sehingga lebih memilih metode biaya. Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan (David Cairns, Dianne Massoudi, 2011) yang menunjukkan bahwa, baik di UK maupun di Australia mengalami penurunan daya banding

laporan keuangan setelah menggunakan pengukuran nilai wajar IFRS. Untuk instrumen keuangan pinjaman, di UK perusahaan mengalami penurunan daya banding dan untuk Australia menunjukkan sama dengan di Indonesia yakni tidak ada perubahan.

Berdasarkan asumsi latar belakang di atas beserta penelitian-penelitian sudah diungkapkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait relevansi nilai untuk PSAK 13 : Properti Investasi, PSAK 16 : Aset Tetap, PSAK 24 : Imbalan Kerja, PSAK 19 : Aset Takberwujud dan PSAK 55 Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran terdiri dari instrumen keuangan diperdagangkan, derivatif lindung nilai, derivatif, tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan, piutang dan hutang obligasi untuk membuktikan apakah perusahaan tersebut menerapkan pengukuran nilai wajar atau metode biaya pada saat konvergensi IFRS. Maka penulis melakukan penelitian tentang : **“Penerapan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dan Dampaknya pada Pilihan Kebijakan Akuntansi di Indonesia”** (Studi Perbandingan pada Laporan Keuangan Tahunan dari Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pertanyaan-pertanyaan berikut diajukan sebagai solusi atas permasalahan utama dalam penelitian yaitu :



1. Apakah ada perbedaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar untuk Aset Tetap di Indonesia ?
2. Apakah ada perbedaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar untuk Properti Investasi di Indonesia ?
3. Apakah ada perbedaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar untuk Imbalan Kerja di Indonesia ?
4. Apakah ada perbedaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar untuk Aset Takberwujud di Indonesia ?
5. Apakah ada perbedaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar untuk Instrumen Keuangan Diperdagangkan di Indonesia ?
6. Apakah ada perbedaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar untuk Instrumen Keuangan Derivatif Lindung Nilai di Indonesia ?
7. Apakah ada perbedaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar untuk Instrumen Keuangan Derivatif di Indonesia ?
8. Apakah ada perbedaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar untuk Instrumen Keuangan Tersedia untuk Dijual di Indonesia ?
9. Apakah ada perbedaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar untuk Instrumen Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo di Indonesia ?
10. Apakah ada perbedaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar untuk Instrumen Keuangan Piutang di Indonesia ?

11. Apakah ada perbedaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar untuk Instrumen Keuangan Pinjaman di Indonesia ?
12. Apakah ada perbedaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar untuk Instrumen Keuangan Hutang Obligasi di Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1 Menginvestigasi dan menganalisis Perusahaan dalam menerapkan pengukuran nilai wajar untuk Aset Tetap di Indonesia
- 2 Menginvestigasi dan menganalisis Perusahaan dalam menerapkan pengukuran nilai wajar untuk Properti Investasi di Indonesia
- 3 Menginvestigasi dan menganalisis Perusahaan dalam menerapkan pengukuran nilai wajar untuk Imbalan Kerja di Indonesia
- 4 Menginvestigasi dan menganalisis Perusahaan dalam menerapkan pengukuran nilai wajar untuk Aset Takberwujud di Indonesia
- 5 Menginvestigasi dan menganalisis Perusahaan dalam menerapkan pengukuran nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Diperdagangkan di Indonesia
- 6 Menginvestigasi dan menganalisis Perusahaan dalam menerapkan pengukuran nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Derivatif Lindung Nilai di Indonesia
- 7 Menginvestigasi dan menganalisis Perusahaan dalam menerapkan pengukuran nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Derivatif di Indonesia

- 8 Menginvestigasi dan menganalisis Perusahaan dalam menerapkan pengukuran nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Tersedia untuk Dijual di Indonesia
- 9 Menginvestigasi dan menganalisis Perusahaan dalam menerapkan pengukuran nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo di Indonesia
- 10 Menginvestigasi dan menganalisis Perusahaan dalam menerapkan pengukuran nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Piutang di Indonesia
- 11 Menginvestigasi dan menganalisis Perusahaan dalam menerapkan pengukuran nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Pinjaman di Indonesia
- 12 Menginvestigasi dan menganalisis Perusahaan dalam menerapkan pengukuran nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Hutang Obligasi di Indonesia

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi pengguna laporan keuangan dalam menganalisis secara akurat sumber informasi pengukuran nilai wajar sebagai pengambilan keputusan ekonomi.

##### Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi investor dan perusahaan dalam membantu menganalisis perubahan pasar terkait situasi dan kondisi perekonomian domestik maupun global dan mampu menyesuaikan perubahan pasar tersebut sebagai keputusan terbaik, mengingat

pengukuran nilai wajar ini berbasis harga pasar dengan mangacu pada informasi pasar.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. **BAB I – PENDAHULUAN.** Bab ini berisi arti penting penelitian, paparan masalah dan tujuan penelitian. Pada bagian awal, selain memaparkan arti penting penelitian, peneliti harus juga menonjolkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian orang lain serta beberapa penelitian terdahulu. Penulisan pendahuluan biasanya menggunakan format piramida terbalik. Dengan menggunakan format ini, peneliti akan menuliskan hal-hal yang umum secara lebar terlebih dahulu kemudian disusul dengan paparan detail yang lebih menjurus dan sempit. Sub bagian di pendahuluan ini adalah : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
2. **BAB II – TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS.** Di bagian ini, peneliti harus mampu memaparkan alasan teoritik atas penelitian yang dilakukannya. Selain itu peneliti juga harus membangun yang namanya kerangka teori dan teori dasar untuk melandasi hubungan variable terhadap objek yang diteliti, kemudian langkah selanjutnya peneliti memberikan logika tentang proses terjadinya Hipotesis penelitian yang didukung dari teori dasar tersebut.
3. **BAB III – METODE PENELITIAN.** Bagian ini pada dasarnya memuat dua hal pokok, yaitu metode yang berhubungan dengan data dan metode yang berhubungan dengan analisis. Pada bagian yang berhubungan data, dipaparkan populasi penelitian serta alasan pemilihan populasi tersebut. Bila populasinya besar dan penelitian hanya menggunakan sampel, maka peneliti harus mencantumkan metode pengambilan sampel serta tata cara menentukan

jumlah sampelnya. Dalam paparan tentang alat analisis, peneliti harus menjelaskan alasan penggunaan alat tersebut.

4. **BAB IV – ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.** Pada bagian ini, peneliti harus berusaha untuk menjelaskan temuan-temuan dalam analisis. Di sini peneliti tidak hanya mengatakan bahwa variable ini signifikan sehingga hipotesa nul ditolak atau sebaliknya, tetapi peneliti juga harus mampu menguraikan implikasi dari hal itu. Setiap analisis yang dilakukan sebaiknya ditutup dengan simpulan dan implikasi yang mungkin ada.
5. **BAB V – PENUTUP.** Bab ini terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini idealnya adalah cuplikan ringkas dari bagian analisis data. Semua hal yang ditulis di sini harus sudah ada dan dibahas di bagian analisis data. Selain itu bab ini juga menerangkan keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **2.1 TINJAUAN TEORITIS**

##### **2.1.1 Teori Regulasi**

Kovergensi PSAK ke IFRS merupakan salah satu regulasi mengenai standar akuntansi di Indonesia. Menurut (Riahi, 2011) regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk kepentingannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu, yaitu (1) teori-teori kepentingan publik (*the public interest theory*), dimana regulasi terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum, dan (2) teori kelompok yang berkepentingan atau teori perebutan (*The Interest Group Theory*), bahwa regulasi diberikan atas tujuan untuk memaksimalkan laba dari para anggotanya. Versi utama dari teori ini adalah teori regulasi kaum elit yang menguasai politik dan teori regulasi ekonomi. Menurut (Astika, 2008), teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya. (Astika, 2008) Dengan demikian, maka tidak lengkapnya pengungkapan informasi menyebabkan munculnya regulasi yang menguntungkan bagi kelompok-kelompok tertentu.

### 2.1.2 *Positive Accounting Theory* (PAT)

(Watts & Zimmerman, 1990) dalam makalahnya berjudul “*Positive Accounting Theory : A Ten Years Perspective*” (1990) mengemukakan 3 hipotesis dari PAT yaitu : *The Bonus Plan Hypothesis*, hipotesis ini mengemukakan bahwa manajer akan memilih prosedur akuntansi yang akan menggeser pendapatan di masa mendatang ke periode sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan bonus. *Debt Covenant Hypothesis*, hipotesis ini mengemukakan bahwa bagi perusahaan yang akan melanggar perjanjian hutang, maka manajer akan memiliki kemungkinan akan memilih prosedur akuntansi yang menggeser pendapatan periode mendatang ke periode sekarang sehingga meningkatkan laba bersih yang digunakan untuk melunasi hutang. *Political Cost Hypothesis*, hipotesis ini mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung menggeser pendapatannya dari periode ini ke periode mendatang untuk menghindari adanya biaya politis.

## 2.2 RERANGKA ACUAN KONSEPTUAL

Menurut (FASB, 1978) mendefinisikan Rerangka Acuan Konseptual seperti berikut : “... *Suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan*”.

Menurut Suwarjono (1989) dalam bukunya (Muqodim, 2005) Rerangka Konseptual diperlukan keberadaannya dengan fungsi utama adalah sebagai acuan

bagi pihak penyusun standar akuntansi (*accounting standard committee*) dalam menyusun Standar Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting Standard*).

#### 2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Rerangka Acuan Konseptual

Broad principles (Hendriksen, 1982) atau *body of doctrine* (Paton dan Littleton, 1940) dalam bukunya (Muqodim, 2005) yang kemudian dikenal sebagai rerangka konseptual hendaknya terefleksi dalam kenyataan praktik akuntansi secara efektif. Oleh karena itu rerangka tersebut harus dijabarkan dalam peraturan-peraturan yang rinci dalam bentuk standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi.

Berikut ini merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam penelitian ini untuk menyusun rerangka konseptual serta pengaruhnya terhadap praktek akuntansi menurut Hendriksen (1982) diantaranya : lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, tujuan laporan keuangan, identifikasi informasi, definisi, evaluasi, pengukuran, penilaian, pengakuan, informasi yang relevan, serta metode yang dipilih. (Muqodim, 2005)

Faktor-faktor di atas harus dipertimbangkan secara matang oleh para penyusun rerangka acuan konseptual karena ia akan berlaku dalam jangka waktu relatif panjang atau boleh dikatakan bahwa rerangka konseptual mempunyai sifat cukup permanen. Oleh karena itu rerangka acuan harus disusun secara hati-hati, memerlukan pemikiran mendalam oleh sebuah tim yang anggotanya terdiri dari para ahli maupun praktisi akuntansi. Sebelum diterbitkan sudah seharusnya konsep rerangka acuan memerlukan diskusi dalam beberapa tahap secara mendalam.



### 2.2.2 Tujuan dan Fungsi Rerangka Konseptual

Salah satu tujuan dan fungsi rerangka konseptual dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi kepada para pemakai laporan keuangan serta memecahkan masalah perlakuan akuntansi tertentu apabila belum ada standar yang mengaturnya atau akan ada standar baru.

### 2.2.3 Badan Penyusun Standar Akuntansi Keuangan (1973-2007)

Pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur daripada GAAP dan GAAS. Selanjutnya pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Kemudian Komite PAI tersebut pada tahun 1994 diubah namanya menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (KSAK). Pada Kongres VIII 23-24 September 1998 diubah kembali namanya menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (Indonesia, 2009)

### 2.2.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Tanggal efektif 1 Januari 2015 berlaku di Indonesia sudah konvergen dengan IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Melalui proses konvergensi dari 1 Januari 2012 ke tahun 2013 dan 2014 hingga tahun 2015 tersebut, telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun pada tanggal 1 Januari 2012 konvergensi tahap I menjadi satu tahun di tanggal 1 Januari

2015 konvergensi tahap II oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). (IAI, 2014)

#### 2.2.5 *International Financial Reporting Standards (IFRS)*

Menurut (Ankarath Nandakumar, Kalpesh J. Mehta, 2012), Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) merupakan seperangkat standar yang disebarluaskan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) atau diterjemahkan *International Accounting Standards Board*, yaitu suatu badan penentu standar internasional di London, Inggris. Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) menekankan pada pengembangan standar yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang baik, jelas dinyatakan, dari mana interpretasi diperlukan. Pengembangan IFRS berbasis prinsip merupakan karakteristik utama yang mudah dikenali dan dipertimbangkan. Karakteristik pengembangan IFRS berbasis prinsip tertuang dalam salah satu tujuan IFRS *Foundation* sebagai berikut “*to develop, in the public interest, a single set of high quality, understandable, enforceable and globally accepted financial reporting standards....*” (IASB, 2010)

Wells dan Lopez (2009) dalam bukunya (Dr. Sony Warsono-bin-Hardono, MAFIS, 2011) menerangkan bahwa karakteristik standar berbasis prinsip adalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip inti
2. Konsisten
3. Keterikatan dengan kerangka dasar konseptual
4. Kebijakan dalam bentuk pertimbangan (*judgement*) dalam penerapan standar

## 5. Tuntutan

Wells dan Lopez (2009) dalam bukunya (Dr. Sony Warsono-bin-Hardono, MAFIS, 2011) juga menyebutkan 4 jenis prinsip yang dianut dalam pengembangan IFRS, yaitu :

1. Prinsip Pengakuan dan Penghentian Pengakuan
2. Prinsip-prinsip inti
3. Prinsip Pengukuran
4. Prinsip penyajian dan pengungkapan

Karena standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) berbasis prinsip, maka pendekatan IFRS lebih fokus pada bisnis atau bertujuan ekonomi dari suatu transaksi dan hak-hak serta liabilitas yang mendasari, selain memberikan aturan (pedoman). (Ankarath Nandakumar, Kalpesh J. Mehta, 2012)

Beberapa terminologi yang lazim digunakan dalam menggambarkan tingkat implementasi IFRS menurut (Dr. Sony Warsono-bin-Hardono, MAFIS, 2011), yaitu sebagai berikut :

1. Harmonisasi; standar nasional dan IFRS merupakan dua standar yang berbeda tetapi terdapat kesepakatan untuk menjaga keserasian diantara keduanya. Standar nasional boleh berbeda sepanjang tidak mengganggu keserasian hubungan dengan IFRS. Modifikasi standar nasional dilakukan dalam intensitas yang relatif kecil.

2. Adaptasi; diharapkan standar nasional menyesuaikan diri dengan IFRS. Pengaturan standar nasional dilaksanakan dalam intensitas cukup tinggi dengan tujuan mampu bertahan pada lingkungan IFRS.
3. Konvergensi; IFRS dan standar nasional awal mulanya memiliki titik awal berbeda yang memiliki karakteristik umum kemudian menyatu pada satu standar.
4. Adopsi; standar nasional mulai berpindah menuju IFRS sepenuhnya atau standar baru.

### **2.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Menurut (IAI, 2014) Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

#### **2.3.1 Pengungkapan Kebijakan Akuntansi**

Suatu entitas harus mengungkapkan secara ringkas kebijakan akuntansi yang signifikan :

1. Dasar pengukuran (atau basis) yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi lainnya yang digunakan adalah relevan bagi suatu pemahaman laporan keuangan
2. Pertimbangan. Bagian dari estimasi yang terkait bahwa manajemen melaksanakan proses penerapan kebijakan akuntansi entitas dan yang

mempunyai dampak paling signifikan atas jumlah yang diakui di dalam laporan keuangan

3. Informasi mengenai asumsi yang terjadi di masa datang, dan sumber utama lainnya mengenai ketidakpastian pada akhir periode pelaporan (IAI, 2012)

Menerapkan perubahan dalam kebijakan akuntansi

Bilamana suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi atas dasar suatu standar atau interpretasi yang baru atau yang sudah diubah, maka provisi peralihan tertentu harus diikuti dalam mengadopsi perubahan. Namun, bila tidak ada provisi pengalihan ditetapkan, atau apabila entitas mengubah kebijakan akuntansi secara sukarela, maka perubahan tersebut harus diterapkan berlaku surut (seolah-olah kebijakan tersebut telah selalu diterapkan), atau disebutkan bahwa entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. (Ankarath Nandakumar, Kalpesh J. Mehta, 2012) Menurut (IAI, 2014) Provisi merupakan liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti.

Perubahan Estimasi Akuntansi

Sebagai akibat ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis, banyak pos dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat tetapi hanya dapat diestimasi. Contoh :

1. Piutang tak tertagih
2. Persediaan usang
3. Nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan
4. Umur manfaat aset yang tersusutkan

## 5. Kewajiban garansi

Dampak perubahan estimasi akuntansi, diakui secara prospektif dalam laba rugi pada :

1. Periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode tersebut
2. Periode perubahan dan periode mendatang. (IAI, 2014)

## 2.4 PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar

### Definisi Nilai Wajar

Menurut (IAI, 2014) dalam penjelasan PSAK 68, nilai wajar merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

### Aset atau Liabilitas

Pengukuran nilai wajar adalah untuk aset atau liabilitas tertentu. Oleh karena itu, ketika mengukur nilai wajar entitas memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Karakteristik ini termasuk :

1. Berdasarkan pada lokasi aset di tempat strategis dan kondisi dari aset
2. Penggunaan aset atau penjualan suatu aset itu sendiri

Aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari salah satu hal sebagai berikut ini :

1. Jenis aset dan liabilitas tertentu (misalnya : *monetary assets* atau aset moneter maupun aset non-moneter)
2. Merupakan kelompok aset dan liabilitas (misalnya : unit penghasil kas atau bisnis)

#### Pelaku Pasar

Perusahaan mengukur nilai wajar aset dan liabilitas menggunakan asumsi dari pelaku pasar ketika menentukan harga, dengan syarat pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

#### Pengukuran Nilai Wajar

Untuk meningkatkan daya banding pengukuran nilai wajar dalam penelitian ini, digunakan pengungkapan dalam bentuk hierarki nilai wajar yang masuk dalam kategori Input Level 1, Input Level 2 dan Input Level 3 berikut ini :

1. Input Level 1 : Informasi pengukuran nilai wajar untuk aset dan liabilitas berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif.
2. Input Level 2 : Informasi pengukuran nilai wajar untuk aset dan liabilitas berasal dari penyesuaian harga kuotasian di pasar aktif baik secara langsung atau tidak langsung.

3. Input Level 3 : Informasi pengukuran nilai wajar untuk aset dan liabilitas berasal dari teknik penilaian mencakup input bukan berdasarkan data pasar yang diobservasi.

#### Pendekatan Pengukuran Nilai Wajar

Menurut (IAI, 2014) tujuan dari pengukuran nilai wajar adalah menjual suatu aset atau mengalihkan liabilitas dengan melibatkan pelaku pasar pada tanggal pengukuran untuk mengestimasi harga dimana transaksi tersebut berada dalam kondisi pasar saat ini. Persyaratan pengukuran nilai wajar adalah sebagai berikut :

1. Yang menjadi subyek pengukuran adalah aset dan liabilitas
2. Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan
3. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data untuk mengembangkan input yang merepresentasikan asumsi pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas

#### Teknik Penilaian

Teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar terdiri dari pendekatan pasar, pendekatan biaya dan pendekatan penghasilan. Pendekatan pasar mempertimbangkan penjualan aset dan mengalihkan liabilitas dengan menggunakan informasi pasar, kemudian pendekatan biaya mempertimbangkan untuk menggunakan biaya pengganti baru pada saat tanggal penilaian sedangkan pendekatan penghasilan mempertimbangkan pendapatan dan biaya berhubungan



dengan aset dan liabilitas yang dinilai serta mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi. Pendekatan penghasilan ini juga merupakan salah satu penerapan teknik penilaian dengan menggunakan teknik nilai kini.

#### Komponen Pengukuran Nilai Kini

Nilai kini merupakan alat penghubung jumlah masa depan ke jumlah kini dengan menggunakan tingkat diskonto arus kas. Aset dan Liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan teknik nilai kini mencakup semua elemen dengan melibatkan pelaku pasar pada tanggal pengukuran berikut ini :

1. Arus kas masa depan
2. Jumlah dan waktu ketidakpastian arus kas yang diperkirakan
3. Nilai waktu uang direpresentasikan oleh tingkat dalam aset moneter bebas risiko yang memiliki tanggal jatuh tempo dari arus kas itu sendiri dan bersifat mengurangi ketidakpastian adanya risiko gagal bayar terhadap pemilik
4. Harga untuk mengurangi atau menanggung ketidakpastian arus kas masa depan
5. Adanya pelaku pasar yang memperhitungkan faktor lain dari keadaan tersebut
6. Untuk liabilitas, risiko wanprestasi (*non-performance risk*) terkait dengan liabilitas tersebut, termasuk risiko kredit entitas (yaitu *obligor*) sendiri.

## Prinsip Umum

Prinsip umum penerapan teknik nilai kini yang digunakan untuk mengukur nilai wajar yakni :

1. Pelaku pasar menggunakan asumsi ketika menentukan harga aset dan liabilitas berdasarkan arus kas diskonto
2. Hanya memperhitungkan faktor yang dapat diatribusikan pada aset dan liabilitas ketika menggunakan arus kas diskonto (IAI, 2014)

## Metode yang tersedia untuk mengukur nilai wajar

Bukti terbaik untuk nilai wajar adalah harga yang berlaku di pasar aktif. Jika sumber ini tidak tersedia, maka bukti terbaik berikutnya adalah teknik penilaian yang mengasumsikan pertukaran yang wajar. (Bragg, 2012) Semua teknik penilaian berikut dapat diterima :

1. Transaksi pasar wajar terakhir di antara pihak yang berpengetahuan
2. Nilai wajar sekarang dari instrument lain yang hampir sama secara substansial
3. Analisis arus kas yang didiskontokan
4. Model harga opsi

## Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

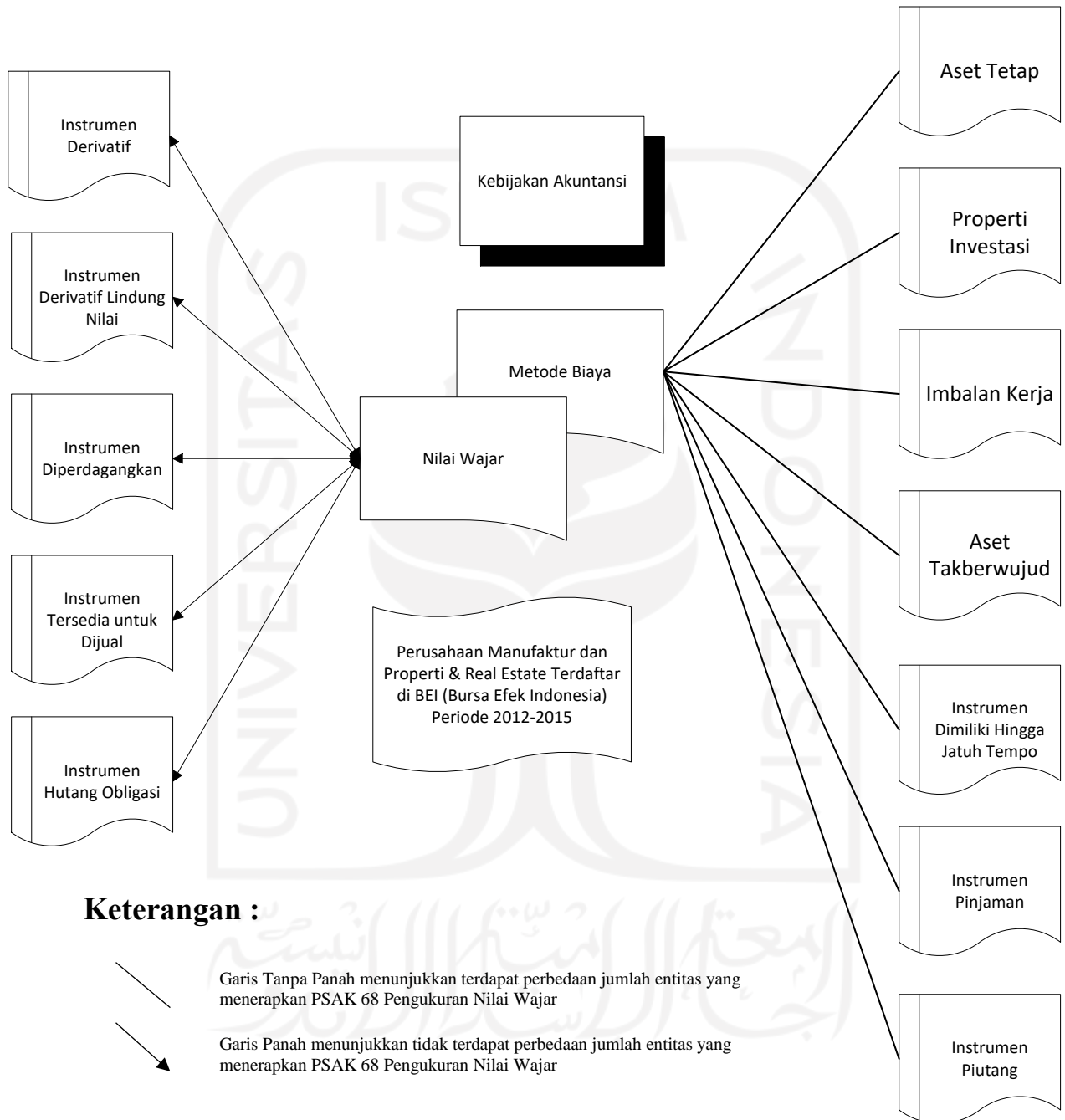
Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif sejak awal periode tahun buku pada periode diterapkannya.

## **2.5 KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN**

Penelitian ini dilandasi teori regulasi (Astika, 2008) dan *positive accounting theory* (PAT) (Watts & Zimmerman, 1990), hal ini dipandang tepat karena informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi diterapkan sesuai dengan standar yang relevan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan standar yang relevan tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang telah berhasil diselesaikan proses konvergensi IFRS tersebut oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), dimana pada 1 Januari 2012 sudah diselesaikan tahap pertama. (IAI, 2014) Kemudian terus melanjutkan proses konvergensi IFRS di tahun 2013 dan 2014, dimana melalui proses tersebut hasilnya semakin meminimalkan perbedaan antara standar akuntansi keuangan di Indonesia dengan IFRS.

Rerangka konseptual yang diuraikan tersebut disajikan dalam Gambar 2.1 berikut ini :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**

## **2.6 PERUMUSAN HIPOTESIS**

Berdasarkan rerangka konseptual tersebut diduga bahwa penerapan PSAK 68 : pengukuran nilai wajar konvergensi IFRS dan dampaknya pada pilihan kebijakan akuntansi di Indonesia diterapkan pada beberapa obyek PSAK, diantaranya PSAK 13 Properti Investasi, PSAK 16 Aset Tetap, PSAK 24 Imbalan Kerja, PSAK 19 Aset Takberwujud, PSAK 55 Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran meliputi Derivatif, Derivatif Lindung Nilai, Diperdagangkan, Tersedia untuk Dijual, Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, Piutang, Pinjaman yang diberikan dan Hutang Obligasi.

### **Teori Regulasi**

Teori ini diambil dari teori regulasi (Astika, 2008). Teori tersebut dijelaskan kembali dalam kerangka penelitian bahwa informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi diterapkan sesuai dengan standar yang relevan salah satunya adalah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar, meliputi Instrumen Keuangan terdiri dari Derivatif : menyatakan bahwa dalam keterikatan kontrak yang diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan, terdapat fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh pergerakan pasar diantaranya suku bunga, nilai tukar, indeks harga dan peringkat kredit, Derivatif Lindung Nilai : di dalam item yang dilindung nilai, terdapat fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh pergerakan pasar untuk menyesuaikan perubahan pasar diantaranya suku bunga dan nilai tukar yang mendasarinya berdasarkan kontrak, Diperdagangkan : berjenis

portofolio sewaktu-waktu bisa dicairkan, dikuasai untuk diperdagangkan dengan tujuan mengambil keuntungan dalam waktu dekat, dimana terdapat fluktuasi harga dipengaruhi oleh aktivitas pasar, Tersedia untuk dijual : berjenis surat berharga dan investasi dalam sekuritas ekuitas dengan prosentase <20%, yang memiliki hak memperjualbelikan dengan harga yang disepakati dimana terdapat fluktuasi harga dipengaruhi oleh aktivitas pasar, Hutang Obligasi : perusahaan menerbitkan obligasi dengan tujuan pembiayaan modal kerja, kemudian obligasi terdaftar di pasar modal dan diperdagangkan untuk diperjualbelikan, dimana harga yang dipengaruhi oleh variabel tersebut adalah suku bunga pasar. Berdasarkan teori diatas maka langkah-langkah dalam merumuskan hipotesis adalah sebagai berikut :

**H1 : Tidak terdapat perbedaan jumlah entitas yang menerapkan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar Instrumen Keuangan Derivatif, Derivatif Lindung Nilai, Diperdagangkan, Tersedia untuk Dijual dan Hutang Obligasi di Indonesia**

#### ***Positive Accounting Theory (PAT)***

Teori ini diambil dari *positive accounting theory* (PAT) (Watts & Zimmerman, 1990). Teori tersebut dijelaskan kembali bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi diterapkan sesuai dengan standar yang relevan salah satunya adalah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar, akan tetapi terdapat informasi yang menyebutkan bahwa entitas dapat memilih opsi metode biaya dan nilai wajar baik pengukuran setelah pengakuan maupun pengakuan dan pengukuran terdiri dari Properti Investasi :

dijelaskan melalui *political cost hypothesis*. Ada perusahaan dalam industri properti yang enggan memilih nilai wajar disebabkan kenaikan pembayaran pajak, Aset Tetap : dijelaskan melalui *political cost hypothesis*. Kepemilikan dari entitas terkait Aset Tetap yang nilai wajarnya dapat diukur dengan andal beralih ke metode biaya disebabkan metode revaluasi menimbulkan biaya tinggi untuk mendatangkan Appraisal serta adanya kenaikan pembayaran pajak, penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Khomsatun, 2016), Imbalan Kerja : dijelaskan melalui *the bonus plan hypothesis* dan *political cost hypothesis*. Aset program yang nilai wajarnya tersedia di pasar aktif dan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang digunakan untuk pendiskontoan obligasi berdasarkan imbalan pasar dari obligasi perusahaan berkualitas tinggi demi mendapatkan bonus untuk mendanai imbalan karyawan maupun ada yang tidak menerapkan nilai wajar disebabkan kenaikan pembayaran pajak serta menimbulkan biaya tinggi untuk mendatangkan Appraisal, Aset takberwujud : dijelaskan melalui *political cost hypothesis*. Entitas lebih memilih menggunakan metode biaya ini disebabkan belum tersedianya kecukupan sumber daya keuangan memadai karena tingginya biaya akuisisi menggunakan jasa penilai atau Appraisal dan adanya kenaikan pembayaran pajak, Instrumen Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo : dijelaskan melalui *debt covenant hypothesis* dan *political cost hypothesis*. Perusahaan melakukan penjualan instrumen tersebut mendekati jatuh tempo sebesar harga yang sudah disepakati, dimana pelaku pasar menentukan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo pada saat terjadi fluktuasi harga yang meningkatkan volatilitas laba untuk dijual guna

memenuhi likuiditas perusahaan maupun untuk investasi jangka panjang hingga mendekati jatuh tempo bertujuan memperoleh imbal hasil dari suku bunga demi memenuhi kewajiban jangka panjang, Instrumen Keuangan Piutang : dijelaskan melalui *political cost hypothesis*. Entitas lebih memilih menggunakan metode biaya untuk instrumen keuangan piutang ini disebabkan belum tersedianya kecukupan sumber daya keuangan yang memadai karena tingginya biaya akuisisi menggunakan jasa penilai atau Appraisal dan adanya kenaikan pembayaran pajak, Instrumen Keuangan Pinjaman : dijelaskan melalui *political cost hypothesis*. Perusahaan menerapkan kos historis (*historical cost*) untuk instrumen keuangan pinjaman dalam mengantisipasi adanya kenaikan biaya bunga dengan mengikuti dan mengevaluasi tren suku bunga pasar disebabkan tingginya hutang perusahaan. Berdasarkan teori diatas maka langkah-langkah dalam merumuskan hipotesis adalah sebagai berikut :

**H2 : Terdapat perbedaan jumlah entitas yang menerapkan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar Properti Investasi, Aset Tetap, Imbalan Kerja, Aset Takberwujud, Instrumen Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, Instrumen Keuangan Piutang dan Instrumen Keuangan Pinjaman di Indonesia**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

##### **3.1.1 Pemilihan Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan dari seluruh Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. Alasan memilih Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate periode 2012-2015 sebagai obyek penelitian yaitu terdapat risiko kredit yang mendorong terjadinya penurunan harga komoditas, kenaikan suku bunga dan depresiasi nilai tukar rupiah, sehingga mengakibatkan tingginya biaya produksi perusahaan dan biaya tenaga kerja. Adanya risiko kredit yang mengakibatkan tingginya biaya produksi perusahaan dan biaya tenaga kerja tersebut perlu diteliti untuk memberikan jawaban atas respon perusahaan ketika menerapkan pengukuran nilai wajar dalam memitigasi gejolak pasar keuangan sebagai dampak dari pelemahan perekonomian secara global.

Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate merupakan perusahaan kategori industri yang didalamnya memuat berbagai macam produk secara beragam dan juga menerapkan diversifikasi produk. Menurut (Kotler & Armstrong 2008) diversifikasi produk ini merupakan strategi mengembangkan produk baru untuk memasuki pasar. Sehingga dengan adanya diversifikasi produk akan

mempengaruhi risiko keuangan yang beragam dalam kontrak. Oleh karena itu dengan adanya kontrak yang dipengaruhi oleh resiko keuangan beragam akan berpeluang muncul adanya lebih banyak pengungkapan instrumen keuangan dan aset maupun liabilitas yang dapat diamati menggunakan nilai wajar atau metode biaya berdasarkan data yang diobservasi.

Alasan berikutnya ada beberapa Perusahaan yang masih minim menerapkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) terutama sektor industri lain seperti Agrikultur, kemudian BUMN dan perusahaan Perbankan. Menurut Deputi Direktur Pengawasan Bank II Bank Indonesia Duddy Iskandar dalam diskusi di Gedung Bank Indonesia, disebabkan adanya beberapa kendala terutama disisi tingginya pembiayaan SDM dan IT yang menjadikan alasan utama peneliti memilih obyek penelitian pada industri tertentu yakni Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate.

Pengambilan sampel yang dilakukan adalah menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria atau syarat-syarat terpenuhi serta data yang diambil berhubungan dengan tujuan penelitian. (Sujarweni, 2016) Kemudian perusahaan yang tidak atau kurang memenuhi kriteria berdasarkan data penelitian dikeluarkan dari sampel. Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate terdaftar di BEI yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap periode 2012-2015

2. Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate diantaranya merupakan perusahaan *Go Public*
3. Sampel penelitian digunakan Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate menggunakan standar IFRS yang telah dikonvergensi ke dalam PSAK pada 1 Januari 2012 pada tahap pertama.
4. Sampel penelitian digunakan Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate menggunakan standar IFRS yang telah dikonvergensi ke dalam PSAK pada 1 Januari 2015 pada tahap kedua.
5. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan masing-masing periode tersebut sudah diaudit dan memiliki keterangan laporan audit
6. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan masing-masing periode tersebut memiliki data lengkap terkait dengan variable penelitian.

### **3.2 Variable Penelitian dan Definisi Operasional Variable**

Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan pengukuran nilai wajar pada kebijakan akuntansi. Variable kategori dari pengukuran nilai wajar merupakan variable yang tepat digunakan dalam penelitian ini, karena variable tersebut berfungsi mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu pada kebijakan akuntansi yang bisa diamati pada data laporan keuangan tahunan. (Riadi, 2016) Objek variable yang akan diteliti dalam kebijakan akuntansi yakni PSAK 16 : Aset

Tetap, PSAK 13 : Properti Investasi, PSAK 19 Aset Takberwujud, PSAK 24 : Imbalan Kerja dan PSAK 55 Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran terdiri dari Derivatif, Derivatif Lindung Nilai, Diperdagangkan, Tersedia untuk Dijual, Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, Piutang, Pinjaman dan Hutang Obligasi.

#### Tahap Pertama Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisa konten dari laporan keuangan tahunan perusahaan untuk menentukan pilihan metode pengukuran. Hasil analisa konten akan diberikan skor penilaian untuk mencatat kebijakan yang digunakan tiap tahun periode diterbitkannya laporan keuangan tahunan. Skor penilaian terdiri dari 0,5 untuk mencatat metode biaya dan 1 untuk mencatat pengukuran nilai wajar. Skor pengukuran pada penilaian tersebut ditentukan dan bersifat absolut, karena untuk mengetahui perbedaan atau variasi antar sekelompok data yang disajikan di laporan keuangan tahunan selama tahun pengamatan. Hal ini bertujuan agar data yang disajikan secara berkelompok dan memiliki perbedaan atau variasi data bisa di uji normalitasnya. Kemudian langkah berikutnya adalah Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji beda yang membandingkan antara metode yang dipilih sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar atau standar baru.

## Tahap Kedua Analisa Data

Tahap berikutnya adalah melakukan analisa konten kemudian mengukur tingkat daya banding dengan menggunakan Indeks Taplin sebagai instrumen penelitian yang dikembangkan oleh (Prof Ross H. Taplin, 2011).

Penelitian ini menguji Daya Banding yang digunakan untuk menginvestigasi masing-masing kebijakan akuntansi sebagai akibat/dampak dari aturan pengukuran nilai wajar. Indeks-T merupakan pendekatan yang mengukur daya banding dengan menilai jumlah perusahaan yang menerapkan dan perusahaan yang tidak menerapkan pengukuran nilai wajar. Perusahaan yang menerapkan kebijakan yang sama akan dianggap mempunyai daya banding karena probabilitas penggunaan metode yang sama. (Prof Ross H. Taplin, 2004) Indeks-T ini melihat sisi kualitatif yang ada pada pilihan kebijakan akuntansi dengan cara melakukan pengamatan variable, apakah menggunakan pengukuran nilai wajar atau metode biaya berdasarkan analisa konten yang dikembangkan oleh (Prof Ross H. Taplin, 2011) dalam menentukan daya banding antar laporan keuangan perusahaan.

(Prof Ross H. Taplin, 2004) mengembangkan indeks untuk mengukur daya banding dalam rangka harmonisasi laporan keuangan. Indeks tersebut kemudian dikembangkan untuk pengukuran daya banding laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang mengkonvergensi IFRS. Hasil pengembangan Indeks Taplin yang membedakan dengan indeks harmonisasi sebelumnya adalah Indeks Taplin dapat

membandingkan laporan keuangan secara internasional. (Prof Ross H. Taplin, 2011) Berikut adalah formula Indeks Taplin :

$$T = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^M \sum_{l=1}^M \alpha_{kl} \beta_{ij} P_{ki} P_{lj}$$

Keterangan :

$\alpha_{kl}$  : Koefisien daya banding antara metode akuntansi k dan l

$\beta_{ij}$  : Pembobotan perbandingan antara perusahaan-perusahaan di perusahaan i dan j

$P_{ki}$  : Proporsi perusahaan-perusahaan di negara i yang menerapkan metode akuntansi k

$P_{lj}$  : Proporsi perusahaan-perusahaan di negara j yang menerapkan metode akuntansi l

N : Menunjukkan jumlah negara yang diobservasi

M : Menunjukkan jumlah pilihan metode akuntansi yang diteliti

Dari formula di atas menunjukkan pembobotan dan proporsi jika mengukur daya banding secara internasional. Menurut (Prof Ross H. Taplin, 2011) Indeks-T melengkapi desain formula untuk menghitung Standard Error (SE) dan signifikan *p-value*.

Analisa konten dalam penelitian ini untuk masing-masing akun meliputi sebelum dan setelah penerapan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar. Hasil analisa konten akan diberikan skor antara 0 s.d. 1 untuk mencatat kebijakan yang digunakan setiap tahunnya.

1. Jika skor 0 perusahaan menerapkan metode pengukuran nilai wajar,

- maka skor 1 untuk perusahaan menerapkan metode biaya
2. Jika skor 1 perusahaan menerapkan metode pengukuran nilai wajar, maka skor 0 untuk perusahaan menerapkan metode biaya
  3. Skor 0.5 perusahaan menerapkan dua metode akuntansi tersebut yakni metode biaya dan metode pengukuran nilai wajar  
(Prof Ross H. Taplin, 2011) & (David Cairns, Dianne Massoudi, 2011)

Langkah berikutnya, melakukan perhitungan daya banding dengan perhitungan Indeks-T. Untuk menginvestigasi tingkat daya banding akun-akun yang diteliti, hasil analisa konten dilakukan penghitungan Indeks-T. Penelitian ini menggunakan Indeks-T yang dikembangkan oleh (Prof Ross H. Taplin, 2004). Indeks Taplin dikembangkan untuk daya banding antar perusahaan dalam satu negara dan dapat juga diterapkan untuk antar negara. Untuk penelitian ini akan digunakan Indeks Taplin yang menganalisa daya banding perusahaan dalam satu negara. Sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan semua kerangka Indeks-T.

Menurut (Khomsatun, 2016) Perhitungan Indeks Taplin untuk satu negara akan dijelaskan dalam tabel 3.1 pada penelitian ini. Misalnya tahun ke 1, dari hasil analisa konten didapatkan hasil yang menerapkan Metode A sebanyak 60 Perusahaan dan Metode B sebanyak 40 Perusahaan (Total 100 Perusahaan). Maka perhitungan Indeks Taplin adalah kuadrat dari prosentase penerapan Metode A ditambah dengan kuadrat dari prosentase Metode B. Sehingga nilai Indeks Taplin

untuk tahun ke 1 adalah sebesar  $(\frac{40}{100})^2 + (\frac{60}{100})^2 = 0.52$ . Nilai 0.52 menunjukkan tingkat probabilitas daya banding antar laporan keuangan sebesar 0.52 yang menunjukkan tingkat daya banding di nilai tengah karena semakin mendekati 1 semakin tinggi daya banding laporan keuangan perusahaan. Sehingga jika dilihat dari tabel 3.1 daya banding tahun ke 2 lebih tinggi dari daya banding tahun ke 1. Daya banding tahun ke 2 menunjukkan angka 1.00 diperoleh dari hasil  $(\frac{100}{100})^2 + 0$  yang menunjukkan daya banding sangat tinggi (tingkat daya banding mutlak) sehingga probabilitasnya adalah 100%. Berikut merupakan contoh tabel 3.1 dibawah ini terkait hasil perhitungan yang dialokasikan dalam bentuk distribusi daya banding laporan keuangan untuk satu negara dan antar periode laporan keuangan perusahaan dilihat dari 2 kategori metode A dan B.

**Tabel 3.1 Contoh Perhitungan Indeks-T untuk Satu Negara**

	Metode A	Metode B	<i>T-Index (National)</i>
Tahun ke 1	60	40	0.52
Tahun ke 2	100	0	1.00

Keterangan : Tabel untuk tahun pertama untuk T-Index sebesar 0.52 artinya tingkat daya banding di nilai tengah.  
Tabel untuk tahun kedua untuk T-Index sebesar 1.00 artinya tingkat daya banding tinggi.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, data primer yang digunakan peneliti yang sudah diolah kemudian diproses lebih lanjut oleh para ahli maupun praktisi atau pihak lain. (Prof. Dr. H.M. Ma'ruf



Abdullah, SH., MM., 2015) Data sekunder dimaksud berupa laporan keuangan tahunan dari Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2015. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) <https://www.idx.co.id/> dan *database* Gallery Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Lantai 3 Sayap Utara Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Data laporan keuangan tahunan dari Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2015 juga sebagian diperoleh dari situs resmi The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) <https://ticmi.co.id/> yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Pasar Modal yang didirikan oleh Self Regulatory Organizations (SRO's) yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, 12190 Senayan, Kebayoran Baru Jakarta, dengan mengajukan surat izin riset penelitian ke dekan fakultas bisnis dan ekonomika Universitas Islam Indonesia ditujukan ke pimpinan Lembaga TICMI dan mendapat persetujuan dari pimpinan dengan surat nomor No.SISR-11401/ICaMEL/11-2020

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu melakukan penelusuran informasi yang terdapat pada data laporan keuangan berdasarkan variable yang diobservasi. Objek variable yang diobservasi yaitu pilihan kebijakan akuntansi. Objek variable yang akan diteliti

dalam pilihan kebijakan akuntansi yakni PSAK 16 : Aset Tetap, PSAK 13 : Properti Investasi, PSAK 19 : Aset Takberwujud, PSAK 24 : Imbalan Kerja dan PSAK 55 Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran terdiri dari Derivatif, Derivatif Lindung Nilai, Diperdagangkan, Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual, Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, Piutang, Pinjaman dan Hutang Obligasi.

Langkah-langkah dalam menentukan objek pada pilihan kebijakan akuntansi yaitu dengan melakukan penelusuran antar objek variable tersebut diatas untuk ditemukan informasi variable yang akan diamati. Variable yang akan diamati yaitu kategori pengukuran nilai wajar, jika informasi tidak ada sebagai data pembanding maka digunakanlah metode biaya. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan analisa konten untuk melihat informasi berdasarkan variable yang muncul. Variable yang muncul nantinya akan di *checklist* dengan menggunakan skor penilaian berdasarkan analisa data tahap pertama dan analisa data tahap kedua. Untuk analisa data tahap pertama diberikan skor 0,5 jika perusahaan menggunakan metode biaya dan 1 menggunakan pengukuran nilai wajar pada Pilihan Kebijakan Akuntansi. (Prof Ross H. Taplin, 2011) Untuk analisa data tahap kedua diberikan skor 0 jika perusahaan menerapkan nilai wajar, skor 1 jika perusahaan menerapkan metode biaya, skor 1 jika perusahaan menerapkan nilai wajar, skor 0 jika perusahaan menerapkan metode biaya dan skor 0.5 jika perusahaan menerapkan metode biaya dan nilai wajar karena menggunakan pengukuran index-T. Informasi tambahan yang digunakan pada penelitian ini untuk hasil pengukuran menggunakan analisa konten dari penerapan pilihan kebijakan

akuntansi akan di cocokkan ke Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi reklasifikasi atas penyajian di Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, untuk mengetahui dampaknya pada pilihan kebijakan akuntansi ketika menerapkan nilai wajar. (Ankarath Nandakumar, Kalpesh J. Mehta, 2012)

### **3.5 Metode Analisis**

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis statistik, yakni uji beda untuk membandingkan terlebih dahulu hasil dari analisa konten, kemudian di kelompokkan menurut objek variable masing-masing ditentukan pada pilihan kebijakan akuntansi yakni PSAK 16 : Aset Tetap, PSAK 13 : Properti Investasi, PSAK 19 : Aset Takberwujud, PSAK 24 : Imbalan Kerja dan PSAK 55 Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran terdiri dari Derivatif, Derivatif Lindung Nilai, Diperdagangkan, Tersedia untuk dijual, Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, Piutang, Pinjaman dan Hutang Obligasi. Pengujian akan difokuskan pada uji t (*Paired Samples t Test*) akan tetapi, apabila data tidak memenuhi uji normalitas maka akan digunakan uji statistik non parametrik (*2 related samples*) (Uji Mc Nemar atau Wilcoxon) untuk menentukan signifikansi apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar. (Khomsatun, 2016) Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program *Software IBM SPSS Statistics 20.0 for Windows*.

Langkah-langkah analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yakni

:

## 1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variable yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji Normalitas Kolmogorov Smirnov. (Sujarweni, 2016) Adapun kriteria pengujian adalah :

$H_a$  : data residual tidak berdistribusi normal

$H_0$  : data residual terdistribusi secara normal

Apabila nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov Test adalah lebih kecil dari 0,05 maka  $H_a$  diterima, sehingga data residual tidak berdistribusi normal, sebaliknya apabila nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov Test adalah lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima, sehingga data residual berdistribusi normal. (Ghazali, 2011)

## 2. Uji Beda

Apabila data sampel bertipe interval atau rasio, serta berdistribusi data normal maka dapat menggunakan uji parametrik dua sampel berhubungan uji *t paired sample t test* (Endrayanto, 2012)

### 1) Uji beda *t paired sample t test*

(Ghazali, 2011) mengungkapkan bahwa uji beda *t paired sample t test* digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Uji beda ini dilakukan dengan membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar

*error* dari perbedaan rata-rata dua sampel yang terdistribusi secara normal.

- 2) Apabila syarat normalitas tidak terpenuhi, maka uji t parametrik dapat diubah dengan menggunakan uji non parametrik. Berikut ini adalah uji non parametrik yang digunakan untuk menggantikan uji beda parametrik :

Uji dua sampel berpasangan *Wilcoxon*

Uji *Wilcoxon* digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berhubungan. Jumlah rank *Wilcoxon* (W) merupakan jumlah dari semua rank yang ada pada sampel lebih kecil (terkecil) setelah melakukan ranking secara keseluruhan. Apabila nilai sampel pertama ( $n_1$ ) < sampel lainnya, nilai W yang diharapkan yaitu  $E(W)$ , dan kesalahan standar (SE) maka rumus standar dapat ditulis sebagai berikut :

$$E(W) = \frac{n_1(n_1+n_2+1)}{2}$$

Nilai statistik  $Z_{hitung}$  :

dan

$$E = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$

$$Z_{hitung} = \frac{W - E(W)}{SE}$$

### Uji dua sampel berpasangan *McNemar*

Uji *McNemar* digunakan untuk menguji keefektifan perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan diterapkan, di mana setiap orang digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri, serta kekuatan pengukurannya adalah skala nominal dan ordinal. (Riadi, 2016) Kriteria dari uji *McNemar* ini untuk kategori skala pengukuran data adalah nominal, ordinal atau binary (Seperti 1 untuk menerapkan dan 0 tidak menerapkan). Uji *McNemar* disajikan dalam bentuk tabel kontingensi (selalu dalam bentuk tabel kontingen 2x2 atau 2 baris dan 2 kolom), sedangkan dalam SPSS input data tetap dalam baris dan kolom. Untuk menguji signifikansi perbedaan pada uji *McNemar*, diawali dengan penyusunan distribusi data berikut :

		Sesudah	
		-	+
Sebelum	+	A	B
	-	C	D

**Tabel 3.2**  
**Kontingensi (2 x 2)**

Untuk mengetahui koefisien *McNemar*, gunakan rumus berikut :

$$\chi^2 = \frac{(|A - D| - 1)^2}{A + D}$$

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas :

- (1) Jika probabilitas > 0.05 maka  $H_0$  diterima
- (2) Jika probabilitas < 0.05 maka  $H_0$  ditolak

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan dari seluruh Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. Untuk perusahaan manufaktur total populasi di dalam penelitian ini adalah 148 perusahaan, sedangkan untuk perusahaan properti & real estate di dalam penelitian ini adalah 61 perusahaan. Jadi total populasi dalam penelitian ini adalah 209 perusahaan x 4 periode laporan keuangan tahunan sehingga berjumlah sebanyak 836 populasi penelitian.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sample berdasarkan kriteria dan syarat tertentu serta data berhubungan dengan tujuan penelitian. Setelah melalui tahap seleksi dalam menentukan sampel, sampel yang diperoleh adalah 139 perusahaan, masing-masing untuk perusahaan manufaktur 108 perusahaan dan properti & real estate 31 perusahaan. Prosedur penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Tabel 4.1**  
**Prosedur Penarikan Sampel Perusahaan Manufaktur dan**  
**Properti & Real Estate terdaftar di Bursa Efek Indonesia**  
**Periode 2012-2015**

No	Keterangan	Tahun 2012-2015
1	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015	148
2	Perusahaan Properti & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015	61
3	Perusahaan mengupload Laporan Keuangan Tahunan di situs resminya, akan tetapi data periode jumlahnya belum lengkap	(63)
4	Perusahaan tidak mengupload Laporan Keuangan Tahunan di situs resminya	(7)
	<b>Jumlah sampel penelitian yang dapat diobservasi</b> (139 Perusahaan x 4 Periode laporan keuangan tahunan)	<b>556</b>

#### 4.2 Analisa Data

Analisa data yang dilakukan pada penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu Uji normalitas. Uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, dan dapat mengidentifikasi Uji hipotesis selanjutnya. Uji hipotesis ini merupakan uji 2 sampel berhubungan yakni menggunakan *T-Paired Sample Test*, jika data sampel terdistribusi secara normal. Sedangkan *Wilcoxon* dan *McNemar Test* ini untuk mengetahui data sampel yang tidak terdistribusi secara normal serta data sampel yang digunakan untuk diuji ini bersifat *free distribution* artinya tidak harus berhubungan.

#### 4.2.1 Uji Normalitas

**Tabel 4.2**  
**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test								
	N	Normal Parameters <sup>a,b</sup>		Most Extreme Differences			Kolmogorov -Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Absolute	Positive	Negative		
Fair Value Previous (PP&E)	139	1.4892	.47954	.314	.314	-.303	3.700	.000
Fair Value (PP&E)	139	1.5540	.48038	.341	.286	-.341	4.025	.000
Fair Value Previous (Intangible Assets)	37	1.0000	.31180	.419	.419	-.365	2.548	.000
Fair Value (Intangible Assets)	43	1.0930	.38197	.433	.433	-.311	2.842	.000
Fair Value Previous (Employee Benefits)	139	1.1079	.30552	.523	.523	-.362	6.165	.000
Fair Value (Employee Benefits)	139	1.1475	.34291	.501	.501	-.334	5.906	.000
Fair Value Previous (Investment Property)	48	1.6875	.51183	.438	.271	-.438	3.032	.000
Fair Value (Investment Property)	53	1.6698	.46969	.400	.241	-.400	2.916	.000
Fair Value Previous (Derivative)	14	1.9286	.26726	.534	.395	-.534	1.998	.001
Fair Value (Derivative)	20	1.8000	.41039	.487	.313	-.487	2.178	.000
Fair Value Previous (Hedging)	5	1.4000	.54772	.367	.367	-.263	.822	.510
Fair Value (Hedging)	4	1.7500	.50000	.441	.309	-.441	.883	.417
Fair Value Previous (Traded)	15	1.7333	.45774	.453	.280	-.453	1.755	.004
Fair Value (Traded)	13	1.7692	.43853	.470	.299	-.470	1.694	.006
Fair Value Previous (AFS)	63	1.4762	.55669	.335	.280	-.335	2.656	.000
Fair Value (AFS)	65	1.5000	.52291	.338	.307	-.338	2.727	.000
Fair Value Previous (HTM)	5	.9000	.22361	.473	.327	-.473	1.057	.214
Fair Value (HTM)	7	.6429	.24398	.435	.435	-.279	1.151	.141
Fair Value Previous (Receivable)	139	1.0216	.14584	.537	.537	-.441	6.334	.000
Fair Value (Receivable)	139	1.0468	.19866	.535	.535	-.407	6.313	.000
Fair Value Previous (Loan)	139	1.0216	.14584	.537	.537	-.441	6.334	.000
Fair Value (Loan)	139	1.0504	.21106	.537	.537	-.406	6.328	.000
Fair Value Previous (Bond)	27	1.4074	.51956	.265	.265	-.243	1.377	.045
Fair Value (Bond)	25	1.6000	.55902	.403	.237	-.403	2.014	.001

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Menurut (Sujarweni, 2016) Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variable yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan *Kolmogorov – Smirnov Test*. Untuk hasil dalam penelitian ini setelah diuji menggunakan uji normalitas *Kolmogorov – Smirnov Test*, kemudian di teliti lebih lanjut masing-masing variable terdapat hasil yang tidak sesuai dengan perhitungan signifikansi  $\alpha$  sebesar 5% yang seharusnya  $0,00 < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal atau  $0.510 > 0.05$  maka data berdistribusi normal.

Hasil yang tidak sesuai dengan perhitungan tersebut disebabkan karena penelitian ini memang tidak melihat dari hasil perhitungan signifikansi atau *p-value* akan tetapi melihat dari sisi model data sample penelitian yang sudah di analisis menggunakan analisa konten. Kemudian setelah diketahui lebih lanjut terdapat banyak variasi data yang tersebar tidak mengikuti jumlah 2 sampel berhubungan pada data laporan keuangan tahunan. Kriteria sampel berdasarkan variable yang tidak sesuai dengan perhitungan signifikansi atau *p-value* yaitu PP&E (Aset Tetap), Imbalan Kerja, Piutang dan Pinjaman yang diberikan yang seharusnya data tidak berdistribusi normal pada akhirnya nanti menggunakan uji hipotesis *Paired Sample T Test*, akan tetapi hasil penelitian ketika diuji menggunakan *Wilcoxon Test* juga sama. Tidak sesuai ini dikarenakan sampel penelitian jumlahnya sama dan memenuhi kriteria untuk diuji menggunakan *Paired Sample T Test*.

Kemudian yang kedua untuk kriteria variable yang tidak sesuai dengan jumlah 2 sample berhubungan akan tetapi ketika diuji menggunakan perhitungan signifikansi atau *p-value* menunjukkan data berdistribusi normal yaitu (*Derivative Hedging*) atau Instrumen Keuangan Derivatif Lindung Nilai dan (*Held to Maturity*) disingkat HTM atau Instrumen Keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Kedua instrumen ini pada akhirnya nanti akan diuji hipotesis menggunakan *McNemar Test* dikarenakan data rata-rata dalam bentuk ordinal atau binary (seperti 1 menerapkan dan 0 tidak menerapkan), sampel kecil dan jumlah sampel tidak sama.

Sisanya untuk objek variable aset takberwujud, properti investasi, instrumen keuangan derivatif, instrumen keuangan diperdagangkan, instrumen keuangan tersedia untuk dijual, dan instrumen keuangan liabilitas keuangan – hutang obligasi menggunakan uji hipotesis *Wilcoxon Test* dan *McNemar Test*, karena setelah di uji menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test* dan hasil uji tersebut menunjukkan data tidak terdistribusi secara normal.

#### 4.2.2 Distribusi Pemilihan Metode Pengukuran

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Pemilihan Metode Pengukuran**

<b>Perusahaan Manufaktur dan Properti &amp; Real Estate Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</b>	<b>Konvergensi IFRS Tahap Pertama</b>		<b>Konvergensi IFRS Tahap Kedua</b>	
	Sebelum Penerapan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar		Setelah Penerapan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar	
	<b>Periode 2012-2013</b>		<b>Periode 2014-2015</b>	
	N	%	N	%
<b><u>PSAK 16 : Aset Tetap</u></b>				
Metode Biaya	194.5	70%	180	65%
Deemed Cost	8.5	3%	8.5	3%
Nilai Wajar/Revaluasi	75.0	27%	89.5	32%
Not Applicable (NA)	0	0%	0	0%
<b>Total Sample (N)</b>	<b>278</b>		<b>278</b>	
<b><u>PSAK 13 : Properti Investasi</u></b>				
Metode Biaya	48	17%	52	19%
Deemed Cost	0	0%	0	0%
Nilai Wajar	43	15%	49	18%
Not Applicable (NA)	187	67%	177	64%
<b>Total Sample (N)</b>	<b>278</b>		<b>278</b>	
<b><u>PSAK 24 : Imbalan Kerja</u></b>				
Metode Biaya	250.5	90%	243.5	88%
Nilai Wajar	27.5	10%	34.5	12%
Not Applicable (NA)	0	0%	0	0%
<b>Total Sample (N)</b>	<b>278</b>		<b>278</b>	
<b><u>PSAK 19 : Aset Takberwujud</u></b>				
Metode Biaya	62	22%	64	23%
Deemed Cost	0	0%	0	0%
Nilai Wajar	6	2%	15	5%
Not Applicable (NA)	210	76%	199	72%
<b>Total Sample (N)</b>	<b>278</b>		<b>278</b>	

## **PSAK 55 : Instrumen Keuangan**

### **Instrumen Keuangan Diukur Nilai**

#### **Wajar Melalui Laba Rugi**

Diperdagangkan - Metode Biaya	0	0%	0	0%
Diperdagangkan - Nilai Wajar	26	9%	23	8%
Not Applicable (NA)	252	91%	255	92%
<b>Total Sample (N)</b>	<b>278</b>		<b>278</b>	

Lindung Nilai - Metode Biaya	0	0%	0	0%
Lindung Nilai - Nilai Wajar	7	3%	7	3%
Not Applicable (NA)	271	97%	271	97%
<b>Total Sample (N)</b>	<b>278</b>		<b>278</b>	

Derivative - Metode Biaya	0	0%	0	0%
Derivative - Nilai Wajar	27	10%	36	13%
Not Applicable (NA)	251	90%	242	87%
<b>Total Sample (N)</b>	<b>278</b>		<b>278</b>	

#### **Instrumen Keuangan Tersedia untuk Dijual**

Metode Biaya	57.5	21%	65	23%
Nilai Wajar	62.5	22%	63	23%
Not Applicable (NA)	158	57%	150	54%
<b>Total Sample (N)</b>	<b>278</b>		<b>278</b>	

#### **Instrumen Keuangan Dimiliki**

##### **Hingga Jatuh Tempo**

Metode Biaya	7	3%	5.5	2%
Nilai Wajar	1	0%	1.5	1%
Not Applicable (NA)	270	97%	271	97%
<b>Total Sample (N)</b>	<b>278</b>		<b>278</b>	

#### **Pinjaman yang Diberikan dan**

##### **Piutang**

Piutang - Metode Biaya	275	99%	271.5	98%
Piutang - Nilai Wajar	3	1%	6.5	2%
Not Applicable (NA)	0	0%	0	0%
<b>Total Sample (N)</b>	<b>278</b>		<b>278</b>	

Pinjaman - Metode Biaya	275	99%	271	97%
Pinjaman - Nilai Wajar	3	1%	7	3%
Not Applicable (NA)	0	0%	0	0%
<b>Total Sample (N)</b>	<b>278</b>		<b>278</b>	
<b><u>Liabilitas Keuangan</u></b>				
Hutang Obligasi - Metode Biaya	16	6%	12	4%
Hutang Obligasi - Nilai Wajar	30	11%	34	12%
Not Applicable (NA)	232	83%	232	83%
<b>Total Sample (N)</b>	<b>278</b>		<b>278</b>	

Untuk laporan keuangan tahunan periode 2012-2013 dan 2014-2015 terdapat data 139 perusahaan yang menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap, imbalan kerja, piutang dan pinjaman yang diberikan. Masing-masing periode 2012, 2013, 2014 dan 2015 semua perusahaan menerapkan metode akuntansi untuk memilih pengukuran metode biaya dan nilai wajar disebabkan perusahaan wajib menerapkan akrual basis dan kelangsungan usaha yang memenuhi asumsi KDPPLK (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan), jika perusahaan tidak menerapkan basis akrual tentu perusahaan akan kesulitan mencetak penghasilan maupun kewajiban yang diselesaikan karena pada dasarnya pihak ketiga, pihak luar maupun *customer* bertransaksi tidak serta merta langsung diselesaikan pada peristiwa itu juga melainkan harus ada perjanjian kontrak yang diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan, jika perusahaan tidak memiliki aset jangka panjang seperti aset tetap dan tenaga kerja maka kecil kemungkinan kegiatan usaha perusahaan akan berlanjut.

Kemudian untuk kebijakan akuntansi aset takberwujud, properti investasi, aset keuangan tersedia untuk dijual, instrumen keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan hutang obligasi masing-masing periode 2012, 2013, 2014 dan 2015 hanya beberapa perusahaan yang memiliki opsi untuk memilih pengukuran metode biaya dan nilai wajar, kecuali kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan diperdagangkan, derivatif dan derivatif lindung nilai yang wajib memilih opsi menggunakan metode pengukuran nilai wajar karena disamping perusahaan wajib menerapkan akrual basis dan kelangsungan usaha dimasa depan, perusahaan juga harus menyediakan informasi yang transparan dan relevan bagi manajemen perusahaan.

#### 4.2.3 Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini secara ringkas akan disajikan dalam tabel berikut ini :



**Tabel 4.4**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

	<b>Konvergensi IFRS Tahap Pertama</b> Sebelum Penerapan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar <b>Periode 2012-2013</b>	<b>SE</b>	<b>Konvergensi IFRS Tahap Kedua</b> Setelah Penerapan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar <b>Periode 2014-2015</b>	<b>SE</b>	<i>p-value</i>
Aset Tetap	0.606	0.47954	0.563	0.48038	0.004
Properti Investasi	0.502	0.51183	0.500	0.46969	0.480
Imbalan Kerja	0.822	0.30552	0.783	0.34291	0.011
Aset Takberwujud	0.839	0.31180	0.692	0.38197	0.021
Diperdagangkan	1.000	0.45774	1.000	0.43853	1.000
Derivatif Lindung Nilai	1.000	0.54772	1.000	0.50000	1.000
Derivatif	1.000	0.26726	1.000	0.41039	1.000
Tersedia untuk Dijual	0.501	0.55669	0.500	0.52291	0.957
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	0.781	0.22361	0.663	0.24398	0.250
Piutang	0.979	0.14584	0.954	0.19866	0.034
Pinjaman	0.979	0.14584	0.951	0.21106	0.032
Hutang Obligasi	0.546	0.51956	0.614	0.55902	0.273

Sumber : *Output SPSS, Data diolah, 2021*

#### 4.2.3.1 Aset Tetap (PP&E)

Aset tetap kategori *Property Plant & Equipment* (PP&E) dalam penelitian ini berupa tanah, bangunan, mesin & peralatan dan aset tetap lainnya. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji beda *Paired Sample Test* terdapat signifikansi *p-value* sebesar  $0,004 < 0,05$  atau  $\alpha$  sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan sampel cukup bukti bahwa terdapat perbedaan jumlah entitas yang menerapkan metode nilai wajar untuk Aset Tetap sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Berdasarkan pengukuran index -T menggunakan table distribusi 4.3 diatas untuk periode 2012-2013 ke dua perusahaan tersebut menerapkan metode biaya sebanyak 194,5 dengan prosentase sebesar 70%, kemudian *deemed cost* sebanyak 8,5 dengan prosentase sebesar 3%, dan terakhir menerapkan metode pengukuran nilai wajar/revaluasi sebanyak 75 dengan prosentase sebesar 27%. Dibandingkan dengan periode 2014-2015 ada yang berbeda ke dua perusahaan tersebut yakni yang menerapkan metode biaya sebanyak 180 dengan prosentase sebesar 65%, kecuali *deemed cost* sama yaitu 8,5 dengan prosentase sebesar 3%, dan terakhir berbeda yang menerapkan metode pengukuran nilai wajar/revaluasi sebanyak 89,5 dengan prosentase sebesar 32%. Dengan melihat tabel distribusi 4.3 diatas tersebut menunjukkan adanya kenaikan jika dilihat dari kedua perusahaan yang menerapkan metode pengukuran nilai wajar sebesar 14,5%, lebih tinggi di tahun 2014-2015 yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 89,5 perusahaan dengan prosentase 32% dibandingkan dengan yang menerapkan di tahun 2012-2013 sebanyak 75 perusahaan dengan prosentase 27%. Akan tetapi jika dilihat dari hasil pengukuran dengan menggunakan index-T terjadi penurunan daya banding 0,043 poin, lebih tinggi daya banding ke dua perusahaan di tahun 2012-2013 sebesar 0,606 dibandingkan daya banding di tahun 2014-2015 sebesar 0,563 disebabkan sebagian besar perusahaan masih menggunakan metode biaya setelah berlaku penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar atau setelah berlaku adopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*).

Hasil perbedaan setelah diuji tersebut disebabkan yang pertama perusahaan menerapkan metode pengukuran nilai wajar revaluasi tersebut karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk merevaluasi aset-aset tertentu perusahaan untuk mendukung proyek-proyek strategis yang dijalankan pemerintah. Pemerintah secara rutin mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang mencakup salah satunya deregulasi dan pemotongan birokrasi, pemberian insentif pajak, pembukaan sejumlah sektor untuk investasi asing, penyederhanaan dan percepatan izin investasi, efektivitas dan efisiensi logistik, kepastian berusaha dan pembangunan infrastruktur.

Aset-aset tertentu perusahaan yang akan direvaluasi tersebut digunakan untuk kegiatan operasional seperti penyediaan lahan di tempat strategis, penambahan fasilitas produksi untuk mendukung kegiatan produksi perusahaan yang sedang berlangsung sampai memproses produk lebih lanjut menggunakan aset tetap yang diukur menggunakan nilai wajar dengan pendekatan harga pasar atau metode biaya pengganti terdepresiasi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk bernilai tambah (*value added product*) atau produk pengganti kemudian dijual sesuai dengan kebutuhan pasar yang merupakan strategi perseroan dalam memitigasi gejolak pasar akibat terjadinya pelemahan perekonomian secara global.

Mengingat telah terjadi normalisasi kebijakan moneter AS yang mendorong melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar US dan dipicu oleh kenaikan suku bunga the Fed (*Federal Reserve*) serta penurunan harga komoditas.

Dalam menentukan nilai wajar, penilai independen tersebut menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan tiga pendekatan, yaitu pendekatan biaya yang menggunakan biaya reproduksi baru atau pengganti baru pada saat tanggal penilaian, pendekatan pendapatan yang mempertimbangkan pendapatan dan biaya berhubungan dengan aset tetap yang dinilai dan mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi serta pendekatan data pasar yang mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau pengganti berdasarkan data informasi pasar terkait.

Aset-aset tertentu perusahaan yang masuk kategori aset tetap dinilai oleh appraisal atau jasa penilai tersebut termasuk proyek strategis yang dikelola oleh perseroan yang sudah siap pakai kemudian digunakan untuk kegiatan operasional yakni menghasilkan suatu produk untuk dijual sesuai dengan kebutuhan pasar dan menghasilkan pendapatan berulang (*recurring income*).

Pasar yang dimaksud berupa pasar domestik, pasar wilayah (*region*) dan pasar luar negeri mana yang sesuai kriteria. Dalam riset ini terdapat penurunan penjualan suatu produk disebabkan oleh meningkatnya kompetensi dengan produsen luar negeri sehingga mempengaruhi laba rugi sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan sejumlah negara mitra dagang utama yang mempengaruhi tingkat permintaan komoditas yang terus mengalami penurunan harga, disamping itu ada juga beberapa perusahaan yang tetap mampu mencatat kenaikan penjualan ekspor ke luar negeri cukup signifikan disebabkan perusahaan mampu mengontrol biaya produksi dengan baik dan mampu menciptakan peluang

usaha dengan menyesuaikan pasar ekspor baru. Beberapa contoh perusahaan yang mewakili sampel dalam penelitian ini berhasil mencatatkan penjualan ekspor ke luar negeri salah satunya adalah PT Semen Indonesia (Persero) kode emiten (SMGR) Tbk bergerak dalam bidang persemenan, mampu memperkuat posisi di pasar regional dan domestik, hal ini disebabkan melakukan akuisisi 70% saham Thang Long Cement Joint Stock Company (TLCC) yang berdomisili di negara Vietnam. Total nilai akuisisi adalah sebesar VND 3.282 Miliar Pada tanggal 19 Desember 2012. Kemudian SMGR mampu mempercepat proses pengendalian pabrik semen TLCC di Vietnam melalui tim *Post Merger Integration* (PMI) untuk beroperasi secara efisien dan mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui berbagai pendekatan dan perubahan sistem operasi yang efisien, tim (PMI) mampu mengatasi kendala budaya dan bahasa. Integrasi sistem SAP yang *go live* pada Juli 2013 turut memberikan kontribusi bagi pengelolaan (TLCC) yang lebih baik dan terintegrasi dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Perbaikan kinerja (TLCC) antara lain ditandai dengan meningkatnya EBITDA margin dari 13% di tahun 2012 menjadi 17% di tahun 2013. Kemudian mampu menurunkan beban bunga dari sebelumnya 481 miliar VND di tahun 2012 menjadi 289 miliar VND di tahun 2013. Kemampuan menurunkan biaya bunga dan kinerja yang terus meningkat mendorong tumbuhnya laba usaha dari 96 miliar VND di tahun 2012 menjadi 104,6 miliar VND di tahun 2013.

Informasi tentang pengukuran nilai wajar untuk aset non-keuangan termasuk aset tetap ini juga menggunakan teknik penilaian Level 3. Untuk kategori teknik

penilaian bisa menggunakan arus kas diskonto, kategori input yang tidak dapat diobservasi yaitu tingkat pertumbuhan laba bersih jangka panjang (*long term net operating income*).

Kemudian ketiga, terdapat penurunan daya banding secara signifikan setelah diukur menggunakan index-T. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa ada sebagian perusahaan tertentu yang menggunakan aset tetap memungkinkan tidak memilih menerapkan metode nilai wajar, dan memiliki kecenderungan untuk menggunakan metode biaya. Temuan riset ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Siregar, 2014) dikutip dari (Watts & Zimmerman, 1990) yang dapat dijelaskan melalui *political cost hypothesis*.

Diketahui bahwa terdapat peraturan pajak yang mengenakan pajak final 10% terhadap selisih revaluasi nilai wajar aset tetap yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2) huruf d. Walaupun pajak tersebut dikenakan terhadap revaluasi aset tetap dan hanya untuk tujuan perpajakan, namun pelaksanaannya diragukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sebagian perusahaan tertentu mungkin lebih memilih menggunakan metode biaya untuk menghindari risiko kenaikan pembayaran pajak.

Untuk penelitian ini sebagian besar perusahaan masih menggunakan metode biaya disebabkan efisiensi, hal ini bisa dijelaskan pada sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini yakni PT Fajar Surya Wisesa Tbk kode emiten (FASW)

bergerak dalam bidang usaha manufaktur kertas, telah melakukan perbaikan unit modifikasi mesin PM7 di tahun 2014. Hasil perbaikan pada mesin tersebut kapasitas produksi meningkat dan tetap menghasilkan produksi kertas dengan standar tinggi yang sebelumnya kegiatan produksi normal sempat terganggu karena harga bahan baku tinggi sehingga belum sempat melakukan perbaikan pada tahun 2012 hingga tahun 2013. Perbaikan unit modifikasi mesin PM7 juga dilakukan untuk menghemat konsumsi energi dan air mengingat adanya peningkatan investasi berupa penambahan mesin PM8 khusus untuk memproduksi *Corrugated Medium Paper* (CMP) yang memiliki teknologi dalam menghasilkan tenaga, uap dan air.

#### 4.2.3.2 Properti Investasi

Properti investasi dalam penelitian ini berupa tanah atau bangunan – atau bagian dari suatu bangunan dan proyek yang dikuasai untuk menghasilkan sewa atau untuk apresiasi modal. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji beda *Wilcoxon Test* terdapat signifikansi *p-value* sebesar  $0,480 > 0,05$  atau  $\alpha$  sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah hipotesis ditolak. Hasil penelitian menunjukkan sampel cukup bukti bahwa tidak ada perbedaan jumlah entitas yang menerapkan metode nilai wajar untuk Properti Investasi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Berdasarkan pengukuran index  $-T$  menggunakan table distribusi 4.3 diatas untuk periode 2012-2013 ke dua perusahaan tersebut menerapkan metode biaya sebanyak 48 dengan prosentase sebesar 17%, kemudian metode pengukuran nilai

wajar/revaluasi sebanyak 43 dengan prosentase sebesar 15%. Dibandingkan dengan periode 2014-2015 ada yang berbeda ke dua perusahaan tersebut yakni yang menerapkan metode biaya sebanyak 52 dengan prosentase sebesar 19%, kemudian metode pengukuran nilai wajar/revaluasi sebanyak 49 dengan prosentase sebesar 18%. Dengan melihat tabel distribusi 4.3 diatas tersebut menunjukkan adanya kenaikan jika dilihat dari kedua perusahaan yang menerapkan metode pengukuran nilai wajar sebesar 6%, lebih tinggi di tahun 2014-2015 yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 49 perusahaan dengan prosentase 18% dibandingkan dengan yang menerapkan di tahun 2012-2013 sebanyak 43 perusahaan dengan prosentase 15%. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan index-T tingkat daya banding berada di nilai tengah atau terjadi kenaikan daya banding relatif sama akan tetapi lebih tinggi di periode 2012-2013 sebesar 0,502 dibandingkan periode 2014-2015 sebesar 0,500 meskipun berbeda sedikit yakni sebesar 0,002 poin. Hasil ini membuktikan bahwa sebagian besar perusahaan mematuhi regulasi pemerintah, perihal diterapkannya metode nilai wajar untuk aset properti investasi sehingga menuntut adanya pihak-pihak berkepentingan seperti dewan penyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia, yang menerapkan metode pengukuran nilai wajar.

Perusahaan menerapkan metode pengukuran nilai wajar revaluasi tersebut karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk merevaluasi aset-aset tertentu perusahaan untuk mendukung proyek-proyek strategis yang dijalankan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang mencakup salah satunya deregulasi dan pemotongan birokrasi, pemberian insentif pajak, pembukaan



sejumlah sektor untuk investasi asing, penyederhanaan dan percepatan izin investasi serta pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah perihal revaluasi, tetap mampu mendorong perusahaan untuk terus memacu meningkatkan pertumbuhan lebih baik mengingat telah terjadi normalisasi kebijakan moneter AS yang mendorong melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar US dan dipicu oleh kenaikan suku bunga the Fed (*Federal Reserve*) serta penurunan harga komoditas.

Di Indonesia juga menghadapi tekanan pada neraca pembayaran sehingga meningkatkan defisit terhadap neraca perdagangan yang menjadi penyebab utama terjadinya kenaikan suku bunga Bank Indonesia menjadi 7,5% memicu kenaikan suku bunga KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Akibatnya terjadi penurunan prosentase pembiayaan kepemilikan properti kepada pengembang yang menjadi penyebab konsumen harus membayar uang muka lebih besar (*loan to value*). Hal ini tidak lain merupakan kebijakan untuk meredam laju inflasi serta defisit fiskal. Belum lagi ada situasi politik yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2014 yang sempat memberikan tekanan lebih lanjut kepada industri properti.

Dalam penelitian ini beberapa perusahaan tetap berhasil mengoptimalkan strateginya dengan menyesuaikan pasar untuk industri properti & real estate di sektor domestik. Strategi perusahaan untuk memitigasi pergolakan pasar yaitu membangun perluasan usaha dengan meningkatkan pengadaan tanah dan lahan di lokasi strategis yang mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah menuju

perkotaan dengan tujuan memudahkan akses yang ramah lingkungan bagi para pelanggan, masyarakat dan juga investor didukung oleh keuangan yang kuat serta persediaan tanah maupun lahan yang baik. Dengan akses yang mendukung dan ramah lingkungan akan ada peluang harga jual mengalami kenaikan cukup signifikan. Kemudian dilanjutkan membangun proyek berupa jenis-jenis properti & real estate dengan konsep desain yang ramah lingkungan dan ditawarkan pada segmen pasar menengah kebawah atau menengah ke atas untuk menghasilkan penjualan dan pendapatan berulang (*recurring income*).

Beberapa contoh perusahaan yang mewakili sampel dalam penelitian ini mampu meningkatkan penjualan dan penghasilan dengan baik ditengah situasi pasar yang sulit yaitu PT Jaya Real Property Tbk dengan kode emiten (JRPT), mampu meluncurkan tiga pengembangan kondominium di Bintaro Jaya untuk memenuhi tingginya permintaan hunian vertikal di pasar menengah ke bawah. Hasilnya mampu menutup tahun dengan pertumbuhan penjualan sebesar 10% dan berhasil mencatatkan peningkatan rata-rata 9% indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2015 berdasarkan survey pelanggan di Bintaro Jaya dan Graha Raya.

Ada lagi, yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk dengan kode emiten (BSDE), proyek yang baru dibangun dan diselesaikan di tahun 2012 termasuk proyek Grand Wisata di Bekasi merupakan hunian di kawasan residensial berhasil meningkatkan pra penjualan dengan prosentase sebesar 54% pada tahun 2015, hal ini dikarenakan perseroan berhasil memperluas pangsa pasar pada segmen pasar menengah ke atas dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan,

lapangan golf dan taman bermain serta berada di lokasi strategis dengan akses menuju kota Jakarta. Kondisi pasar yang positif tercermin dari indeks kepercayaan konsumen pada bulan Oktober 2015 mencapai 99,3 berdasarkan survey Bank Indonesia (BI).

Kemudian strategi berikutnya, perusahaan mencari peluang pasar dengan cara mengakuisisi properti investasi gedung perkantoran, hotel dan area komersial terhadap entitas yang dikendalikan bersama di tempat strategis yang mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah akses menuju perkotaan dan juga tempat wisata, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan berulang (*recurring income*).

Beberapa contoh perusahaan mewakili sampel dalam penelitian ini yang melakukan akuisisi yaitu PT Duta Pertiwi Tbk, kode emiten (DUTI) dengan membeli saham PT Phinisindo Zamrud Nusantara (PZN) dengan kepemilikan sebesar 50%, sebanyak 88 lembar saham dengan harga pembelian sebesar Rp 88.000.000 pada 27 Februari 2014. Transaksi ini meningkatkan kepemilikan efektif Perusahaan pada PZN dari 50% menjadi 54,97%. Pada tanggal akuisisi, kepemilikan Perusahaan sebesar 54,97% pada PZN telah dinilai kembali menggunakan nilai wajar, dan keuntungan yang timbul atas penilaian kembali tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Pada 25 Juni 2014 Perusahaan mengakuisisi 399 lembar saham PZN, sehingga kepemilikan efektif Perusahaan pada PZN meningkat dari 54,97% menjadi 77,48% dan Perusahaan memperoleh pengendalian atas PZN sehingga Perusahaan mengkonsolidasikan laporan

keuangan entitas anak tersebut sejak Juni 2014. Keuntungan yang timbul atas akuisisi PZN tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2014, sehingga pendapatan sewa dari proyek gedung perkantoran dan bangunan strata title juga ikut membukukan peningkatan sebesar 24,05% di tahun 2014.

Dalam menentukan nilai wajar, jasa penilai tersebut mengkombinasikan pendekatan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*) atas pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan biaya (*cost approach*) untuk Bangunan dan Prasarana, input yang tidak dapat diobservasi yaitu tingkat pertumbuhan laba bersih jangka panjang (*long term net operating income*). Kemudian metode pendekatan perbandingan data pasar (*market data approach*) untuk nilai wajar tanah, input yang tidak dapat diobservasi yaitu estimasi harga jual per meter persegi (*estimated selling price per square meters*). Informasi tentang pengukuran nilai wajar untuk aset non-keuangan diatas termasuk hierarki Level 3.

Terjadinya peningkatan daya banding pada pilihan kebijakan akuntansi perusahaan yang menerapkan metode nilai wajar ini yang pertama, sebagian besar perusahaan dalam penelitian ini untuk kategori properti investasi proyek pembangunan yang masih dalam proses hingga sampai ke tahap penyelesaian nilai wajar bisa diukur dengan andal oleh jasa penilai. Hal ini dikarenakan proyek pembangunan yang masih dalam perencanaan pembangunan dan dalam proses pembangunan mengacu pada proyek sebelumnya yang sudah tahap 100% selesai dan beroperasi, sehingga perusahaan dapat menentukan lokasi yang strategis untuk

membangun proyek tahap kedua untuk meningkatkan segmen pasar baru. Selain itu meskipun porsi hutang perusahaan tinggi, tetap mampu menunjukkan kemampuan perseroan dalam membayar hutang yang dimiliki, hal ini bisa dilihat pada rasio likuiditas tercatat sebesar 351,63% untuk perusahaan PT Greenwood Sejahtera Tbk mampu memenuhi kewajiban dalam jangka pendek, sementara rasio liabilitas terhadap aset dan liabilitas terhadap ekuitas masing-masing 7,88% dan 8,56% pada tahun 2015. Untuk rasio liabilitas terhadap ekuitas pada perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk juga menunjukkan penurunan menjadi 0,28 kali di tahun 2012 dibanding 2011 sebesar 0,46 kali, hal ini karena perseroan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari penjualan sebesar 76,5%. Atas dasar itu beberapa perusahaan bersedia memilih metode nilai wajar pada pilihan kebijakan akuntansi. Temuan riset ini mendukung gagasan yang dilakukan oleh (Watts & Zimmerman, 1990) yang menjelaskan bahwa Manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dapat berpengaruh positif terhadap kompensasinya (*bonus hypothesis*) dan menghindari pelanggaran persyaratan utang (*debt covenant hypothesis*). Sementara itu penelitian yang lain dilakukan oleh (Siregar, 2014) menunjukkan berbeda yang menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat utang maka perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih konservatif, sehingga perusahaan memiliki kecenderungan untuk memilih metode biaya sebagai perlindungan terhadap kreditor.

Kemudian yang kedua, alasan beberapa perusahaan memilih pilihan kebijakan akuntansi antara metode biaya dan nilai wajar ini disebabkan perusahaan

hanya mengakui selisih nilai wajar pada laba rugi periode berjalan untuk menghindari dari peraturan regulasi pemerintah yang berpotensi merugikan perusahaan.

Diketahui bahwa terdapat peraturan pajak yang mengenakan pajak final 10% terhadap selisih revaluasi nilai wajar properti investasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2) huruf d.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sebagian perusahaan tertentu mungkin lebih memilih menggunakan metode biaya untuk menghindari risiko yang menyebabkan kenaikan pembayaran pajak. Penyebab kedua yang menjadi alasan perusahaan sebagian besar menggunakan metode biaya ini disebabkan perusahaan memperkuat posisi *cash flow* perseroan dalam menghadapi ketidakpastian arus kas masa depan dengan mempertahankan sediaan lahan siap bangun untuk dijual.

Seperti yang dilakukan oleh PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk kode emiten (GMTD) bergerak dalam bidang pengembangan real estat dan properti yang mewakili sampel penelitian ini, perusahaan meningkatkan lahan siap bangun dengan menawarkan *product mix* sesuai tren kebutuhan pasar untuk dijual. Strategi ini dapat mempertahankan pertumbuhan dalam kondisi perekonomian yang kurang kondusif selama tahun 2014. Dengan hasil ini, selama tahun 2014 perusahaan berhasil membukukan peningkatan laba bersih sebesar 30,6%, dengan mencatatkan

laba bersih sebesar Rp 120 miliar, dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 91,8 miliar.

#### 4.2.3.3 Imbalan Kerja

Imbalan kerja dalam penelitian ini termasuk liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Program tersebut termasuk Program Pensiun Imbalan Pasti, Imbalan Pasca Kerja Lainnya berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, Imbalan Pasca Kerja Lainnya untuk Direksi dan Komisaris berdasarkan Peraturan Perusahaan tentang Direksi dan Dewan Komisaris, dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji beda *Paired Sample Test* terdapat signifikansi *p-value* sebesar  $0,011 < 0,05$  atau  $\alpha$  sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan sampel cukup bukti bahwa ada perbedaan jumlah entitas yang menerapkan metode nilai wajar untuk Imbalan Kerja sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Berdasarkan pengukuran index  $-T$  menggunakan table distribusi 4.3 diatas untuk periode 2012-2013 ke dua perusahaan tersebut menerapkan metode biaya sebanyak 250,5 dengan prosentase sebesar 90%, kemudian metode pengukuran nilai wajar sebanyak 27,5 dengan prosentase sebesar 10%. Dibandingkan dengan periode 2014-2015 ada yang berbeda ke dua perusahaan tersebut yakni yang menerapkan metode biaya sebanyak 243,5 dengan prosentase sebesar 88%, kemudian metode pengukuran nilai wajar sebanyak 34,5 dengan prosentase sebesar

12%. Dengan melihat tabel distribusi 4.3 diatas tersebut menunjukkan adanya kenaikan jika dilihat dari kedua perusahaan yang menerapkan metode pengukuran nilai wajar sebesar 7%, lebih tinggi di tahun 2014-2015 yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 34,5 perusahaan dengan prosentase 12% dibandingkan dengan yang menerapkan di tahun 2012-2013 sebanyak 27,5 perusahaan dengan prosentase 10%. Akan tetapi berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan index-T terjadi penurunan daya banding cukup signifikan sebesar 0,039 poin lebih tinggi di periode 2012-2013 sebesar 0,822 dibandingkan periode 2014-2015 sebesar 0,783. Hasil ini membuktikan bahwa sebagian besar perusahaan masih menggunakan metode biaya setelah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar atau setelah berlaku adopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*).

Beberapa perusahaan menerapkan metode nilai wajar imbalan kerja tersebut karena merupakan bagian dari strategi perseroan untuk tetap bisa mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan dari imbalan yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan atau tenaga kerja melalui pertumbuhan investasi yang ditanamkan. Pertumbuhan investasi yang ditanamkan ini meliputi instrumen keuangan pada aset program dan hak pengganti.

Dalam penelitian ini hak pengganti perusahaan akan menggantikan sebagian atau seluruh dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas tunjangan pasti melalui perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia merupakan perusahaan yang didaftarkan sejak tahun 2005 oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk kode emiten (TPIA) bergerak dalam bidang usaha industri



petrokimia, sebagai asuransi jiwa bagi karyawannya. (Bragg, 2012) Pada tahun 2013 Hak penggantian (*Reimbursement Right*) terdiri atas investasi dengan nilai wajarnya sebesar US\$ 937 ribu, terdiri dari 40% ditempatkan pada pasar uang, 20% ditempatkan pada efek ekuitas dan 40% ditempatkan pada pendapatan tetap yang hasilnya disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya. Hasil dari hak pengganti dapat berupa imbal hasil berupa pendapatan bunga dan dividen yang nantinya digunakan untuk mendanai imbalan kerja karyawan atau membayar gaji karyawan. Kemudian untuk aset program PT Astra International Tbk (ASII) mewakili sampel penelitian ini mencakup investasi di saham dan obligasi perseroan, beberapa entitas anak dan pengendalian bersama entitas, dengan nilai wajar sejumlah Rp 286 miliar pada tahun 2012 lebih tinggi dibanding periode 2011 sebesar Rp 277 miliar. Tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi dengan bunga tetap didasarkan pada pengembalian bruto di akhir pelaporan. Sedangkan tingkat pengembalian diharapkan dari investasi ekuitas menggambarkan tingkat pengembalian pasar yang bersangkutan.

Terjadinya tingkat pengembalian yang diharapkan untuk memperoleh imbal hasil ini disebabkan yang pertama untuk hak pengganti (*reimbursement right*) pada perusahaan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) terutama pada instrumen pasar uang maupun pendapatan tetap disebabkan adanya pelanggaran kebijakan moneter dan kebijakan stimulus fiskal di negara maju termasuk Amerika Serikat. Program ini dinamakan QE3 (*Quantitative Easing*) pada September 2012 dengan melakukan pembelian *Mortgage-Backed Securities* (MBS) sebesar US\$ 40 miliar

per bulan sampai dengan pasar tenaga kerja membaik. Pada bulan Desember 2012, The Fed mengumumkan adanya tambahan pembelian *United State Treasury* (UST) *Bond* sebesar US\$ 45 miliar. Kebijakan tersebut selain meredakan tekanan likuiditas juga meningkatkan kepercayaan pelaku pasar serta menurunkan tingkat risiko. (BI, 2013)

Untuk aset program PT Astra International Tbk (ASII) tingkat imbal hasil sebesar 10% per tahun disebabkan adanya peningkatan kinerja pasar keuangan global terutama didukung oleh pertumbuhan harga aset di negara-negara berkembang. Kinerja positif pasar keuangan negara-negara berkembang sejalan dengan fundamental ekonomi yang lebih solid. Hal ini tidak lepas dari kebijakan QE (*quantitative easing*) yang menjadi faktor pendorong cukup signifikan bagi aliran modal ke negara-negara *emerging market*. Solidnya pasar keuangan global dan meningkatnya toleransi terhadap tingkat risiko ini mendorong investor membeli aset-aset keuangan negara-negara *emerging market*. (BI, 2012)

Kebijakan strategis tersebut diambil dengan tujuan untuk meminimalisir risiko fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap Dollar USD yang meningkatkan biaya bahan baku dan memberikan tekanan pada *cashflow* perusahaan serta meningkatnya biaya tenaga kerja cukup signifikan. Sebagai informasi untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) pada kisaran rata-rata mencapai diatas 19,25% di Indonesia pada tahun 2012.

Kemudian yang kedua sebagian besar perusahaan masih menggunakan metode biaya setelah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar atau setelah

berlaku adopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Hal ini disebabkan adanya peningkatan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebesar 175 basis poin menjadi 7,5% pada tahun 2013 kembali dinaikkan 7,75% pada akhir tahun 2014 dengan tujuan menekan laju inflasi serta defisit fiskal yang mendorong naiknya suku bunga investasi pada surat-surat berharga berpendapatan tetap sehingga perusahaan beralih menggunakan kos historis (*historical cost*) untuk membayar imbalan kerja karyawan melalui aset program.

Sedangkan pada perekonomian global suku bunga masih rendah di negara-negara maju termasuk Amerika Serikat akibat terjadinya cuaca ekstrim (*big freeze*) yang membekukan sebagian aktivitas perekonomian AS pada triwulan I 2014. (BI, 2014) Kemudian awal s.d pertengahan tahun 2015, terjadi indikasi perilaku *front loading* yakni pembelian properti dan memasarkannya sebelum terjadinya kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed pada Desember 2015, yang artinya perusahaan kurang mendukung untuk berinvestasi surat-surat berharga aset program karena belum bisa menyesuaikan pasar disebabkan suku bunga masih rendah. (BI, 2015)

#### 4.2.3.4 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud dalam penelitian ini termasuk Merek dan Lisensi, Hubungan dengan Konsumen, Merek Dagang, Hak Paten dan *Software*. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji beda *Wilcoxon Test* terdapat signifikansi *p-value* sebesar  $0,021 < 0,05$  atau  $\alpha$  sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan sampel cukup bukti bahwa

ada perbedaan jumlah entitas yang menerapkan metode nilai wajar untuk Aset Takberwujud sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Berdasarkan pengukuran index –T menggunakan table distribusi 4.3 diatas untuk periode 2012-2013 ke dua perusahaan tersebut menerapkan metode biaya sebanyak 62 dengan prosentase sebesar 22%, kemudian metode pengukuran nilai wajar sebanyak 6 dengan prosentase sebesar 2%. Dibandingkan dengan periode 2014-2015 ada yang berbeda ke dua perusahaan tersebut yakni yang menerapkan metode biaya sebanyak 64 dengan prosentase sebesar 23%, kemudian metode pengukuran nilai wajar sebanyak 15 dengan prosentase sebesar 5%. Dengan melihat tabel distribusi 4.3 menunjukkan adanya kenaikan jika dilihat dari kedua perusahaan yang menerapkan metode pengukuran nilai wajar sebesar 9%, lebih tinggi di tahun 2014-2015 yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 15 perusahaan dengan prosentase 5% dibandingkan dengan yang menerapkan di tahun 2012-2013 sebanyak 6 perusahaan dengan prosentase 2%. Akan tetapi jika dilihat dari hasil pengukuran dengan menggunakan Index-T terjadi penurunan daya banding cukup signifikan sebesar 0,417 poin lebih tinggi di periode 2012-2013 sebesar 0,839 dibandingkan periode 2014-2015 sebesar 0,692. Hasil ini membuktikan bahwa ada perubahan kebijakan perusahaan yaitu menerapkan metode nilai wajar meskipun sebagian besar lebih banyak menggunakan metode biaya setelah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar atau setelah berlaku adopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Hal ini berbeda dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Khomsatun, 2016) dan (David Cairns,

Dianne Massoudi, 2011) yang menyebutkan bahwa tidak ada perubahan jumlah perusahaan dalam pengukuran Aset Takberwujud di Indonesia, UK dan Australia. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengukuran daya banding Index-T sebesar 1 yang menunjukkan tingkat daya banding tinggi yang artinya sebagian besar perusahaan menerapkan metode biaya dibandingkan nilai wajar disebabkan sulitnya menentukan keandalan nilai wajar dari Aset Takberwujud.

Untuk Penelitian ini beberapa perusahaan menerapkan metode pengukuran nilai wajar revaluasi tersebut karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk merevaluasi aset-aset tertentu perusahaan untuk mendukung proyek-proyek strategis yang dijalankan pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang terus meningkat dalam 5 tahun ke depan. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang mencakup salah satunya deregulasi dan pemotongan birokrasi, pemberian insentif pajak, pembukaan sejumlah sektor untuk investasi asing, penyederhanaan dan percepatan izin investasi serta pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut diterapkan seperti longgarnya persyaratan kredit, penurunan suku bunga dan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini bertujuan agar perekonomian kembali membaik mengingat telah terjadi normalisasi kebijakan moneter AS yang mendorong melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar US dan dipicu oleh kenaikan suku bunga the Fed (*Federal Reserve*) serta penurunan harga komoditas.

Kemudian di sektor domestik juga menghadapi tekanan pada neraca pembayaran sehingga meningkatkan defisit terhadap neraca perdagangan yang menjadi penyebab utama terjadinya kenaikan suku bunga Bank Indonesia menjadi 7,5% memicu kenaikan suku bunga KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang bertujuan untuk meredam laju inflasi serta defisit fiskal.

Perusahaan tetap mampu mendorong pertumbuhan kinerjanya dengan meningkatkan pangsa pasar ditengah situasi perekonomian yang sulit. Strategi yang dijalankan perusahaan diantaranya diversifikasi produk dengan mengoptimalkan aset takberwujud seperti merek, lisensi dan hubungan dengan konsumen, dengan tujuan meningkatkan modal perusahaan melalui penghasilan berulang (*recurring income*).

Berikut ini merupakan contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini tetap mampu mendorong pertumbuhan kinerjanya dengan meningkatkan pangsa pasar baru ditengah perekonomian cukup sulit yakni PT Sierad Produce Tbk kode emiten (SIPD) bergerak dalam bidang peternakan unggas yang hasil akhirnya diolah dalam bentuk bahan baku kemudian diproduksi menjadi makanan bergizi, mampu memperbesar lini bisnis makanan olahan dengan mengakuisisi 66,99% saham termasuk Merek, Hak Paten dan Hubungan dengan konsumen PT Belfoods Indonesia, sebuah industri pengolahan makanan beku. Nilai akuisisi tersebut mencapai Rp 59,68 miliar. Sierad Produce berkiprah di bisnis makanan setelah mencermati potensi pasar produk olahan ayam di Indonesia. Organisasi Pangan Dunia (FAO) mencatat, konsumsi daging ayam di Indonesia baru tercatat 8 kg – 10

kg per kapita per tahun. Bisnis makanan olahan tersebut dipercaya membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi, kesehatan dan daya berfikir masyarakat Indonesia.

Indonesia, yang memiliki populasi terbesar ke 4 dunia dengan cepat menciptakan kelas menengah yang terus tumbuh. Faktor demografi yang menguntungkan ini menunjukkan bahwa konsumen Indonesia akan memiliki penghasilan lebih, sehingga akan meningkatkan konsumsi daging ayam per kapita. Dengan hasil kinerja tersebut Perusahaan mampu berkontribusi terhadap penjualan berasal dari rumah potong ayam, makanan olahan dan gerai ritel sebesar 14,21%. Namun kinerja pada periode 2015 dari segi penjualan mengalami penurunan dikarenakan beban usaha mengalami kenaikan sebesar 24,86% disebabkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar mencapai Rp 13.795 per Dollar USD memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap tingginya biaya produksi Perseroan, kerap melakukan impor bahan baku. Selain itu faktor makroekonomi lain juga berpengaruh langsung terhadap penurunan volume penjualan Perseroan yaitu melemahnya daya beli masyarakat.

Strategi untuk menjaga keberlangsungan usaha Perseroan di tengah persaingan semakin ketat yakni memfokuskan diri pada pengembangan industri hilir. Memperkuat divisi makanan olahan Perseroan, dibawah naungan anak usaha Perseroan, yaitu PT Belfoods Indonesia. Dengan mempertimbangkan populasi penduduk Indonesia yang besar dimana mayoritas berada pada usia produktif

mebutuhkan asupan gizi yang baik sebagai target konsumen utama serta ditunjang dengan perkembangan dunia *e-Commerce* yang sangat pesat dan gaya hidup masyarakat yang cenderung serba cepat dan praktis.

Nilai wajar Aset Takberwujud berhubungan dengan akuisisi tersebut dinilai oleh penilai independen atau jasa penilai (*Appraisal*) yang diterbitkan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Professional). Biaya berhubungan dengan jasa penilai terkait akuisisi dibebankan langsung di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai pos biaya umum dan administrasi tahun berjalan.

Kemudian yang kedua alasan sebagian besar perusahaan lebih banyak menggunakan metode biaya setelah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar atau setelah berlaku adopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) untuk aset takberwujud disebabkan karena adanya kenaikan pembayaran pajak. Temuan riset ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Siregar, 2014) dikutip dari (Watts & Zimmerman, 1990) yang dapat dijelaskan melalui *political cost hypothesis*.

Diketahui bahwa terdapat peraturan pajak yang mengenakan pajak final 10% terhadap selisih revaluasi nilai wajar aset takberwujud yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2) huruf d. Perusahaan lebih memilih metode biaya sebagai perlindungan terhadap kreditur disebabkan tingginya utang perusahaan sehingga perusahaan cenderung menerapkan kebijakan akuntansi yang



lebih konservatif. Menurut (Muqodim, 2005) Prinsip ini mensyaratkan bahwa perlunya mengantisipasi kerugian yang akan muncul daripada keuntungan.

Selain itu alasan sebagian besar perusahaan memilih metode biaya disebabkan yang pertama adalah adanya risiko terjadinya kenaikan biaya produksi dan dikhawatirkan belum mampu menjaga efisiensi. Oleh karena itu dalam penelitian ini beberapa perusahaan yang mewakili sampel seperti PT Kalbe Farma Tbk kode emiten (KLBF), merespon berbagai strategi dengan cara mempertahankan keunggulannya pada bidang aktivitas penelitian dan pengembangan. Melalui pusat-pusat penelitiannya, Kalbe aktif terlibat dalam kegiatan riset mutakhir di bidang (*drug delivery system*) dan obat kanker, serta riset di bidang sel punca, pengujian genomik dan bioteknologi, kemudian hasil dari riset tersebut akan dilakukan komersialisasi pengembangan terapi regeneratif. Hasil dari target realisasi, Perseroan berhasil meningkatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 7,6%.

Kemudian alasan lainnya adalah pada penghematan biaya, dalam penelitian ini bisa dijelaskan perusahaan yang mewakili sampel yaitu PT Fajar Surya Wisesa Tbk kode emiten (FASW) bergerak dalam bidang usaha manufaktur kertas, lebih memilih mengaplikasikan sistem komputer secara penuh dengan implementasi SAP yang terintegrasi dibandingkan melakukan akuisisi perusahaan yang memiliki pangsa pasar cukup baik. Implementasi SAP yang terintegrasi ini cukup penting bagi Perseroan karena dapat meningkatkan penanganan dan efisiensi produksi Perseroan, sehingga hasil dari target realisasi, Perseroan berhasil menaikkan hasil

penjualan sebesar 10%. Naiknya hasil penjualan disebabkan peningkatan harga dan kenaikan volume penjualan di dalam negeri hingga 4%.

#### 4.2.3.5 Instrumen Keuangan Diperdagangkan

Kategori investasi jangka pendek dalam bentuk efek diperdagangkan ini merupakan pasar uang subsektor dari pasar sekuritas berpendapatan tetap dan biasanya memiliki nilai nominal besar. Jenis instrumen dalam penelitian ini termasuk Surat Utang Negara, dan *Treasury Bills*. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji beda *McNemar Test* terdapat signifikansi *p-value* sebesar  $1,000 > 0,05$  atau  $\alpha$  sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan sampel cukup bukti bahwa tidak ada perbedaan jumlah entitas yang menerapkan metode nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Diperdagangkan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Berdasarkan pengukuran index  $-T$  menggunakan table distribusi 4.3 diatas untuk periode 2012-2013 terdapat 26 dari 278 sampel perusahaan yang memiliki instrumen keuangan diperdagangkan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sementara untuk periode 2014-2015 terdapat 23 dari 278 sampel perusahaan yang memiliki instrumen keuangan diperdagangkan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sisanya untuk periode 2012-2013 dan 2014-2015 masing-masing terdapat 252 dan 255 perusahaan keluar dari sampel, sehingga tidak ada kenaikan dan penurunan penerapan metode akuntansi karena hanya menerapkan metode nilai

wajar dan tidak ada yang menerapkan metode biaya. Perusahaan menerapkan instrumen keuangan diperdagangkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan aktif berulang, untuk tujuan memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek yang bisa terpantau oleh pasar untuk memberikan penilaian kepada perusahaan maupun investor.

Data sampel dalam penelitian ini bisa diketahui bahwa hanya beberapa perusahaan yang menerapkan instrumen keuangan diperdagangkan, hal ini disebabkan perusahaan dalam sampel memiliki bidang usaha yang beragam disesuaikan dengan strategi bisnis dimulai dengan diversifikasi produk. Dengan diversifikasi produk, suatu perusahaan tidak akan bergantung pada satu jenis produk saja, melainkan juga dapat mengandalkan jenis produk lainnya untuk meningkatkan penghasilan berulang, sehingga perusahaan harus tumbuh jika tetap ingin bersaing secara efektif. (Kotler & Armstrong, 2008)

Mengingat telah terjadi normalisasi kebijakan moneter AS yang mendorong melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar US dan dipicu oleh kenaikan suku bunga the Fed (*Federal Reserve*) serta penurunan harga komoditas.

Oleh karena itu yang dibahas disini adalah perusahaan membutuhkan struktur modal yang cukup besar terkait diversifikasi produk sehingga modal perusahaan tidak hanya didanai dengan kepemilikan perusahaan dan imbal hasil saja akan tetapi didanai dengan liabilitas salah satunya adalah hutang jangka panjang termasuk hutang obligasi. Kemudian fungsi aset keuangan diperdagangkan ini digunakan untuk melunasi hutang obligasi secara bertahap dari imbal hasil berupa keuntungan

investasi jangka pendek maupun dana yang sudah dikelola oleh manajer investasi kemudian dicairkan.

Beberapa sampel perusahaan yang mewakili dalam penelitian ini mampu melunasi hutang obligasi secara bertahap dengan memanfaatkan imbal hasil berupa keuntungan investasi jangka pendek maupun dana yang sudah dikelola oleh manajer investasi untuk dicairkan yakni PT Alam Sutera Realty Tbk dengan kode emiten (ASRI) bergerak dalam bidang industri Properti Real Estate terdiri dari proyek Kawasan Alam Sutera di Serpong dan proyek Suvarna Padi dan Suvarna Sutera di Pasar Kemis, Tangerang.

PT Alam Sutera Realty Tbk memanfaatkan surat utang jangka pendek pemerintah AS yang dinamakan *Treasury Bills* atau *T-bills* dengan jangka waktu 6 bulan yang jatuh tempo sampai dengan Januari 2014, Yield pada saat jatuh tempo untuk periode 2012, 2013 masing-masing 0,114% dan 0,041% digunakan untuk melunasi bunga yang dibayarkan setiap 6 bulan hutang obligasi dan membayar kembali surat hutangnya pada atau setelah 27 Maret 2015 baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini berkaitan dengan persyaratan dalam perjanjian Surat Hutang Senior entitas anak Alam Sutera International Pte Ltd (ASI) dengan penerbitan obligasi sebesar USD 150.000.000 pada tanggal 27 Maret 2012 bertenor 5 tahun dan jatuh tempo 27 Maret 2017. Hasil penerbitan obligasi ini akan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan usaha Perusahaan melalui pembelian tanah dan atau pembangunan.

Yield pada saat jatuh tempo untuk periode 2012, 2013 masing-masing sebesar 0,114% dan 0,041% dihasilkan dari data pasar seperti situasi dan kondisi dinamika perekonomian global. Situasi dan kondisi pasar pada perekonomian global yakni kebijakan QE (*Quantitative Easing*) yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat *The Federal Reserve* (Fed) untuk memompa uang guna merangsang tumbuhnya perekonomian AS dengan cara membeli aset keuangan jangka panjang seperti *Mortgage-Backed Securities* (MBS), *bank debt*, dan *United State Treasury* (UST) *Bond*. Sampai September 2012, The Fed telah menempuh kebijakan *Quantitative Easing 3* atau (QE3) dengan membeli MBS sebesar USD 40 Miliar per bulan sampai dengan pasar tenaga kerja membaik. Pada bulan Desember 2012, The Fed mengumumkan penambahan jumlah QE3 menjadi sebesar USD 85 Miliar per bulan dengan tambahan pembelian UST Bond sebesar USD 45 Miliar. (BI, 2013) Tujuan dari kebijakan QE adalah memperbaiki perekonomian AS yang dilanda resesi sejak tahun 2009. (Asnil Amri, 2013)

Kemudian beberapa contoh perusahaan sampel yang mewakili penelitian ini juga mampu mencetak keuntungan dari investasi jangka pendek pada instrumen keuangan diperdagangkan yakni PT Tempo Scan Pacific Tbk kode emiten (TSPC) bergerak dalam bidang usaha farmasi. PT Tempo Scan Pacific Tbk memanfaatkan investasi jangka pendek dalam bentuk Surat Utang Negara *Fixed Rate* (SUN FR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menaikkan nilai pasar investasi jangka pendek yang disajikan pada pendapatan komprehensif lain di laporan laba rugi dengan pos perubahan laba yang belum direalisasi untuk periode 2014.

Terjadinya laba belum direalisasi atas kenaikan nilai pasar investasi jangka pendek ini dihasilkan dari data pasar keuangan global.

Data pasar keuangan global menjelaskan bahwa Pemerintah AS melakukan langkah pengurangan stimulus ekonomi (*tapering off*) sejak triwulan I 2013 sampai dengan triwulan II 2013 seiring dengan tren perbaikan perekonomian AS. Pengurangan stimulus ekonomi (*tapering off*) dilakukan dengan cara mengurangi pembelian aset keuangan jangka panjang termasuk obligasi. Stimulus perekonomian yang dilakukan pemerintah AS mulai menunjukkan hasil, yang tercermin pada perbaikan variable makroekonomi AS. Hasilnya mampu menurunkan tingkat pengangguran mengarah ke 7%. (BI, 2013) Pada tanggal 7-18 Desember 2013 *Federal Open Market Committee* (FOMC) memutuskan untuk melanjutkan pengurangan stimulus berupa pembelian obligasi dari US\$ 85 Miliar menjadi US\$ 75 Miliar per bulan. Artinya, The Fed mengurangi pembelian US\$ 10 Miliar untuk obligasi. Meskipun The Fed mengurangi stimulus, tetap mempertahankan suku bunga rendah yang menjadi pusat perhatian investor sampai akhir periode 2014. (Asnil Amri, 2013)

Kebijakan pemerintah AS untuk melakukan pengurangan stimulus ekonomi (*Tapering off*) ini pada akhirnya akan menimbulkan penarikan dana dari negara-negara EM (*emerging market*) termasuk Indonesia pada nilai tukar dan *yield* surat utang pemerintah negara-negara EM. Dampaknya mayoritas mata uang negara-negara EM, termasuk Indonesia mengalami tekanan yakni nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang cukup tajam. Walaupun terjadi penarikan dana dari

negara-negara EM akibat *Tapering off* dan adanya transisi politik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap membaik. Perkembangan positif ini dipengaruhi berbagai respons pemerintah yang baru untuk terus mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani berbagai isu tersebut, salah satunya dengan melakukan realokasi sebagian besar anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bidang strategis lainnya dalam rangka melapangkan jalan menuju terciptanya pertumbuhan ekonomi lebih baik di masa depan. Selain itu untuk meredam laju inflasi serta defisit fiskal tarif dasar listrik dinaikkan hingga 20% dan suku bunga BI rate perlahan-lahan dinaikkan hingga mencapai 7,75% pada akhir tahun 2014. Hasil perkembangan positif dari kebijakan pemerintah ini yang mempengaruhi kenaikan investasi pada surat utang jangka pendek dalam bentuk Surat Utang Negara dengan kupon tetap *Fixed Rate* (SUN FR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Akan tetapi di periode 2015 PT Tempo Scan Pacific Tbk juga mengalami penurunan investasi pada surat utang jangka pendek dalam bentuk Surat Utang Negara *Fixed Rate* (SUN FR) yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang diakui sebagai rugi belum direalisasi atas penurunan nilai pasar investasi jangka pendek pada pendapatan komprehensif lain di laporan laba rugi.

Terjadinya rugi belum direalisasi atas penurunan nilai pasar investasi jangka pendek ini disebabkan meningkatnya volatilitas pasar valuta asing dan pasar modal serta memberikan tekanan terhadap harga komoditas. Pada akhir 2014 mulai terjadinya ketidakpastian adanya kenaikan suku bunga The Fed seiring dengan membaiknya indikator ekonomi AS. Pernyataan The Fed pada *Federal Open*

*Market Committee* (FOMC) Oktober 2015, perkiraan kenaikan suku bunga akan terjadi pada akhir tahun 2015 menguat dan kembali meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan. Dinamika perkembangan harga saham global selama tahun 2015 sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap ketidakpastian kenaikan suku bunga dan perkembangan ekonomi Tiongkok yang menyebabkan pelemahan harga komoditas. Kebijakan *rebalancing* ekonomi tersebut ditempuh dalam rangka transformasi ekonomi Tiongkok dari *investment-driven* menjadi *consumption-driven* demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Disisi lain Indonesia memiliki pangsa ekspor komoditas cukup tinggi terhadap total ekspor, sehingga memiliki potensi penurunan kinerja sektor eksternal lebih tinggi. Untuk menahan dampak pelemahan eksternal, Pemerintah Indonesia menempuh kebijakan fiskal yang mendorong stimulus ekonomi. Sebagai upaya mendorong permintaan domestik dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang, Pemerintah Indonesia meningkatkan belanja modal untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis. Ruang stimulus fiskal yang dimiliki pemerintah tersebut tidak terlepas dari reformasi struktural fiskal yang telah dilakukan terutama melalui pengurangan subsidi energi secara signifikan. Namun, sisi fiskal pemerintah Indonesia menghadapi tantangan akibat penurunan pendapatan pemerintah dari sektor minyak dan gas. Hal itulah yang mempengaruhi rugi belum direalisasi atas penurunan nilai pasar investasi jangka pendek pada Surat Utang Negara *Fixed Rate* (SUN FR) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. (BI, 2015)



Informasi terkait pengukuran nilai wajar instrumen keuangan diperdagangkan berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif masuk dalam kategori hierarki nilai wajar Level 1.

#### 4.2.3.6 Instrumen Keuangan Derivatif Lindung Nilai

Instrumen Keuangan Derivatif Lindung Nilai dalam penelitian ini merupakan instrumen turunan (*underlying*) dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang digunakan untuk membendung atau mengoffset *exposure* (risiko) terhadap perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen perusahaan yang belum diakui. (Donald E. Kieso, 2007) Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji beda *McNemar Test* terdapat signifikansi *p-value* sebesar  $1,000 > 0,05$  atau  $\alpha$  sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan sampel cukup bukti bahwa tidak ada perbedaan jumlah entitas yang menerapkan metode nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Derivatif Lindung Nilai sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Berdasarkan pengukuran index  $-T$  menggunakan table distribusi 4.3 diatas untuk periode 2012-2013 terdapat 7 dari 278 sampel perusahaan yang memiliki instrumen keuangan derivatif lindung nilai yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sementara untuk periode 2014-2015 terdapat 7 dari 278 sampel perusahaan yang memiliki instrumen keuangan derivatif lindung nilai yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sisanya untuk periode 2012-2015 total ada 542 perusahaan keluar dari sampel, sehingga tidak ada kenaikan dan penurunan

penerapan metode akuntansi karena hanya menerapkan metode nilai wajar dan tidak ada yang menerapkan metode biaya. Perusahaan menerapkan instrumen keuangan derivatif lindung nilai melalui laba rugi untuk melindungi risiko keuangan dari perubahan variable termasuk diantaranya suku bunga dan nilai tukar yang mendasarinya berdasarkan kontrak. Dengan adanya *item* yang dilindung nilai terdapat perubahan nilai wajar melalui aktivitas pasar untuk memberikan keputusan kepada perusahaan maupun investor.

Data sampel dalam penelitian ini bisa diketahui bahwa hanya beberapa perusahaan yang menerapkan instrumen keuangan derivatif lindung nilai. Hal ini disebabkan perusahaan dalam sampel termasuk dalam kelompok usaha atau *Group Corporation* dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja bisnis dan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian kedua terkait kelompok usaha, perusahaan fokus untuk menyesuaikan perubahan pasar dan meningkatkan permintaan pasar ekspor baik tingkat internasional maupun regional serta ekspansi di sektor domestik atau meningkatkan pendapatan diluar usaha (*outside ownership*) dengan mengoptimalkan portofolio produk. Transaksi pendapatan yang mengalir dalam *internal group* atau selain pendapatan diluar usaha group akan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Dengan adanya struktur modal perusahaan yang cukup kuat, kebijakan manajemen yang strategis akan memiliki pengakuan pendapatan yang baik melalui diversifikasi produk sehingga akan mempengaruhi risiko keuangan dari perubahan suku bunga dan nilai tukar untuk melakukan lindung nilai atas suatu kontrak derivatif.

Mengingat telah terjadi normalisasi kebijakan moneter AS yang mendorong melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar US dan dipicu oleh kenaikan suku bunga the Fed (*Federal Reserve*) serta penurunan harga komoditas.

Berikut ini merupakan contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini mengadakan kontrak derivatif lindung nilai pada periode 2015 yakni PT Astra International Tbk kode emiten (ASII) melakukan kontrak swap suku bunga *interest rate swaps* dengan nilai nosional sebesar USD 1 dari jumlah nilai nosional USD 148,241,343 dan swap kontrak atas nilai tukar *cross currency swaps* dengan nilai nosional sebesar USD 3,690 dari jumlah nilai nosional USD 2,297,333,041 untuk melindungi risiko fluktuasi suku bunga dan nilai tukar atas Pinjaman pada Piutang Lain-lain. Kemudian Astra juga melakukan swap kontrak suku bunga dan nilai tukar masing-masing USD 2 dan USD 653 untuk melindungi risiko fluktuasi suku bunga dan nilai tukar atas Pinjaman pada Liabilitas Lain-lain dengan jumlah nilai nosional sama. Nilai Nosional merupakan nilai total suatu posisi, berapa banyak nilai yang dikendalikan suatu posisi atau jumlah yang disepakati dalam kontrak berjangka. Perbedaan nilai nosional dengan nilai pasar yaitu nilai nosional menyumbang nilai total posisi, sedangkan nilai pasar memberikan posisi harga untuk layak dijual atau dibeli. (Januarika, 2020)

Untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing pada umumnya diharuskan untuk di *swap* menjadi mata uang fungsional dengan menggunakan *cross currency swaps* sedangkan untuk risiko suku bunga umumnya dikelola dengan menggunakan *interest rate swaps* untuk mengkonversi pinjaman dengan

tingkat bunga mengambang menjadi tingkat bunga tetap. Perubahan atas nilai wajar dari kontrak *interest rate swaps* dan *cross currency swaps* yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, yang secara efektif menghapus variabilitas arus kas dari pinjaman terkait, dicatat di penghasilan komprehensif lain sebagai pos Lindung nilai arus kas. Nilai ini kemudian diakui dalam laba rugi sebagai penyesuaian atas laba atau rugi selisih kurs dan beban bunga pinjaman terkait yang dilindung nilai pada periode yang sama dimana selisih kurs dan beban bunga tersebut mempengaruhi laba rugi.

Terjadinya laba pada penghasilan komprehensif atas Lindung nilai arus kas ini disebabkan meningkatnya volatilitas pasar valuta asing dan pasar modal. Pada awal s.d pertengahan tahun 2015 sektor perumahan AS yang terus membaik dipengaruhi oleh adanya perilaku *front loading* yakni pembelian properti dan memasarkannya sebelum kenaikan suku bunga The Fed yang turut mendorong penjualan rumah sejalan dengan tren suku bunga KPR yang masih rendah. Kemudian pada pertengahan s.d Desember 2015 seiring dengan membaiknya indikator ekonomi AS, The Fed menaikkan suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*) sebesar 25 bps. Nilai mata uang Dollar tetap meningkat sejalan dengan perbaikan di sektor tenaga kerja selama tahun 2015 yang turut mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sejalan dengan penurunan harga BBM di AS. (BI, 2015)

Keuntungan atas perubahan nilai wajar dari kontrak *interest rate swaps* dan *cross currency swaps* yang ditetapkan sebagai lindung nilai akan mengoffset atau saling hapus terhadap beban bunga pada pos Lindung nilai arus kas yang dicatat

pada pendapatan komprehensif lain kemudian hasilnya akan diakumulasi dalam ekuitas sebagai bagian dari laba komprehensif lainnya, sehingga informasi terkait kebijakan strategis ini berguna dalam pengambilan keputusan bagi investor maupun pemilik. Perseroan telah merancang kebijakan untuk mengelola dampak risiko keuangan salah satunya menggunakan instrumen keuangan derivatif lindung nilai dalam upaya pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan.

Kemudian ada lagi contoh data sampel yang mewakili penelitian ini juga menerapkan kebijakan akuntansi instrumen keuangan derivatif lindung nilai yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk kode emiten (INDF), melalui entitas anaknya China Minzhong Food Corporation Limited (CMFC) yang sahamnya tercatat di SGX pada 15 Agustus 2013 melakukan swap kontrak nilai tukar mata uang *cross currency swaps* dan pertukaran suku bunga *interest rate swaps* dengan Citibank N. A., cabang Singapura dan Standard Chartered Bank, cabang Singapura dengan tujuan lindung nilai terhadap volatilitas kurs tukar dan suku bunga yang timbul karena pinjaman tersebut pada utang jangka panjang. Berdasarkan syarat-syarat perjanjian pinjaman, CMFC telah efektif mengkonversikan pinjaman dalam mata uang Dollar USD dengan suku bunga mengambang sebesar 2,6% di atas LIBOR (London Interbank Offered Rate) Dollar USD menjadi pinjaman dalam mata uang RMB (Renminbi) dengan suku bunga tetap tahunan sebesar 5,96%.

Pada tanggal 31 Desember 2013, perjanjian pertukaran mata uang (*cross currency swaps*) dan pertukaran suku bunga (*interest rate swaps*) memiliki

keseluruhan saldo nosional sebesar USD 112,000,000. Nilai wajar perjanjian pertukaran yang beredar menghasilkan kewajiban derivatif sebesar Rp 95.895 pada tanggal 31 Desember 2013. Karena persyaratan penting atas pinjaman lindung nilai dan perjanjian pertukaran mata uang dan suku bunga terpenuhi, perjanjian pertukaran ini dinilai efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Kerugian nilai wajar efektif terhadap lindung nilai arus kas Kelompok Usaha ditanggihkan dalam pendapatan komprehensif lain sebesar Rp 49,981 setelah dikurangi pajak.

Terjadinya kerugian nilai wajar lindung nilai arus kas untuk Kelompok Usaha ini disebabkan adanya *Tapering off* atau pengurangan stimulus ekonomi yang dilakukan Pemerintah AS sejak triwulan I 2013 sampai dengan triwulan II 2013 seiring dengan tren perbaikan perekonomian AS. Mengingat di semester I 2013 terjadinya kebijakan konsolidasi fiskal (*sequester*) berupa kenaikan pajak dan pemotongan belanja pemerintah yang melemahkan keyakinan konsumen dan konsumsi rumah tangga. Pelemahan keyakinan konsumen salah satunya juga disebabkan oleh tertahannya laju penyerapan tenaga kerja. Hal ini turut memberikan tekanan terhadap aktivitas industri seiring turunnya permintaan domestik yang tercermin dari menurunnya indikator *new order* sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi AS masih tumbuh cukup moderat sebesar 1,5%. Pengurangan stimulus ekonomi (*tapering off*) ini dilakukan dengan cara mengurangi pembelian aset keuangan jangka panjang termasuk obligasi dengan

cara menjualnya sehingga menyebabkan adanya penurunan investasi walaupun nilai mata uang dollar USD tetap menguat.

Penurunan aktivitas industri juga dipengaruhi melemahnya permintaan eksternal menyusul realisasi PDB China pada Triwulan I 2013 yang dibawah ekspektasi. China mencatat pertumbuhan ekonomi 7,7% masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya ekspor sejalan dengan masih belum kuatnya pertumbuhan ekonomi AS dan menurunnya kinerja investasi. Investasi menurun merupakan dampak lanjutan dari kebijakan pengetatan kredit yang dilakukan sejak tahun 2010. Kebijakan ini ditempuh guna meredakan gelembung harga properti akibat stimulus fiskal besar-besaran di sektor manufaktur dan properti, dalam merespons krisis keuangan global tahun 2008.

Disamping itu pada semester II 2013, indikator perekonomian AS mulai menunjukkan perbaikan cukup signifikan, pada saat adanya *tapering off* yang didorong oleh kenaikan sektor industri. Perbaikan ekonomi AS juga dipengaruhi oleh menguatnya peran positif ekspor AS dan naiknya produksi energi. Perkembangan ini kemudian menurunkan impor sehingga mendorong penurunan defisit transaksi berjalan. (BI, 2013) Meskipun adanya pengurangan stimulus ekonomi (*tapering off*) The Fed tetap mempertahankan suku bunga rendah yang menjadi pusat perhatian investor sampai akhir periode 2014. (Asnil Amri, 2013)

Kerugian atas perubahan nilai wajar dari kontrak *interest rate swaps* dan *cross currency swaps* yang ditetapkan sebagai lindung nilai akan mengoffset atau saling hapus terhadap beban bunga dan pajak pada pos Lindung nilai arus kas yang

dicatat pada pendapatan komprehensif lain kemudian hasilnya akan diakumulasi dalam ekuitas sebagai bagian dari laba atau rugi komprehensif lainnya. Informasi terkait kebijakan strategis ini cukup efektif dalam mengimbangi kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing dan juga suku bunga. Sebagai contoh perseroan melalui entitas anak CMFC memilih mengkonversikan pinjaman dalam mata uang Dolar USD dengan suku bunga mengambang 2,6% menjadi pinjaman mata uang RMB dengan suku bunga tetap 5,96% meskipun tetap terjadi kerugian cukup sedikit, karena sudah dikompensasi dengan beban bunga dan selisih kurs dari pinjaman terkait lindung nilai. Kebijakan tersebut dipilih karena perseroan menghindari kurs mata uang Dolar USD yang menguat akibat adanya pengurangan stimulus ekonomi AS (*tapering off*) dengan menjual Aset Keuangan Jangka Panjang termasuk Obligasi dibandingkan memilih suku bunga yang kompetitif yakni 2,6%.

Informasi terkait pengukuran nilai wajar instrumen keuangan derivatif lindung nilai ini menggunakan hierarki nilai wajar Input Level 2. Asumsi penting yang digunakan dalam perhitungan nilai wajar derivatif yaitu : Yield imbal hasil dari suku bunga berasal dari informasi pasar dengan menggunakan jatuh tempo serta tingkat kurs yang digunakan adalah kurs penutup tanggal pelaporan.

#### 4.2.3.7 Instrumen Keuangan Derivatif

Instrumen Keuangan Derivatif dalam penelitian ini merupakan instrumen turunan (*underlying*) dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang digunakan



untuk melindungi risiko terhadap perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen perusahaan yang belum diakui. (Donald E. Kieso, 2007) Walaupun dilakukan sebagai lindung nilai dari risiko variable yang mendasarinya yakni suku bunga dan nilai tukar, derivatif ini tidak ditetapkan sebagai akuntansi lindung nilai karena merupakan entitas individual yang kegiatan produksi utamanya adalah ekspor impor menggunakan dasar bahan baku yang beragam dan berbeda-beda menurut segmen dan bidang usaha perusahaan. Kemudian memperluas segmen pasar baik di tingkat regional, internasional serta ekspansi di sektor domestik untuk menunjang kebutuhan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan.

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji beda *McNemar Test* terdapat signifikansi *p-value* sebesar  $1,000 > 0,05$  atau  $\alpha$  sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan sampel cukup bukti bahwa tidak ada perbedaan jumlah entitas yang menerapkan metode nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Derivatif sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Berdasarkan pengukuran index  $-T$  menggunakan table distribusi 4.3 diatas untuk periode 2012-2013 terdapat 27 dari 278 sampel perusahaan yang memiliki instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sementara untuk periode 2014-2015 terdapat 36 dari 278 sampel perusahaan yang memiliki instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sisanya untuk periode 2012-2013 & 2014-2015 masing-masing 251 dan 242

perusahaan keluar dari sampel, sehingga tidak ada kenaikan dan penurunan penerapan metode akuntansi karena hanya menerapkan metode nilai wajar dan tidak ada yang menerapkan metode biaya. Perusahaan menerapkan instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi untuk melindungi risiko keuangan dari perubahan variable termasuk diantaranya suku bunga dan nilai tukar yang mendasarinya berdasarkan kontrak. Dengan adanya *item* yang dilindungi nilai terdapat perubahan nilai wajar melalui aktivitas pasar untuk memberikan keputusan kepada perusahaan maupun investor.

Kebijakan perusahaan dalam mengatur struktur modal yang baik melalui pinjaman dan hutang obligasi adalah dengan cara meningkatkan likuiditas melalui pendapatan berulang (*recurring revenue*) dari diversifikasi produk, sehingga perusahaan dapat melindungi risiko dari kerugian nilai tukar dan suku bunga akibat melakukan kontrak derivatif.

Beberapa contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini melakukan kontrak derivatif untuk periode 2014 yakni PT Fajar Surya Wisesa Tbk kode emiten (FASW) bergerak dalam bidang usaha manufaktur kertas, mengadakan perjanjian swap tingkat bunga untuk mengantisipasi risiko Perusahaan atas fluktuasi tingkat bunga sehubungan dengan fasilitas utang bank tertentu dengan PT Bank UOB Indonesia, tanggal kontrak 16 Mei 2011 s.d 7 April 2016. Nilai nosional US\$ 8.593.750, kemudian nilai wajar Rp 1.513.848.480 dengan tingkat bunga tetap per tahun 1,68%. Selanjutnya Morgan Stanley, tanggal kontrak 16 Mei 2011 s.d 7 April 2016. Nilai nosional US\$ 8.593.750, kemudian nilai wajar Rp 1.503.656.139

dengan tingkat bunga tetap per tahun 1,69%. Berdasarkan perjanjian tersebut perusahaan membayar secara triwulanan tingkat bunga tetap kepada Bank, pada saat yang sama, Bank akan membayar bunga pada tingkat bunga mengambang LIBOR US\$. Nilai nosional merupakan nilai yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo berdasarkan kontrak berjangka. Nilai nosional merupakan nilai nominal dari setiap transaksi dan menyatakan volume dari transaksi tersebut, akan tetapi bukan merupakan suatu alat ukur.

Transaksi derivatif ini menghasilkan keuntungan atas instrumen derivatif sebesar Rp 2.763.035.389 yang dilaporkan sebagai “Keuntungan atas instrumen keuangan Derivatif” dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Terjadinya keuntungan atas instrumen derivatif ini disebabkan meningkatnya volatilitas pasar valuta asing dan pasar modal. Pada tahun 2014 terjadi cuaca dingin ekstrim (*big freeze*) yang membekukan sebagian aktivitas ekonomi AS selama triwulan I 2014 memicu ekspektasi pasar terhadap penundaan kenaikan suku bunga kebijakan dari *Federal Fund Rate* (FFR). Namun hal itu bisa diantisipasi dengan adanya (*tapering off*) lanjutan yang diumumkan Desember 2013 dan berakhir Oktober 2014. Ekspektasi tersebut berdampak pada penurunan risiko arus modal dunia untuk keluar dari negara-negara berkembang (*emerging market*) bagi yang melakukan investasi kontrak pertukaran suku bunga, disebabkan suku bunga masih rendah. Disamping itu pasar keuangan Asia juga masih menunjukkan kinerja positif pada tahun 2014. Kinerja positif dari bursa saham Asia tersebut dipengaruhi oleh langkah beberapa bank sentral lain seperti *European Central Bank* (ECB) dan *Bank*

*of Japan* (BOJ) yang melakukan kebijakan (*quantitative easing*) di tengah langkah AS yang bersiap melakukan normalisasi kebijakan moneter. (BI, 2014)

Selanjutnya PT Fajar Surya Wisesa Tbk juga melakukan kontrak transaksi derivatif berupa *Forward Contract* mata uang asing dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited pada periode 2014. Nilai nosional USD\$ 3.000.000, kemudian nilai wajar (Rp 185.228.613) dan jatuh tempo Juni – Desember 2015. Transaksi ini dilakukan sebagai antisipasi risiko Perusahaan atas fluktuasi mata uang asing sehubungan dengan pembayaran utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang tertentu.

Transaksi derivatif ini menghasilkan kerugian atas instrumen derivatif sebesar Rp 185.228.613 pada tahun 2014 yang dilaporkan sebagai “Keuntungan atau kerugian atas Instrumen Keuangan Derivatif dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan”.

Terjadinya kerugian atas instrumen derivatif ini disebabkan turunnya harga minyak dan harga komoditas global. Pada tahun 2014 harga komoditas di negara berkembang (*emerging market*) yang dimotori oleh Tiongkok terjadi penurunan harga terutama pada batubara, dan karet yang diekspor dari Indonesia. Untuk batubara itu sendiri disebabkan oleh penurunan impor Tiongkok sejalan dengan kebijakan pemerintah Tiongkok untuk melindungi industri dalam negeri dan kebijakan pengurangan emisi karbon dalam pembangkit listrik. Sedangkan harga karet juga menurun disebabkan adanya pembatasan kandungan karet alam (*natural rubber*) di Tiongkok terkait permasalahan lingkungan.

Kemudian untuk harga minyak terjadi penurunan 10,5% dibandingkan tahun 2013. Pada semester I 2014, harga minyak dunia masih berada dalam tren meningkat dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akibat cuaca dingin ekstrim yang melanda AS dan pasokan yang menurun akibat naiknya tensi geopolitik di Timur Tengah. Namun sejak awal semester II 2014, harga minyak dunia mulai menurun disebabkan pasokan minyak dunia meningkat dipengaruhi oleh turunnya tensi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. (BI, 2014)

Selanjutnya ada lagi contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini melakukan kontrak derivatif untuk periode 2013 yakni PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk kode emiten (CPIN) bergerak dalam bidang industri makanan ternak, melakukan Kontrak Berjangka Komoditas (“KBK”) melalui Philip Futures Pte. Ltd. (“Phillip”), Singapura, sebagai broker. Perusahaan menggunakan KBK untuk lindung nilai atas risiko kerugian yang timbul dari fluktuasi harga bahan baku.

Keuntungan atas perubahan nilai wajar kontrak komoditas berjangka diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada pos pendapatan operasi lain.

Terjadinya keuntungan atas perubahan nilai wajar kontrak komoditas berjangka ini disebabkan adanya pengurangan stimulus ekonomi AS (*tapering off*) sejak Triwulan I 2013 sampai dengan Triwulan II 2013 dilakukan dengan cara menjual aset keuangan jangka panjang termasuk obligasi untuk menyeimbangkan neraca perekonomian AS serta mengurangi defisit fiskal. Hasilnya mampu menurunkan tingkat pengangguran mengarah ke 7%. Dengan adanya (*tapering off*)

sejalan dengan perbaikan perekonomian AS akan meningkat secara bertahap sektor industri dan konsumsi pada triwulan IV 2013, sehingga mendorong menguatnya kurs Dollar USD karena terjadi penarikan aliran dana investasi asing hasil dari penjualan obligasi dan aset keuangan jangka panjang tersebut.

Kemudian yang kedua terjadi kenaikan harga komoditas pada nonenergi lainnya pada semester II 2013 sejalan dengan membaiknya aktivitas sektor manufaktur di negara-negara maju. Harga hasil pertanian yang menjadi input sektor manufaktur pada tahun 2013 meningkat 1,4%. (BI, 2013)

Informasi terkait pengukuran nilai wajar instrumen keuangan derivatif ini menggunakan hierarki nilai wajar Input Level 2. Asumsi penting yang digunakan dalam perhitungan nilai wajar derivatif yaitu : Yield imbal hasil dari suku bunga berasal dari informasi pasar dengan menggunakan jatuh tempo serta tingkat kurs yang digunakan adalah kurs penutup tanggal pelaporan.

#### 4.2.3.8 Instrumen Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Instrumen Keuangan Tersedia Untuk Dijual (*Available for Sale*) dalam penelitian ini termasuk investasi dalam surat berharga obligasi dan investasi dalam sekuritas ekuitas yang menunjukkan bagian kepemilikan saham kurang dari 20%. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji beda *Wilcoxon Test* terdapat signifikansi *p-value* sebesar  $0,957 > 0,05$  atau  $\alpha$  sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan sampel cukup bukti bahwa tidak ada perbedaan jumlah entitas yang menerapkan metode nilai wajar untuk

Instrumen Keuangan Tersedia Untuk Dijual sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Berdasarkan pengukuran index -T menggunakan table distribusi 4.3 diatas untuk periode 2012-2013 yang menggunakan metode biaya sebanyak 57,5 perusahaan. Sedangkan yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 62,5 perusahaan. Sementara untuk periode 2014-2015 yang menggunakan metode biaya sebanyak 65 perusahaan. Sedangkan yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 63 perusahaan. Terjadi kenaikan cukup signifikan sebesar 1% untuk yang menerapkan metode nilai wajar Instrumen Keuangan Tersedia Untuk Dijual. Hasil pengukuran menggunakan index-T terjadi kenaikan daya banding relatif sama sebesar 0,001 poin lebih tinggi periode 2012-2013 sebesar 0,501 dibanding periode 2014-2015 sebesar 0,500. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terjadi kenaikan daya banding cukup signifikan yakni sebagian besar perusahaan menerapkan metode nilai wajar dan ada yang menggunakan metode biaya sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar atau setelah berlaku adopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*).

Dalam penelitian ini sebagian besar perusahaan menerapkan metode nilai wajar untuk instrumen keuangan tersedia untuk dijual atas bagian kepemilikan dari saham yang kurang dari 20% dan surat-surat berharga seperti obligasi yang diperdagangkan atau terdaftar di pasar bursa. Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas perusahaan. Hal ini disebabkan sebagian

perusahaan memiliki struktur modal yang didanai oleh pinjaman dan hutang obligasi, sehingga kebijakan perusahaan untuk mencairkan dana dari investasi tersebut dilakukan melalui strategi perseroan dalam memperoleh laba untuk menekan biaya bahan baku yang semakin meningkat dan pembayaran beban bunga akibat depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar USD.

Mengingat telah terjadi normalisasi kebijakan moneter AS yang mendorong melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar US dan dipicu oleh kenaikan suku bunga the Fed (*Federal Reserve*) serta penurunan harga komoditas.

Beberapa contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini memiliki instrumen keuangan tersedia untuk dijual yang dimiliki selama periode tertentu kemudian dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas perusahaan yakni, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk kode emiten (ICBP) memiliki investasi jangka pendek dalam bentuk kepemilikan saham dari PT Ultrajaya Milk Industry Tbk kode emiten (ULTJ) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman susu cair, sari buah, teh, minuman tradisional dan minuman kesehatan, yang diolah dengan teknologi UHT (*Ultra High Temperature*). Mengingat Group ICBP juga sedang melakukan studi kelayakan untuk masuk ke dalam industri peternakan sapi perah guna mendukung penambahan kapasitas pembuatan produk susu cair demi memenuhi kebutuhan konsumen terkait nutrisi, gizi dan kesehatan.

Pada tahun buku 2013 ICBP memiliki laba belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual pada pos pendapatan komprehensif lain. Terjadinya



laba belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual ini disebabkan naiknya harga saham UL TJ di bursa efek. Kenaikan cukup signifikan terjadi sejak akhir Triwulan I, dimana saham pada akhir bulan Desember 2012 harganya Rp 1.330,- menjadi Rp 4.000,- pada April 2013. Kenaikan harga saham tersebut merupakan apresiasi pasar dan para investor terhadap kinerja Perseroan di tahun buku 2013. Disamping itu Perseroan berhasil memperoleh Penjualan Bersih sebesar Rp 3,5 Triliun, meningkat 23,2% dibandingkan tahun buku 2012 sebesar Rp 2,8 Triliun. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya volume penjualan dari semua segmen produk sebesar 18%. Selain itu di tahun buku 2013 perusahaan telah menaikkan harga jual produk, rata-rata sebesar 5% dari harga jual yang berlaku sebelumnya.

Indikator-indikator keuangan seperti *Current Ratio*, *Debt Equity Ratio* dan *Gearing Ratio*, semuanya masih menunjukkan kondisi keuangan Perseroan yang baik dan stabil. *Current Ratio* berada di tingkat 247,0%, *Debt Equity Ratio* 39,5%, dan *Gearing Ratio* 2,6%. Demikian pula dengan rasio-rasio usaha lainnya seperti *Gross Margin Ratio* yang berada di tingkat 29,3%, *Interest Coverage* 29,5%, EBITDA 38,3% dan EPS Rp 113.

Hasil dari indikator-indikator keuangan yang baik tidak lepas dari kebijakan perseroan dalam menjalankan strategi yang tepat untuk mempertahankan posisi market leader di bidang produk minuman UHT.

Berikut ini ada beberapa sampel perusahaan lagi yang mewakili penelitian ini memiliki instrumen keuangan tersedia untuk dijual dalam bentuk investasi surat-

surat berharga obligasi entitas anak dari PT Duta Pertiwi Tbk kode emiten (DUTI) yakni PT Royal Oriental (RO) atas obligasi yang diterbitkan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk kode emiten (INKP) dalam bentuk *Secured Company Global Notes*. Selanjutnya, obligasi tersebut dibedakan antara Tranche A dan Tranche B yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2014 dan 1 Oktober 2017 dengan suku bunga mengambang yang dihitung berdasarkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) 3 bulan ditambah 2% per tahun untuk 3 tahun pertama. Setelah tahun ketiga, suku bunga dihitung berdasarkan SBI 3 bulan ditambah 2% per tahun. Bunga obligasi dibayar secara triwulanan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2004. Pembayaran pokok obligasi Tranche A akan dicicil selama 10 tahun per 6 bulanan. Pembayaran pertama akan dilakukan 6 bulan setelah tanggal 1 Oktober 2004. Sedangkan, pembayaran pokok obligasi Tranche B akan dilakukan 6 bulan setelah pokok Tranche A lunas dan dicicil selama 3 tahun.

Pada tahun 2012, RO menerima pelunasan pembayaran pokok Tranche B sebesar Rp 75.049.132.363. Dari penerimaan pembayaran tersebut, RO mengakui keuntungan atas pemulihan dari penurunan nilai investasi sebesar Rp 18.836.370.034, dan disajikan pada akun "Pemulihan dari penurunan nilai investasi" pada laporan laba rugi komprehensif tahun 2012. Selama tahun 2012, RO memperoleh bunga dari obligasi ini sebesar Rp 4.648.167.596 disajikan pada pos Pendapatan Bunga dan Investasi.

Keuntungan atas pemulihan dari penurunan nilai investasi dan pendapatan bunga dari obligasi ini disebabkan adanya pemulihan pasar keuangan global yang

ditunjukkan oleh meningkatnya harga aset keuangan termasuk obligasi di negara-negara maju di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih rentan, dengan ditopang oleh besarnya likuiditas terkait berbagai kebijakan *quantitative easing* (QE) bank sentral. Mengingat tujuan dari kebijakan QE ini untuk memperbaiki perekonomian negara maju termasuk Amerika Serikat (AS) yang dilanda resesi sejak tahun 2009. (Asnil Amri, 2013)

Kebijakan QE tersebut selain meredakan tekanan likuiditas juga meningkatkan kepercayaan pelaku pasar dan investor serta menurunkan tingkat risiko. Bahkan besarnya likuiditas yang dikeluarkan bank sentral di negara-negara maju tercermin pada ekspansi neraca masing-masing bank sentral – juga mengalir ke pasar keuangan negara berkembang. Pada tahun 2012, aset the Fed (*Federal US Reserve*) meningkat 42%, aset ECB (*European Central Bank*) meningkat 10,9%, sementara aset BOJ (*Bank of Japan*) juga meningkat 9,3%. (BI, 2012)

Informasi terkait pengukuran nilai wajar instrumen keuangan tersedia untuk dijual berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif masuk dalam kategori hierarki nilai wajar Level 1.

Dalam sampel penelitian ini beberapa perusahaan juga menggunakan metode biaya untuk instrumen keuangan tersedia untuk dijual, hal ini disebabkan investasi dalam bentuk aset keuangan tersedia untuk dijual tersebut tidak diperdagangkan di pasar modal dikarenakan belum listing di Bursa Efek Indonesia. Namun penulis menduga bahwa dengan perusahaan menginvestasikan aset keuangan tersedia untuk dijual tersebut bertujuan untuk investasi jangka panjang kemudian dijual

kembali untuk menyediakan dana cadangan demi pemenuhan likuiditas perusahaan dalam menghadapi adanya ketidakpastian arus kas masa depan.

Beberapa contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini yang memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual diukur menggunakan metode biaya yakni PT Delta Djakarta Tbk bergerak dalam bidang industri minuman, melakukan investasi dalam bentuk saham 15% pada PT San Miguel Indonesia Foods and Beverages (SMIFB) yang sudah beroperasi sejak bulan Maret 2006. Pada tahun 2012, perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai atas investasi saham berkaitan dengan kondisi bisnis SMIFB. Terdapat rugi penurunan nilai sebesar Rp 4.018.674.000 telah diakui di laba rugi tahun berjalan. Berdasarkan RUPS tanggal 29 Agustus 2013, pemegang saham memutuskan untuk melikuidasi SMIFB untuk menutupi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja berkaitan dengan adanya risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Kebijakan perusahaan yang digunakan ini adalah menggunakan pendekatan kos historis (*historical cost*). Hal ini tercermin bahwa manajemen dalam pengambilan keputusan tentang masa yang akan datang dilakukan dengan melihat data historis. (Muqodim, 2005)

#### 4.2.3.9 Instrumen Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Instrumen keuangan dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*) dalam penelitian ini merupakan investasi atas surat-surat berharga dalam bentuk obligasi perusahaan yang memiliki kepemilikan penuh baik jangka pendek maupun jangka

panjang, baik yang dimiliki entitas anak maupun entitas induk hingga jatuh tempo. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji beda *McNemar Test* terdapat signifikansi *p-value* sebesar  $0,250 > 0,05$  atau  $\alpha$  sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah hipotesis ditolak. Hasil penelitian menunjukkan sampel cukup bukti bahwa tidak ada entitas yang menerapkan metode nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Berdasarkan pengukuran index-T menggunakan table distribusi 4.3 diatas untuk periode 2012-2013 yang menggunakan metode biaya sebanyak 7 perusahaan. Sedangkan yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 1 perusahaan. Sementara untuk periode 2014-2015 yang menggunakan metode biaya sebanyak 5,5 perusahaan. Sedangkan yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 1,5 perusahaan. Hasil pengukuran menggunakan index-T terjadi penurunan daya banding 0,118 poin lebih tinggi periode 2012-2013 sebesar 0,781 dibandingkan periode 2014-2015 sebesar 0,663. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan metode biaya dibandingkan menerapkan metode nilai wajar.

Dalam penelitian ini sebagian besar perusahaan menggunakan metode biaya untuk instrumen keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Hal ini disebabkan perusahaan ingin menginvestasikan obligasi dimiliki hingga jatuh tempo tersebut untuk dijual atau dicairkan pada saat jatuh tempo dengan mengharapkan imbal hasil dari fluktuasi suku bunga yang tujuan utamanya adalah mengantisipasi adanya

depresiasi nilai tukar rupiah terhadap Dollar & turunnya harga komoditas sehingga menyebabkan lemahnya kinerja ekspor dan tingginya impor bahan baku serta lemahnya daya beli masyarakat, yang mengakibatkan turunnya laba usaha perseroan dan gagalnya entitas dalam menjaga kualitas kredit dilihat dari sisi likuiditas dan juga solvabilitas perusahaan. Kebijakan yang dilakukan perusahaan adalah menggunakan pendekatan kos historis (*Historical Cost*) yakni tetap menjaga kualitas kredit ditengah menghadapi adanya ketidakpastian arus kas masa depan dengan ditopang oleh pertumbuhan investasi.

Contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini yang menerapkan instrumen keuangan dimiliki hingga jatuh tempo yakni PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk kode emiten (TKIM) bergerak dalam bidang usaha memproduksi berbagai jenis kertas. Pada tanggal 22 Desember 2009, Perusahaan membeli obligasi Subordinasi BRI II Tahun 2009 dengan nilai nominal investasi Rp 10 Miliar tingkat bunga kupon sebesar 10,95% per tahun. Obligasi ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 22 Desember 2014.

Dengan adanya pelunasan hutang obligasi ini TKIM dapat meningkatkan tingkat *Solvabilitas* Perusahaan yang tercermin pada Liabilitas Jangka Panjang yang turun sebesar 3,9% dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Disamping itu ada juga perusahaan yang menerapkan metode nilai wajar untuk instrumen keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Hal ini disebabkan perusahaan mampu menyusun strategi kebijakan yang tepat dalam menyesuaikan perubahan pasar diantaranya PT Astra International Tbk kode emiten (ASII)

menginvestasikan instrumen keuangan dimiliki hingga jatuh tempo berupa obligasi, termasuk investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Astra Buana entitas anak tidak langsung. Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar atas obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan harga pasar adalah Rp 20 Miliar (2011: Rp 62 Miliar). Pembayaran atas investasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2013. Obligasi tersebut memiliki peringkat idAA+. Dengan hasil tersebut ASII dapat memiliki posisi yang kuat untuk memenuhi tingkat *Likuiditas* Perusahaan tercermin dari seluruh kewajiban jangka pendek, yang mencapai sejumlah 81% dari nilai aset lancar pada akhir tahun 2013.

Harga pasar obligasi tersebut tercermin dari adanya pemulihan sepanjang tahun 2012 yang ditunjukkan oleh kembali meningkatnya harga aset keuangan. Sebagian besar negara baik negara-negara maju maupun negara-negara *emerging market*, mengalami kenaikan harga saham dan obligasi. Peningkatan kinerja pasar keuangan global terutama didukung oleh pertumbuhan harga aset di negara-negara berkembang sejalan dengan fundamental ekonomi yang lebih solid. Sementara itu, pertumbuhan harga aset keuangan yang tinggi di negara-negara maju di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih rentan, ditopang oleh besarnya likuiditas terkait berbagai kebijakan *quantitative easing* (QE) bank sentral di negara-negara maju. Kebijakan QE tersebut selain meredakan tekanan likuiditas juga meningkatkan kepercayaan pelaku pasar dan investor serta menurunkan tingkat risiko. (BI, 2012)

Kemudian yang kedua dari hasil sampel perusahaan dalam penelitian ini hanya beberapa perusahaan menerapkan instrumen keuangan dimiliki hingga jatuh

tempo. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut memiliki struktur modal yang cukup baik serta didukung oleh sumber daya keuangan yang cukup mumpuni sehingga investasi dalam bentuk surat-surat berharga obligasi ini memiliki nilai nominal cukup besar yang tidak semua bisa dijangkau oleh perusahaan dan juga investor.

#### 4.2.3.10 Instrumen Keuangan Piutang

Instrumen keuangan piutang dalam penelitian ini merupakan Piutang yang digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji beda *Paired Sample Test* terdapat signifikansi *p-value* sebesar  $0,034 < 0,05$  atau  $\alpha$  sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan sampel cukup bukti bahwa ada perbedaan entitas yang menerapkan metode nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Piutang sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Berdasarkan pengukuran index-T menggunakan tabel distribusi 4.3 diatas untuk periode 2012-2013 yang menggunakan metode biaya sebanyak 275 perusahaan. Sedangkan yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 3 perusahaan. Sementara untuk periode 2014-2015 yang menggunakan metode biaya sebanyak 271,5 perusahaan. Sedangkan yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 6,5 perusahaan sehingga terdapat kenaikan metode nilai wajar sebesar 3,5%. Hasil pengukuran menggunakan index-T terjadi penurunan daya banding 0,025 poin lebih tinggi periode 2012-2013 sebesar 0,979 dibandingkan periode



2014-2015 sebesar 0,954. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada perubahan kebijakan perusahaan yang menerapkan metode nilai wajar meskipun sebagian besar lebih banyak menggunakan metode biaya sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar atau setelah berlaku adopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Hasil ini berbeda dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Khomsatun, 2016) yang menyebutkan bahwa tidak ada perubahan jumlah perusahaan dalam pengukuran Instrumen Keuangan Piutang di Indonesia yang artinya perusahaan masih menggunakan metode biaya. Hal ini disebabkan perusahaan cenderung menggunakan kos historis (*historical cost*) dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian yang kedua perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang memiliki sampel periode 2007-2011 sehingga masih dalam tahap konvergensi IFRS tahap pertama yang artinya belum terdapat perbedaan terhadap standar akuntansi keuangan di Indonesia yang masih menggunakan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Dalam penelitian ini sebagian besar perusahaan masih menggunakan metode biaya untuk instrumen keuangan piutang, hal ini disebabkan adanya kenaikan pembayaran pajak. Alasan kedua perusahaan masih cenderung menggunakan kos historis (*historical cost*) dalam proses pengambilan keputusan ekonomi ialah untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian arus kas masa depan. Kemudian ada beberapa perusahaan yang juga menerapkan metode nilai wajar instrumen keuangan piutang dikarenakan perusahaan ingin meningkatkan *likuiditas* melalui akuisisi perusahaan yang memiliki nilai pasar untuk menjaga kualitas kredit

perusahaan ditengah menghadapi adanya ketidakpastian arus kas masa depan dengan memperhatikan sumber daya keuangan yang cukup baik. Perbedaan dari kedua kebijakan yang dilakukan perusahaan tersebut bertujuan sama yakni meminimalisir adanya risiko tidak tertagihnya piutang dan membentuk penyisihan yang memadai untuk menutup kemungkinan dari tidak tertagihnya piutang.

Penyisihan yang memadai ini dilakukan dengan cara memantau dan memonitor piutang secara teratur dari penjualan kredit yang sudah terjadi, menetapkan kebijakan verifikasi serta otorisasi kredit, menetapkan periode pengumpulan piutang melalui jatuh tempo sehingga berpeluang pelunasan piutang dapat terkumpul dari pelanggan.

Beberapa contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini menggunakan metode biaya untuk instrumen keuangan piutang yakni PT KMI Wire and Cable Tbk kode emiten (KBLI) bergerak dalam bidang pembuatan kabel dan kawat aluminium serta tembaga, Pada periode 2014 untuk Piutang Perusahaan telah jatuh tempo mengalami penurunan sebesar 48,4% menjadi Rp 116,7 Milyar jika dibandingkan dengan Rp 226,1 Milyar pada tahun 2013, hal ini sejalan dengan adanya pelunasan beberapa piutang dari sektor PLN. Penurunan piutang perusahaan yang telah jatuh tempo ini disebabkan terjadinya kenaikan piutang perusahaan sebesar 41,9% pada periode 2012 sejalan dengan Supply kedua bahan baku utama kabel tersebut, baik lokal maupun impor yang cukup terjamin serta kenaikan penjualan perusahaan.

Kemudian ada lagi contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini menerapkan metode nilai wajar untuk instrumen keuangan piutang yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk bergerak dalam bidang industri persemenan, pada tanggal 18 Desember 2012, Perseroan melakukan akuisisi 70% saham Thang Long Cement Joint Stock Company yang berdomisili di negara Vietnam dan bergerak dalam bidang produksi semen. Total nilai akuisisi adalah sebesar VND3.282 miliar. Total nilai akuisisi tersebut termasuk nilai wajar piutang usaha dan piutang lain-lain sebesar Rp 131.373.945, termasuk di dalamnya piutang usaha dengan nilai wajar sebesar Rp 56.580.735.

Dari data tersebut diatas bisa dijelaskan bahwa prosentase piutang terhadap pendapatan tahun 2012 mencapai 12,6% lebih tinggi dibanding periode 2011 sebesar 11,2%. Meskipun lebih tinggi dari tahun 2011 komposisi piutang yang lewat jatuh tempo mengalami penurunan menjadi 5,4% yang artinya Perseroan konsisten menjaga kualitas piutangnya agar senantiasa terkelola dengan baik dan memiliki tingkat kolektibilitas yang tinggi, begitu juga di periode 2013. Dengan demikian jumlah cadangan yang dialokasikan sebagai kompensasi penurunan nilai berada dalam tingkat yang wajar sesuai kebijakan Perusahaan.

Hal ini disebabkan adanya perbaikan kinerja operasional yang dibentuk oleh tim dari SMIG (Semen Indonesia Group) bernama Tim Post Merger Integration (PMI) setelah melalui proses akuisisi TLCC. Tim PMI bertugas menyelesaikan bisnis proses antara TLCC dan SMIG. Secara rinci perbaikan yang dilakukan oleh

Tim PMI meliputi aspek Produksi, Pemasaran, Distribusi, Perencanaan Strategis dan Pengadaan, Teknologi Informasi, Keuangan dan Human Capital.

Mengingat kondisi ekonomi Vietnam saat dilakukan akuisisi TLCC mengalami perlambatan, antara lain suku bunga mencapai 23% untuk pinjaman VND dan 8% untuk pinjaman USD. Sementara nilai tukar USD terhadap VND meningkat sekitar 9%. Biaya yang lain juga meningkat sekitar 15% untuk tarif listrik, 5% untuk harga minyak, 88% untuk batubara, dan 32%-43% untuk bahan bakar.

Dalam menentukan nilai wajar, jasa penilai tersebut mengkombinasikan pendekatan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*) atas pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan biaya (*cost approach*), input yang tidak dapat diobservasi yaitu tingkat pertumbuhan laba bersih jangka panjang (*long term net operating income*). Informasi tentang pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan piutang ini termasuk hierarki Level 3.

#### 4.2.3.11 Instrumen Keuangan Pinjaman

Instrumen Keuangan Pinjaman dalam penelitian ini merupakan pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji beda *Paired Sample Test* terdapat signifikansi *p-value* sebesar  $0,032 < 0,05$  atau  $\alpha$  sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan sampel cukup bukti bahwa ada perbedaan entitas

yang menerapkan metode nilai wajar untuk Instrumen Keuangan Pinjaman sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Berdasarkan pengukuran index-T menggunakan tabel distribusi 4.3 diatas untuk periode 2012-2013 yang menggunakan metode biaya sebanyak 275 perusahaan. Sedangkan yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 3 perusahaan. Sementara untuk periode 2014-2015 yang menggunakan metode biaya sebanyak 271 perusahaan. Sedangkan yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 7 perusahaan sehingga terdapat kenaikan perusahaan yang menerapkan metode nilai wajar sebesar 4%. Hasil pengukuran menggunakan index-T terjadi penurunan daya banding 0,028 poin lebih tinggi periode 2012-2013 sebesar 0,979 dibandingkan periode 2014-2015 sebesar 0,951. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada perubahan kebijakan perusahaan yang menerapkan metode nilai wajar meskipun lebih banyak menggunakan metode biaya sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar atau sesudah berlaku adopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Hasil ini berbeda dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Khomsatun, 2016) yang menyebutkan bahwa tidak ada perubahan jumlah entitas yang menerapkan metode biaya untuk instrumen keuangan pinjaman di Indonesia. Semua perusahaan masih menggunakan metode biaya disebabkan perusahaan cenderung menggunakan kos historis (*historical cost*) untuk mengantisipasi adanya risiko terjadinya ketidakpastian arus kas masa depan atas instrumen keuangan. Kemudian yang kedua perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang memiliki sampel periode 2007-2011 sehingga masih dalam tahap

konvergensi IFRS tahap pertama yang artinya belum terdapat perbedaan terhadap standar akuntansi keuangan di Indonesia yang masih menggunakan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Dalam penelitian ini beberapa perusahaan menerapkan metode nilai wajar pada instrumen keuangan pinjaman dikarenakan perusahaan ingin menjaga struktur modal untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya rasional dengan mempertimbangkan tingkat biaya pinjaman serta biaya bunga yang kompetitif, agar pembayaran pinjaman per tahun bisa optimal. Kebijakan dilakukan perusahaan tersebut bertujuan sama yakni meminimalisir risiko terjadinya kenaikan suku bunga dan melemahnya nilai tukar yang berdampak pada ketidakpastian arus kas masa depan. Tingkat suku bunga yang mengacu pada nilai wajar arus kas masa depan terutama instrumen keuangan pinjaman dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pasar.

Berikut ini merupakan contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini menerapkan metode nilai wajar instrumen keuangan pinjaman dengan mempertimbangkan untuk memilih tingkat biaya pinjaman serta biaya bunga kompetitif untuk pelunasan utang bank yakni PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN) bergerak dalam bidang perhotelan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan apartemen melakukan pembayaran utang bank jangka panjang selama tahun 2015 sebesar US\$ 10.000.000 atau setara dengan Rp 132,36 miliar atas fasilitas pinjaman jangka panjang bank sindikasi yang diperoleh Perseroan di bulan Oktober 2014 sebesar US\$ 100.000.000 yang memiliki tenor 5 tahun. Pihak pemberi pinjaman terdiri dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, Qatar National Bank SAQ, Cabang

Singapura, dan Woori Bank, Cabang Singapura. Berdasarkan perjanjian pinjaman, suku bunga pinjaman untuk setiap periode bunga yang dikenakan adalah 4%-5% per tahun untuk pemberi pinjaman dalam negeri dan 3,3% per tahun di tambah LIBOR untuk pemberi pinjaman luar negeri yang artinya perusahaan memilih suku bunga pasar untuk membayar utang bank jangka panjang tersebut selama satu periode. Sehingga berkontribusi terhadap Liabilitas Jangka Panjang perusahaan yang mengalami penurunan di akhir tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yang artinya menunjukkan kemampuan untuk dapat memenuhi liabilitas jangka pendeknya relatif stabil.

Alasan perusahaan memilih suku bunga pasar berdasarkan pinjaman tersebut disebabkan suku bunga KPR yang masih rendah di negara maju termasuk AS. Suku bunga yang masih rendah ini tercermin pada pertumbuhan penjualan rumah yang meningkat di sektor perumahan AS. Hal ini terjadi ketika muncul adanya indikasi perilaku *front loading* yakni pembelian properti dan memasarkannya sebelum terjadinya kenaikan suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*) yang dilakukan The Fed pada Desember 2015 sehingga turut mendorong penjualan rumah. Kemudian yang kedua adalah adanya perbaikan ekonomi AS terutama disektor tenaga kerja didukung meningkatnya konsumsi sejalan dengan penurunan harga BBM yang memberikan ruang tambahan daya beli bagi masyarakat. (BI, 2015)

Informasi pengukuran nilai wajar liabilitas keuangan pinjaman atas utang bank yang diestimasi berdasarkan arus kas didiskontokan dikategorikan dalam hierarki level 3.

Dalam sampel penelitian ini sebagian besar perusahaan juga menggunakan metode biaya untuk instrumen keuangan pinjaman, hal ini disebabkan adanya risiko suku bunga yang berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar yang mengakibatkan perusahaan belum mampu menyesuaikan pasar sehingga kebijakan perusahaan dalam mengantisipasi adanya risiko suku bunga dengan cara mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Disamping itu perusahaan juga mengandalkan kos historis (*historical cost*) untuk pinjaman suku bunga dengan tujuan mengantisipasi risiko terjadinya ketidakpastian arus kas masa depan dengan cara melakukan pelunasan pinjaman berdasarkan hasil evaluasi secara periodik suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang.

Berikut ini merupakan contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini menggunakan metode biaya dengan mengandalkan kos historis untuk pelunasan pinjaman dengan mengevaluasi perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk bergerak dalam bidang industri persemenan, pada tahun 2008 memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 2.450.000 yang digunakan untuk pembelian 1 unit *Rock Drill* bertenor 5 tahun dan telah dilunasi pada tanggal 24 Desember 2013. Hal ini disebabkan tingkat bunga utang bank dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah 9,5% masing-masing pada tahun 2013 dan 2012 dan dikhawatirkan akan mengalami kenaikan suku bunga di periode berikutnya. Mengingat untuk periode



berikutnya terjadi pengetatan likuiditas yang menyebabkan turunnya ketersediaan fasilitas pembiayaan, meningkatnya suku bunga, acuan (BI rate) yang kemudian mendorong peningkatan tingkat suku bunga pinjaman, serta meningkatnya harga bahan baku akibat melemahnya nilai tukar Rupiah. Dengan hasil ini rasio kewajiban terhadap ekuitas Perseroan adalah sebesar 19,6% menunjukkan kemampuan membayar hutang yang kuat sekaligus masih besarnya potensi Perseroan untuk mendapatkan dana pinjaman bagi pembiayaan ekspansi di masa depan.

#### 4.2.3.12 Instrumen Keuangan – Hutang Obligasi

Instrumen keuangan dalam penelitian ini merupakan Hutang Obligasi yang masuk dalam kategori Liabilitas Jangka Panjang. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji beda *Wilcoxon Test* terdapat signifikansi *p-value* sebesar  $0,273 > 0,05$  atau  $\alpha$  sebesar 5%, maka kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan sampel cukup bukti bahwa tidak ada perbedaan entitas yang menerapkan metode nilai wajar untuk Instrumen Keuangan – Hutang Obligasi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Berdasarkan pengukuran index-T menggunakan tabel distribusi 4.3 diatas untuk periode 2012-2013 yang menggunakan metode biaya sebanyak 16 perusahaan. Sedangkan yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 30 perusahaan. Sementara untuk periode 2014-2015 yang menggunakan metode biaya sebanyak 12 perusahaan. Sedangkan yang menerapkan metode nilai wajar sebanyak 34 perusahaan sehingga terdapat kenaikan perusahaan yang menerapkan metode

nilai wajar sebesar 4%. Hasil pengukuran menggunakan index-T terjadi kenaikan daya banding 0,068 poin lebih tinggi periode 2014-2015 sebesar 0,614 dibandingkan periode 2012-2013 sebesar 0,546. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sebagian besar perusahaan menerapkan nilai wajar untuk instrumen keuangan hutang obligasi sesudah penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar atau sesudah berlaku adopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) disebabkan, obligasi yang diterbitkan perusahaan dapat dijual kepada investor bagi yang berinvestasi dengan berpartisipasi dalam memberikan pinjaman. Obligasi yang diterbitkan juga dapat dijual kepada bank investasi yang bertindak sebagai agen penjualan dalam proses pemasaran obligasi. Disamping itu obligasi yang diterbitkan juga ditawarkan ke publik untuk dijual. Hasil dari penjualan saat penerbitan, dana yang terkumpul dari investor dan perusahaan akan digunakan untuk tambahan modal kerja, kegiatan usaha dan juga bisa digunakan dana cadangan dengan mengharapkan tambahan imbal hasil dari suku bunga yang berlaku di pasar serta membiayai kembali obligasi jatuh tempo dengan suku bunga pasar untuk menghemat biaya bunga dengan tujuan memperbaiki profil hutang mengingat terjadinya risiko kenaikan biaya operasional perusahaan yang menyebabkan melemahnya nilai tukar.

Dalam sampel penelitian ini, ada beberapa perusahaan yang menggunakan instrumen keuangan hutang obligasi, hal ini disebabkan perusahaan memiliki struktur modal yang cukup baik serta didukung dengan sumber daya keuangan yang mumpuni termasuk pemenuhan *likuiditas* dan *solvabilitas* perusahaan dalam

melunasi seluruh hutangnya pada saat jatuh tempo didukung aset-aset perusahaan baik aset keuangan maupun non keuangan. Selain sampel perusahaan listing di BEI, perusahaan juga memiliki volume transaksi dan kapitalisasi pasar cukup tinggi yang merupakan alasan utama perusahaan meraih pendanaan dari hutang obligasi untuk diterbitkan sebagai tambahan modal kerja.

Beberapa contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini, PT Lippo Karawaci Tbk kode emiten (LPKR) bergerak dalam bidang infrastruktur, menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel guna memberi ruang yang cukup untuk mengantisipasi perubahan atas kondisi ekonomi makro dengan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan optimal. Pada 14 Januari 2013 LPKR menerbitkan obligasi yang jatuh tempo pada 14 November 2020 senilai USD 130.000.000 dengan tingkat bunga 6,125% untuk membiayai kembali obligasi yang jatuh tempo pada 30 April 2015 dengan tingkat bunga 9%. Hasil ini perseroan dapat menghemat biaya bunga dan sekaligus memperbaiki profil hutang. Fasilitas ini menjadi tambahan terhadap USD 273.306.000 (*Senior Global Notes*), dalam rangka program penukaran obligasi pada tanggal 14 November 2012 jatuh tempo sama 14 November 2020, sehingga meningkatkan fasilitas menjadi USD 403.306.000. Obligasi tersebut ditawarkan di harga 104,375 sehingga memiliki imbal hasil akhir 5,24%. LPKR juga berhasil menurunkan rasio hutang terhadap ekuitas dan *net gearing ratio* masing-masing menjadi 0.6 dan 0.4 pada tahun 2014.

LPKR melaksanakan program penukaran obligasi dan menerbitkan obligasi dengan suku bunga pasar ini disebabkan belum dimulainya (*tapering off*)

pengurangan stimulus ekonomi di negara maju Amerika Serikat yang menyebabkan aliran keluar modal investasi yang ditanamkan dari negara berkembang (*emerging market*) ke negara maju sehingga likuiditas pasar masih tetap terjaga. Program pengurangan stimulus ekonomi AS (*tapering off*) baru mulai dilaksanakan pada Triwulan I 2013 yang mulai menunjukkan perbaikan variable makroekonomi AS. Akhir periode 2012 dan awal periode 2013 masih menerapkan kebijakan QE3 (*Quantitative Easing*) yang dimulai pada rentang September 2012 dengan melakukan pembelian *Mortgage-Backed Securities* (MBS) senilai 40 miliar dollar AS per bulan sampai pasar tenaga kerja membaik. Kemudian pada Desember 2012, The Fed mengumumkan penambahan jumlah QE3 menjadi sebesar 85 miliar AS per bulan dengan tambahan pembelian *United State Treasury* (UST) *Bond* sebesar 45 miliar dollar AS. (BI, 2013) Kebijakan *quantitative easing* tersebut selain meredakan tekanan likuiditas juga meningkatkan kepercayaan pelaku pasar dan investor serta menurunkan tingkat risiko. (BI, 2012)

Berikut ini juga ada contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini, PT Gajah Tunggal Tbk kode emiten (GJTL) bergerak dalam bidang industri pembuatan barang-barang dari karet, termasuk ban dalam dan luar untuk segala jenis kendaraan, pada tanggal 6 Februari 2013, Perusahaan menerbitkan *Senior Secured Notes due 2018* (*Notes*) sebesar USD 500.000.000 dengan tingkat bunga 7,75% per tahun. Harga jual *Notes* pada saat penawaran adalah 99,188% dari nominal *Notes* dan tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited dengan DB Trustee (Hong Kong) Limited sebagai Wali Amanat. Penerimaan atas

*Notes* tersebut digunakan untuk pembayaran atas seluruh saldo *Callable Step-Up Guaranteed Secured Bonds due 2014* sebesar USD 435.089.000 yang memiliki kenaikan tingkat bunga 8% - 10,25% per tahun sampai jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2014 atau bertenor 5 tahun sejak diterbitkan pada 21 Juli 2009. Dengan hasil ini perusahaan dapat menghemat biaya bunga sekaligus menghindari kenaikan kupon hingga jatuh tempo pada Juni 2013. Langkah ini mampu mengamankan pembiayaan dalam jangka menengah dengan biaya yang relatif murah. Hal ini bisa dilihat dari kas bersih dari aktivitas pendanaan menurun dari Rp 557 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp 198 miliar pada tahun 2014.

Terjadinya kenaikan daya banding perusahaan dalam menerapkan metode nilai wajar untuk instrumen keuangan hutang obligasi ini disebabkan masih rendahnya suku bunga akibat tertundanya kenaikan suku bunga kebijakan dilakukan oleh *Fed Fund Rate* (FFR) dikarenakan cuaca dingin ekstrim (*big freeze*) yang membekukan sebagian aktivitas ekonomi AS selama triwulan I 2014. Hal ini berdampak pada turunnya risiko arus modal dunia untuk keluar dari negara berkembang (*emerging market*) selain adanya pengurangan stimulus ekonomi (*tapering off*). (BI, 2014)

Kemudian di awal sampai pertengahan tahun 2015, terjadi indikasi perilaku *front loading* yakni pembelian properti dan memasarkannya sebelum terjadinya kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed pada Desember 2015 yang mendorong penjualan rumah sehingga masih rendahnya suku bunga KPR. Hal ini cukup menguntungkan bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi atau

menukarkan obligasi dengan suku bunga pasar untuk membiayai kembali obligasi hingga jatuh tempo dengan suku bunga tinggi di negara berkembang termasuk Indonesia sebagai penghematan biaya bunga. (BI, 2015)

Contoh sampel perusahaan yang mewakili penelitian ini PT Bumi Serpong Damai Tbk kode emiten (BSDE) bergerak dalam bidang pembangunan real estate, pada tanggal 27 April 2015, Global Prime Capital Pte Ltd, entitas anak menerbitkan "*Senior Notes Global Prime Capital*" dengan nilai nominal US\$ 225.000.000. Jatuh Tempo tanggal 27 April 2020 dengan suku bunga tetap untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebesar 6,75%. Bunga dibayar setiap semester mulai 27 Oktober 2015 dan berakhir pada tanggal 27 April 2020. Dana yang diperoleh dari hasil emisi setelah dikurang dengan biaya-biaya emisi digunakan untuk pembebasan tanah, pembangunan properti investasi, pembangunan infrastruktur dan pengembangan real estat lainnya.

Informasi pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan hutang obligasi berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif masuk dalam kategori hierarki nilai wajar Level 1.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara singkat penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dan Dampaknya pada Pilihan Kebijakan Akuntansi di Indonesia studi perbandingan pada Laporan Keuangan Tahunan dari Perusahaan Manufaktur dan Properti & Real Estate terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. Dengan demikian kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya penurunan daya banding menggunakan index-T pada penerapan pengukuran nilai wajar PSAK diantaranya aset tetap, properti investasi, imbalan kerja, aset takberwujud, instrumen keuangan tersedia untuk dijual, instrumen keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan piutang disebabkan perusahaan cenderung menerapkan *historical cost* bertujuan mengantisipasi risiko ketidakpastian arus kas masa depan.
2. Adanya peraturan pajak yang mengenakan pajak final 10% terhadap selisih revaluasi aset tetap yang menjadikan alasan perusahaan enggan menerapkan nilai wajar disebabkan kenaikan pembayaran pajak.
3. Untuk periode 2012-2013 perusahaan cenderung konsisten menerapkan nilai wajar untuk aset tetap, properti investasi, imbalan kerja, aset takberwujud, instrumen keuangan tersedia untuk dijual, instrumen keuangan dimiliki

hingga jatuh tempo, dan piutang disebabkan, adanya kebijakan *quantitative easing*.

4. Untuk instrumen keuangan diperdagangkan, derivatif dan derivatif lindung nilai, instrumen ini cenderung konsisten diterapkan di periode 2014-2015. Hal ini disebabkan suku bunga dan nilai tukar mata uang asing terutama dollar mengalami penurunan disebabkan berakhirnya pengurangan stimulus ekonomi (*tapering off*), adanya cuaca ekstrim, badai *El-Nino*, serta turunnya harga minyak di negara maju.
5. Untuk instrumen keuangan pinjaman ini terjadi penurunan daya banding yakni terjadi perubahan dari metode biaya ke nilai wajar disebabkan tingginya suku bunga di Indonesia pada periode 2012-2014 sehingga perusahaan mempertimbangkan menerapkan nilai wajar suku bunga pasar untuk meminimalisir risiko terjadinya kenaikan suku bunga.
6. Kemudian untuk instrumen keuangan hutang obligasi terjadi kenaikan daya banding lebih tinggi di periode 2014-2015 yang menerapkan nilai wajar, hal ini disebabkan suku bunga dan kurs dollar rendah. Perusahaan dapat memanfaatkan suku bunga dan nilai kurs dollar rendah untuk menerbitkan hutang obligasi sebagai penghematan biaya bunga dan memperbaiki profil hutang.
7. Perusahaan memilih menggunakan metode biaya ini untuk memenuhi seluruh kewajiban hutangnya tepat waktu sebagai perlindungan terhadap kreditur disebabkan tingginya hutang perusahaan. Penerapan metode biaya ini



cenderung mengikuti perubahan pasar sebagai evaluasi bagi investor maupun pemilik perusahaan.

8. Penerapan nilai wajar ini merupakan pilihan tepat bagi kebijakan perusahaan dalam meningkatkan *likuiditas* perusahaan. (Watts & Zimmerman, 1990) menjelaskan bahwa Manajemen akan memilih kebijakan akuntansi meningkatkan laba yang dapat berpengaruh positif terhadap kompensasinya (*bonus hypothesis*) dan menghindari dari pelanggaran persyaratan utang (*debt covenant hypothesis*).
9. Informasi untuk pengukuran nilai wajar ini terdiri dari hierarki atau Input Level 1, Input Level 2 dan Input Level 3. Untuk input Level 1 contoh dalam penelitian ini Instrumen pasar uang surat utang jangka pendek pemerintah AS atau *T-bills*. Informasi pasar dari instrumen keuangan ini langsung bisa diakses oleh perusahaan tanpa adanya penyesuaian.
10. Kemudian untuk input Level 2 contoh dalam penelitian ini adalah instrumen derivatif dengan kontrak suku bunga dan nilai tukar. Informasi pasar dari instrumen ini tidak bisa langsung diakses oleh perusahaan dan perlu adanya penyesuaian terlebih dahulu. Hal ini dipengaruhi oleh lanskap perekonomian yang berbeda-beda, di Indonesia tentu berbeda perekonomian dengan negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, Jepang dan negara eropa lainnya.
11. Input Level 3 informasi pasar dari instrumen ini tidak bisa langsung diakses oleh perusahaan dan tidak ada penyesuaian. Informasi pasar ini hanya diperoleh dari asumsi yang digunakan pelaku pasar seperti contoh dalam

penelitian ini harga keluaran (*exit price*) dari perusahaan yang diakuisisi, ketika perusahaan langsung melakukan pengendalian bisnis setelah akuisisi berarti sudah dianggap wajar.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini yakni tidak semua informasi data berhasil di temukan dan dianalisis dengan tepat terkait penerapan variable pengukuran nilai wajar yang diterapkan ke PSAK yang sudah dijelaskan pada Bab IV Analisa Data dan Pembahasan.

## **5.3 Saran Penelitian Berikutnya**

1. Sehingga disarankan untuk penelitian berikutnya dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait Penerapan Pengukuran Nilai Wajar Investasi Reksadana Pasar Uang dan Pasar Modal maupun Reksadana Syariah karena dari penelitian yang sudah penulis lakukan masih kesulitan menemukan informasi nilai wajar berdasarkan data pasar secara akurat terutama reksadana, sebab reksadana merupakan jenis instrumen keuangan yang dikelola oleh manajer investasi sehingga yang mengetahui informasi jenis instrumen reksadana adalah pemilik perusahaan dan pengelola dana. Penelitian selanjutnya terkait hal ini menggunakan data primer sehingga bisa dikombinasikan data primer dan sekunder agar informasi relevan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan peneliti.
2. Untuk poin 1 diatas bisa dikombinasikan dengan isu terbaru saat ini mengingat isu yang masih berkembang adalah Dampak Pandemi Covid-19

Terhadap Penerapan PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar. Karena informasi yang ditemukan memuat informasi nilai wajar suatu aset dan liabilitas terkait adanya risiko ketidakpastian arus kas pada saat pandemi Covid-19 kemudian bisa dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi Covid-19. Untuk sampel perusahaan dalam penelitian selanjutnya bisa menyesuaikan terhadap isu adanya masalah yang berkembang saat itu. Apabila ada risiko meningkat, yang menjadi uji hasil analisa penelitian adalah bagaimana pelaku pasar dapat mengharapkan tingkat pengembalian sebagai kompensasi ? Kemudian bagaimana cara menyelesaikan seluruh hutangnya sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo ketika perusahaan sedang dalam kondisi finansial yang kurang baik akibat terjadinya ketidakpastian arus kas pada masa pandemi Covid-19 ? Hal ini cukup menarik untuk diuji di penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnil Amri. 2013. "Apa Itu Quantitative Easing ? Apa Itu Tapering ?" Kontan.co.id. <https://fokus.kontan.co.id/news/apa-itu-quantitative-easing-apa-itu-tapering>.
- Ankarath Nandakumar, Kalpesh J. Mehta, Dr. T.P. Ghosh & Dr. Yass A. Alkafaji. 2012. *Memahami IFRS*. Bahasa Indonesia. Jakarta Barat: PT INDEKS Permata Puri Media.
- Astika, I.B. Putra. 2008. "Kontribusi Teori Kepentingan Kelompok Dalam Standar Akuntansi Keuangan (Suatu Kajian Literatur)." *Article 1*: 1–24. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fojs.unud.ac.id%2Findex.php%2Fjiaab%2Farticle%2Fdownload%2F2586%2F1798&ei=kNjoUp7MIsSN7QbugoDwCg&usg=AFQjCNFH9LpEwPGnN3H7TI22MpWgxzkhpA&bvm=bv.60157871,d>.
- BI. 2015. "Bersinergi Mengawal Stabilitas, Mewujudkan Reformasi Struktural." *Laporan Perekonomian Indonesia*, 2015. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI\\_2015.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2015.aspx).
- BI. 2014. "Memperkokoh Stabilitas, Mempercepat Reformasi Struktural Untuk Memperkuat Fundamental Ekonomi." *Laporan Perekonomian Indonesia*. 2014. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI\\_2014.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2014.aspx).
- BI. 2013. "Menjaga Stabilitas, Mendorong Reformasi Struktural Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan." *Laporan Perekonomian Indonesia*, 2013. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI\\_2013.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2013.aspx).
- BI. 2012. "Menjaga Keseimbangan, Mendukung Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan." *Laporan Perekonomian Indonesia*. 2012. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI\\_2012.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2012.aspx).
- Bragg, Steven M. 2012. *Panduan IFRS*. Edited by M.M. Thomas Sumarsan, S.E. Edisi Revisi. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Carletti, Franklin Allen & Elena. 2008. "Mark-to-Market Accounting and Liquidity Pricing." *Journal of Accounting and Economics* Volume 45 (Issues 2-3): 358–78. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.02.005>.
- David Cairns, Dianne Massoudi, Ross Taplin & Ann Tarca. 2011. "IFRS Fair Value Measurement and Accounting Policy Choice in the United Kingdom and Australia." *The British Accounting Review* Volume 43 (Issue 1): 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2010.10.003>.
- Dr. Sony Warsono-bin-Hardono, MAFIS, Akuntan. 2011. *Adopsi Standar Akuntansi IFRS*. Edited by Akuntan Irene Natalia, S. E., M.Sc. Fakta, Dilema dan Matematika. Yogyakarta: AB PUBLISHER.

- Duddy. 2010. "Laporan Keuangan Bank Lokal Masih Terbelakang." detikfinance. 2010. <http://finance.detik.com/read/2010/05/11/170915/1355428/5/laporan-keuangan-bank-lokal-masih-terbelakang>.
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt & Terry D. Warfield. 2007. "Intermediate Accounting." In *Intermediate Accounting 12th Edition*, edited by M..M Suryadi Saat H. Wibi Hardani, 12th ed. John Wiley & Sons, Inc.
- Endrayanto, V. Wiratna Sujarweni & Poly. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- FASB. 1978. "Statement of Financial Accounting Concepts." In *SFAC No 1*.
- Ghazali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edited by Prayogo P. Harto. 5th ed. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gamayuni, Rika. 2009. "Jurnal Akuntansi Dan Keuangan." *The Journal of Accounting and Finance* Volume 14 (ISSN 1410-1831): 117. [http://repository.lppm.unila.ac.id/1443/1/JAk Juli 2009.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/1443/1/JAk%20Juli%202009.pdf).
- IAI. 2019. "Standar Akuntansi Keuangan (SAK)." 2019. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>.
- IAI. 2014. "Standar Akuntansi Keuangan." In *SAK Per Efektif 1 Januari 2015*. Menteng, Jakarta: DSAK IAI.
- IAI. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Menteng, Jakarta: DSAK IAI.
- IASB. 2010. "The Conceptual Framework for Financial Reporting IFRS Foundation." In *IFRS Foundation*.
- IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Edited by IAI. Per 1 Juli. Jagakarsa, Jakarta Selatan: Salemba Empat. <http://www.penerbitsalemba.com>.
- IAI. 2009. "Program Konvergensi." Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. [iaiglobal.or.id](http://iaiglobal.or.id).
- Januarika, Vegy. 2020. "Nilai Nosional vs Nilai Pasar : Apa Bedanya ?" Forex Indonesia. 2020. [https://forexindonesia.info/belajarforex/nilai-nosional-vs-nilai-pasar-apa-perbedaannya.html#:~:text=Nilai nosional adalah jumlah total,satu kontrak dengan harga spot](https://forexindonesia.info/belajarforex/nilai-nosional-vs-nilai-pasar-apa-perbedaannya.html#:~:text=Nilai%20nosional%20adalah%20jumlah%20total,satu%20kontrak%20dengan%20harga%20spot).
- Khomsatun, Siti. 2016. "Penerapan Pengukuran Nilai Wajar PSAK-Konvergensi IFRS Dan Dampaknya Pada Pilihan Kebijakan Akuntansi Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* Vol. 4 No. (ISSN : 2541-061X (Online)): 1–18. <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4031/2898>.
- Kotler & Armstrong. 2008. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Edited by Alexander Sindoro. 12th ed. Jakarta: Erlangga.
- Muqodim. 2005. *Teori Akuntansi*. Sleman Yogyakarta: Ekonisia.

- PMK. 2015. "Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan." In *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 1–13.
- Prof. Dr. H.M. Ma'ruf Abdullah, SH., MM., MSi. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ekonomi, Manajemen, Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edited by Elida Mahriani. Minomartani, Ngaglik, Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Prof Ross H. Taplin. 2011. "Statistical Inference Using the T Index to Quantify the Level of Comparability between Accounts." *Accounting and Business Research* 40 (1): 75–103. <https://doi.org/10.1080/00014788.2010.9663385>.
- Riadi. 2016. *Statistika Penelitian (Analisis Manual Dan IBM SPSS)*. Edited by Th. Arie Prabawati. Yogyakarta: CV Andi Offset. <http://penerbitandi.com/>.
- Riahi, Ahmed & Belkauhi. 2011. "Teori Akuntansi." In *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS*. Edited by Mona. Edisi Lengkap. Bantul: Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Siregar, Farahmita &. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemungkinan Perusahaan Memilih Metode Nilai Wajar Untuk Properti Investasi." *SNA 17 Universitas Mataram*.
- Taplin, Ross H. 2004. "A Unified Approach to the Measurement of International Accounting Harmony." *Accounting and Business Research* 34 (1), 57. <https://doi.org/10.1080/00014788.2004.9729951>.
- Watts, Ross L., and Jerold L. Zimmerman. 1990. "Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective." *The Accounting Review* 65 (1): 131–56.



# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### Surat Izin Survei & Riset Penelitian dari TICMI



### SURAT IZIN SURVEI & RISET

No.SISR-11401/ICaMEL/11-2020

Menunjuk surat nomor 1520/DEK/10/Div.URT/XI/2020 tanggal 17 November 2020 perihal permohonan izin penelitian bagi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia bersama ini kami memberikan izin mengakses dan menggunakan data-data pasar modal yang tersimpan di perusahaan kami untuk keperluan riset dan penyusunan Skripsi kepada peneliti di bawah ini:

Nama Pemohon : Hidayat Wahyu Pradana  
Nomor Pokok : 14312625  
Jurusan/Prog.Studi : S1 Akuntansi  
Judul Skripsi : Penerapan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar Konvergensi IFRS  
(International Financial Reporting Standards) dan Dampaknya pada  
Pilihan Kebijakan Akuntansi di Indonesia

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2020

PT Indonesian Capital Market Electronic  
Library

**Hery Mulyawan**  
Head of Data Services

SALINAN SESUAI ASLINYA



## LAMPIRAN 2

### Daftar Data Sampel Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan	Tahun Terdaftar	Sektor Industri
1	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	2 Oktober 1989	Basic Industry and Chemicals
2	SMCB	Holcim Indonesia Tbk	8 Agustus 1977	Basic Industry and Chemicals
3	SMGR	Semen Indonesia Tbk	4 Juli 1991	Basic Industry and Chemicals
4	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk	18 Desember 2000	Basic Industry and Chemicals
5	ARNA	Arwana Citramulia Tbk	17 Juli 2001	Basic Industry and Chemicals
6	IKAI	Intikeramik Alamasri Industri Tbk	4 Juni 1997	Basic Industry and Chemicals
7	KIAS	Keramika Indonesia Asosiasi Tbk	9 Juli 1997	Basic Industry and Chemicals
8	MLIA	Mulia Industrindo Tbk	29 Mei 1996	Basic Industry and Chemicals
9	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk	30 Oktober 1990	Basic Industry and Chemicals
10	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk	12 Juli 1990	Basic Industry and Chemicals
11	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk	2 Januari 1997	Basic Industry and Chemicals
12	BAJA	Saranacentral Bajatama Tbk	21 Desember 2011	Basic Industry and Chemicals
13	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk	18 Juli 2001	Basic Industry and Chemicals
14	CTBN	Citra Tubindo Tbk	28-Nov-89	Basic Industry and Chemicals
15	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk	23 Desember 2009	Basic Industry and Chemicals
16	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk	5 Desember 1994	Basic Industry and Chemicals
17	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	22 Februari 2013	Basic Industry and Chemicals
18	JKSW	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	6 Agustus 1997	Basic Industry and Chemicals
19	JPRS	Jaya Pari Steel Tbk	4 Agustus 1989	Basic Industry and Chemicals
20	KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk	10-Nov-10	Basic Industry and Chemicals
21	LION	Lion Metal Works Tbk	1996	Basic Industry and Chemicals
22	LMSH	Lionmesh Prima Tbk	1995	Basic Industry and Chemicals
23	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk	14 Desember 2009	Basic Industry and Chemicals
24	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk	29 Agustus 1996	Basic Industry and Chemicals
25	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk	06-Apr-90	Basic Industry and Chemicals
26	BRPT	Barito Pacific Tbk	14-Nov-07	Basic Industry and Chemicals
27	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk	8 Mei 1995	Basic Industry and Chemicals
28	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	8 Agustus 1990	Basic Industry and Chemicals
29	EKAD	Ekadharma International Tbk	10 Juni 1991	Basic Industry and Chemicals
30	INCI	Intanwijaya International Tbk	1 Juni 1990	Basic Industry and Chemicals
31	SRSN	Indo Acidatama Tbk	2 Desember 1992	Basic Industry and Chemicals
32	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk	14 Juni 1996	Basic Industry and Chemicals
33	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk	28-Sep-89	Basic Industry and Chemicals

34	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk	18 Desember 1992	Basic Industry and Chemicals
35	APLI	Asiaplast Industries Tbk	31 Maret 2000	Basic Industry and Chemicals
36	BRNA	Berlina Tbk	15-Nov-89	Basic Industry and Chemicals
37	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk	27 Februari 2002	Basic Industry and Chemicals
38	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk	29 Oktober 1990	Basic Industry and Chemicals
39	TALF	Tunas Alfin Tbk	1 Desember 2007	Basic Industry and Chemicals
40	TRST	Trias Senyosa Tbk	22 Mei 1990	Basic Industry and Chemicals
41	YPAS	Yanaprima Hastapersada Tbk	5 Maret 2008	Basic Industry and Chemicals
42	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1991	Basic Industry and Chemicals
43	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	23 Oktober 1989	Basic Industry and Chemicals
44	MAIN	Malindo Feedmill Tbk	27 Januari 2006	Basic Industry and Chemicals
45	SIPD	Sierad Produce Tbk	29-Nov-96	Basic Industry and Chemicals
46	SULI	SLJ. Global Tbk	1994	Basic Industry and Chemicals
47	TIRT	Tirta Mahakam Resources Tbk	18-Nov-99	Basic Industry and Chemicals
48	ALDO	Alkindo Naratama Tbk	12 Juli 2011	Basic Industry and Chemicals
49	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk	19 Desember 1994	Basic Industry and Chemicals
50	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	16 Juli 1990	Basic Industry and Chemicals
51	INRU	Toba Pulp Lestari Tbk	7 Juni 1991	Basic Industry and Chemicals
52	KBRI	Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	30 Juni 2008	Basic Industry and Chemicals
53	SPMA	Suparma Tbk	15-Nov-94	Basic Industry and Chemicals
54	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	03-Apr-90	Basic Industry and Chemicals
55	ASII	Astra International Tbk	1990	Miscellaneous Industry
56	AUTO	Astra Otoparts Tbk	15 Juni 1998	Miscellaneous Industry
57	BRAM	Indo Kordsa Tbk	20 Juli 1990	Miscellaneous Industry
58	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk	10-Nov-80	Miscellaneous Industry
59	GJTL	Gajah Tunggal Tbk	15 Maret 1990	Miscellaneous Industry
60	IMAS	Indomobil Sukses International Tbk	1993	Miscellaneous Industry
61	INDS	Indospring Tbk	26 Juni 1990	Miscellaneous Industry
62	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk	1991	Miscellaneous Industry
63	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk	30 Mei 2005	Miscellaneous Industry
64	SMSM	Selamat Sempurna Tbk	31 Juli 2000	Miscellaneous Industry
65	ADMG	Polychem Indonesia Tbk	21 Oktober 1993	Miscellaneous Industry
66	ARGO	Argo Pantas Tbk	7 Januari 1991	Miscellaneous Industry
67	ERTX	Eratex Djaja Tbk	21 Agustus 1990	Miscellaneous Industry
68	ESTI	Ever Shine Tex Tbk	13 Oktober 1992	Miscellaneous Industry
69	HDTX	Panasia Indo Resources Tbk	6 Juni 1990	Miscellaneous Industry
70	INDR	Indo Rama Synthetics Tbk	12 Juni 1990	Miscellaneous Industry
71	MYTX	Asia Pacific Investama Tbk	2 Juli 1990	Miscellaneous Industry

72	PBRX	Pan Brothers Tbk	16 Agustus 1990	Miscellaneous Industry
73	POLY	Asia Pacific Fibers Tbk	14 Desember 1990	Miscellaneous Industry
74	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk	22 Januari 1998	Miscellaneous Industry
75	SSTM	Sunson Textile Manufacture Tbk	28 Juli 1997	Miscellaneous Industry
76	TFCO	Tifico Fiber Indonesia Tbk	26 Februari 1980	Miscellaneous Industry
77	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk	28 Maret 2002	Miscellaneous Industry
78	BATA	Sepatu Bata Tbk	24 Maret 1982	Miscellaneous Industry
79	JECC	Jembo Cable Company Tbk	18-Nov-92	Miscellaneous Industry
80	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk	6 Juli 1992	Miscellaneous Industry
81	KBLM	Kabelindo Murni Tbk	1992	Miscellaneous Industry
82	VOKS	Voksel Electric Tbk	20 Desember 1990	Miscellaneous Industry
83	PTSN	Sat Nusapersada Tbk	08-Nov-07	Miscellaneous Industry
84	ADES	Akasha Wira International Tbk	2 Mei 1994	Consumer Goods Industry
85	DLTA	Delta Djakarta Tbk	1984	Consumer Goods Industry
86	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7 Oktober 2010	Consumer Goods Industry
87	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	17 Mei 1994	Consumer Goods Industry
88	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	3 Desember 2007	Consumer Goods Industry
89	MYOR	Mayora Indah Tbk	4 Juli 1990	Consumer Goods Industry
90	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk	28 Juni 2010	Consumer Goods Industry
91	SKLT	Sekar Laut Tbk	08-Sep-93	Consumer Goods Industry
92	STTP	Siantar Top Tbk	25-Nov-96	Consumer Goods Industry
93	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	15 Mei 1990	Consumer Goods Industry
94	GGRM	Gudang Garam Tbk	3 Desember 2007	Consumer Goods Industry
95	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk	1990	Consumer Goods Industry
96	RMBA	Bentoel International Investama Tbk	1 Januari 2010	Consumer Goods Industry
97	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk	12 Oktober 1994	Consumer Goods Industry
98	INAF	Indofarma Tbk	30 Maret 2001	Consumer Goods Industry
99	KAEF	Kimia Farma Tbk	4 Juli 2001	Consumer Goods Industry
100	KLBF	Kalbe Farma Tbk	30 Juli 1991	Consumer Goods Industry
101	MERK	Merck Tbk	23 Juni 1981	Consumer Goods Industry
102	PYFA	Pyridam Farma Tbk	27-Sep-01	Consumer Goods Industry
103	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk	18-Apr-90	Consumer Goods Industry
104	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk	24 Mei 1994	Consumer Goods Industry
105	MRAT	Mustika Ratu Tbk	28 Juni 1985	Consumer Goods Industry
106	TCID	Mandom Indonesia Tbk	28 Agustus 1993	Consumer Goods Industry
107	KICI	Kedaung Indah Can Tbk	28 Oktober 1993	Consumer Goods Industry
108	LMPI	Langgeng Makmur Industri Tbk	1994	Consumer Goods Industry
109	APLN	Agung Podomoro Land Tbk	11-Nov-10	Property & Real Estate

110	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	18 Desember 2007	Property & Real Estate
111	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk	14 Januari 2008	Property & Real Estate
112	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	10-Apr-12	Property & Real Estate
113	BIPP	Bhuwanatala Indah Permai Tbk	26 Juni 1989	Property & Real Estate
114	BKSL	Sentul City Tbk	28 Juli 1997	Property & Real Estate
115	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk	6 Juni 2008	Property & Real Estate
116	COWL	Cowell Development Tbk	19 Desember 2007	Property & Real Estate
117	CTRA	Ciputra Development Tbk	28 Maret 1994	Property & Real Estate
118	DART	Duta Anggada Realty Tbk	8 Mei 1990	Property & Real Estate
119	DILD	Intiland Development Tbk	21 Oktober 1989	Property & Real Estate
120	DUTI	Duta Pertiwi Tbk	02-Nov-94	Property & Real Estate
121	GAMA	Gading Development Tbk	29 Juni 2012	Property & Real Estate
122	GMTD	Gowa Makassar Tourism Development Tbk	16 Juni 2000	Property & Real Estate
123	GPRA	Perdana Gapura Prima Tbk	10 Oktober 2007	Property & Real Estate
124	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk	23 Desember 2011	Property & Real Estate
125	JRPT	Jaya Real Property Tbk	29 Juni 1994	Property & Real Estate
126	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk	10 Januari 1995	Property & Real Estate
127	LAMI	Lamicitra Nusantara Tbk	29 Juni 2001	Property & Real Estate
128	LPCK	Lippo Cikarang Tbk	24 Juli 1997	Property & Real Estate
129	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	28 Juni 1996	Property & Real Estate
130	MDLN	Modernland Realty Tbk	18 Januari 1993	Property & Real Estate
131	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk	29 Juni 2009	Property & Real Estate
132	MTLA	Metropolitan Land Tbk	20 Juni 2011	Property & Real Estate
133	OMRE	Indonesia Prima Property Tbk	22 Agustus 1994	Property & Real Estate
134	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk	15 Juni 1992	Property & Real Estate
135	PWON	Pakuwon Jati Tbk	9 Oktober 1989	Property & Real Estate
136	RBMS	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk	19 Desember 1997	Property & Real Estate
137	RDTX	Roda Vivatex Tbk	03-Apr-90	Property & Real Estate
138	SMRA	Summarecon Agung Tbk	14 Agustus 1996	Property & Real Estate
139	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk	18-Sep-95	Property & Real Estate

### LAMPIRAN 3

#### Hasil Pengukuran Indeks Taplin

Keterangan

CM : "Cost Method" (Metode Biaya)

DC : "Deemed Cost" (Peralihan ke Metode Biaya)

FV : "Fair Value" (Nilai Wajar)

NA : "Not Applicable" (Tidak menerapkan metode/Keluar dari sampel)

No	Kode	Aset Tetap															
		2012				2013				2014				2015			
		CM	DC	FV	NA	CM	DC	FV	NA	CM	DC	FV	NA	CM	DC	FV	NA
1	INTP	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
2	SMGR	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
3	SMCB	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
4	AMFG	0.5	0.5			0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
5	ARNA	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
6	IKAI			1				1				1		0.5	0.5		
7	KIAS	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
8	MLIA			1				1				1				1	
9	TOTO	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
10	ALKA	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
11	ALMI	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
12	BAJA	0.5		0.5		1				1				1			
13	BTON	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
14	CTBN	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		1			
15	GDST	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
16	INAI	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5				1	
17	ISSP			1				1				1				1	
18	JKSW	1				1				1				1			
19	JPRS	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
20	KRAS	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5				1	
21	LION	1				1				1				1			
22	LMSH	1				1				1				1			
23	NIKL	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5				1	
24	PICO	1				1				1				1			
25	TBMS	1				1				1				1			

26	BRPT		1			1			1				1		
27	BUDI	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5					1
28	DPNS	1				1				1			1		
29	EKAD	1				1				1			1		
30	INCI	1				1				1			1		
31	SRSN	1						1				1			1
32	TPIA		1				1			1				1	
33	UNIC	1				1				1			1		
34	AKPI	1				1				1			1		
35	APLI	1				1				1			1		
36	BRNA	1				1				1					1
37	FPNI	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			0.5		0.5
38	IGAR	1				1				1			1		
39	TALF	1				1				1			1		
40	TRST	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			0.5		0.5
41	YPAS	0.5		0.5		0.5		0.5		1			1		
42	CPIN	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			0.5		0.5
43	JPFA			1		1				1					1
44	MAIN	1				1				1			1		
45	SIPD	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			0.5		0.5
46	SULI	1				1				1					1
47	TIRT	1						1				1			1
48	ALDO	1				1				1			1		
49	FASW	1				1				1					1
50	INKP	1				1				1			1		
51	INRU	1				1				1			1		
52	KBRI	1				1				1			1		
53	SPMA	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			0.5		0.5
54	TKIM	1				1				1			1		
55	ASII	0.5		0.5				1				1	0.5		0.5
56	AUTO	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			0.5		0.5
57	BRAM	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			0.5		0.5
58	GDYR	1				1				1			0.5		0.5
59	GJTL	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			0.5		0.5
60	IMAS	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			0.5		0.5
61	INDS			1				1				1			1
62	LPIN	1				1				1			1		
63	MASA	1				0.5		0.5		0.5			0.5		0.5

64	SMSM	1			1			1			1		
65	ADMG	1			1			1			1		
66	ARGO	1			1			1			1		
67	ERTX	1			1			1			1		
68	ESTI	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
69	HDTX	1			1			1			1		
70	INDR	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
71	MYTX	1			0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
72	PBRX	1			0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
73	POLY	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
74	RICY	1			1			1			1		
75	SSTM	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
76	TFCO	0.5	0.5		1			0.5	0.5		0.5	0.5	
77	UNIT	1			1			1			1		
78	BATA	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
79	JECC	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5				1
80	KBLI	1			1			1			1		
81	KBLM	1			1			1			1		
82	VOKS	1			1			1			1		
83	PTSN	1			1			1			1		
84	ADES	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
85	DLTA	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
86	ICBP	1			1			0.5	0.5		0.5	0.5	
87	INDF	1			0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
88	MLBI	1			1			1			1		
89	MYOR	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
90	ROTI	1			1			1			1		
91	SKLT	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
92	STTP	1			1			1			1		
93	ULTJ	1			1			0.5	0.5		0.5	0.5	
94	GGRM	1			1			1			1		
95	HMSP	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
96	RMBA	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
97	DVLA	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
98	INAF		1			1			1			1	
99	KAEF	1			1			1			1		
100	KLBF	1			1			1			1		
101	MERK	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	

102	PYFA	1			1			1			1		
103	SCPI	0.5	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5
104	TSPC	1			1			1			1		
105	MRAT	1			1			1			1		
106	TCID	1			1			1			1		
107	KICI	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5				1
108	LMPI	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
109	APLN	0.5	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5
110	ASRI		1			1			1			1	
111	BAPA	1			1			1			1		
112	BEST	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
113	BIPP	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
114	BKSL	1			1			1			0.5		0.5
115	BSDE	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
116	COWL	1			1			1			1		
117	CTRA	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
118	DART	0.5	0.5		1			1			1		
119	DILD	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
120	DUTI	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
121	GAMA	1			1			1			1		
122	GMTD	1			1			1			1		
123	GPRA	1			1			1			1		
124	GWSA	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
125	JRPT	1			1			1			1		
126	KIJA	1			1			1			1		
127	LAMI	1			1			1			1		
128	LPCK	1			1			1			0.5		0.5
129	LPKR	1			0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
130	MDLN	1			1			0.5	0.5		0.5		0.5
131	MKPI	1			1			1			1		
132	MTLA	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
133	OMRE	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
134	PLIN	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
135	PWON	1			1			0.5	0.5		0.5		0.5
136	RBMS	1			1			1					1
137	RDTX	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
138	SMRA	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5		0.5
139	SMDM		1				1			1			1



No	Kode	Imbalan Kerja											
		2012			2013			2014			2015		
		CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA
1	INTP	1			1			1			1		
2	SMGR		1			1			1			1	
3	SMCB		1			1			1			1	
4	AMFG		1			1			1			1	
5	ARNA	1			1			1			1		
6	IKAI	1			1			1			1		
7	KIAS	1			1			1			1		
8	MLIA	1			1			1			1		
9	TOTO	1			1			1			1		
10	ALKA	1			1			1			1		
11	ALMI	1			1			1			1		
12	BAJA	1			1			1			1		
13	BTON	1			1			1			1		
14	CTBN	1			1			1			1		
15	GDST	1			1			1			1		
16	INAI	1			1			1			1		
17	ISSP	1			1			1			1		
18	JKSW	1			1			1			1		
19	JPRS	1			1			1			1		
20	KRAS	1			1			1				1	
21	LION	1			1			1			1		
22	LMSH	1			1			1			1		
23	NIKL	1			1			1			1		
24	PICO	1			1			1			1		
25	TBMS	1			1			1			1		
26	BRPT		1			1			1			1	
27	BUDI	1			1			1			1		
28	DPNS	1			1			1			1		
29	EKAD	1			1			1			1		
30	INCI	1			1			1			1		
31	SRSN	1			1			1			1		
32	TPIA		1			1			1			1	
33	UNIC	1			1			1			1		
34	AKPI	1			1			1			1		
35	APLI	1			1			1			1		

36	BRNA	1			1			1			1		
37	FPNI	1			1			1			1		
38	IGAR	1			1			1			1		
39	TALF	1			1			1			1		
40	TRST	1			1			1			1		
41	YPAS	1			1			1			1		
42	CPIN	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
43	JPFA	1			1			1			1		
44	MAIN	1			1			1			1		
45	SIPD	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
46	SULI	1			1			1			1		
47	TIRT	1			1			1			1		
48	ALDO	1			1			1			1		
49	FASW	1			1			1			1		
50	INKP	1			1			1			1		
51	INRU	1			1			1			1		
52	KBRI	1			1			1			1		
53	SPMA	1			1			1			1		
54	TKIM	1			1			1			1		
55	ASII		1			1			1			1	
56	AUTO		1			1			1			1	
57	BRAM	1				1			1			1	
58	GDYR		1			1			1			1	
59	GJTL	1			1			1			1		
60	IMAS	1			1			1			1		
61	INDS	1			1			1			1		
62	LPIN	1			1			1			1		
63	MASA	1			1			1			1		
64	SMSM	1			1			1			1		
65	ADMG	1			1			1			1		
66	ARGO	1			1			1			1		
67	ERTX	1			1			1			1		
68	ESTI	1			1			1			1		
69	HDTX	1			1			1			1		
70	INDR	1			1			1			1		
71	MYTX	1			1			1			1		
72	PBRX	1			1			1			1		
73	POLY	1			1			1			1		

74	RICY	1			1			1			1		
75	SSTM	1			1			1			1		
76	TFCO	1			1			1			1		
77	UNIT	1			1			1			1		
78	BATA	1			1			1			1		
79	JECC	1			1			1			1		
80	KBLI	1			1			1			1		
81	KBLM	1			1			1			1		
82	VOKS	1			1			1			1		
83	PTSN	1			1			1			1		
84	ADES	1			1			1			1		
85	DLTA		1			1			1			1	
86	ICBP	1			1			0.5	0.5		0.5	0.5	
87	INDF	1			0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
88	MLBI	1			1			1				1	
89	MYOR	1			1			1			1		
90	ROTI	1			1			1			1		
91	SKLT	1			1			1			1		
92	STTP	1			1			1			1		
93	ULTJ	1			1			1			1		
94	GGRM	1			1			1			1		
95	HMSP	1			1			1			1		
96	RMBA	1			1			1			1		
97	DVLA		1			1			1			1	
98	INAF	1			1			1			1		
99	KAEF	1			1			1			1		
100	KLBF	1			1			1			1		
101	MERK	1			1			1			1		
102	PYFA	1			1			1			1		
103	SCPI	1			1			1			1		
104	TSPC	1			1			1			1		
105	MRAT	1			1			1			1		
106	TCID		1			1			1			1	
107	KICI	1			1			1			1		
108	LMPI	1			1			1			1		
109	APLN	1			1			1			1		
110	ASRI	1			1			1			1		
111	BAPA	1			1			1			1		

112	BEST	1			1			1			1		
113	BIPP	1			1			1			1		
114	BKSL	1			1			1			0.5	0.5	
115	BSDE	1			1			1			1		
116	COWL	1			1			1			1		
117	CTRA	1			1			1				1	
118	DART	1			1			1			1		
119	DILD	1			1			1			1		
120	DUTI	1			1			1			1		
121	GAMA	1			1			1			1		
122	GMTD	1			1			1			1		
123	GPRA	1			1			1			1		
124	GWSA	1			1			1			1		
125	JRPT	1			1			1			1		
126	KIJA	1			1			1			1		
127	LAMI	1			1			1			1		
128	LPCK	1			1			1			1		
129	LPKR	1			1			1			1		
130	MDLN	1			1			0.5	0.5		0.5	0.5	
131	MKPI	1			1			1			1		
132	MTLA		1			1			1			1	
133	OMRE	1			1			1			1		
134	PLIN	1			1			1			1		
135	PWON	1			1			0.5	0.5		0.5	0.5	
136	RBMS	1			1			1			1		
137	RDTX	1			1			1			1		
138	SMRA	1			1			1			1		
139	SMDM	1			1			1			1		

No	Kode	Properti Investasi															
		2012				2013				2014				2015			
		CM	DC	FV	NA	CM	DC	FV	NA	CM	DC	FV	NA	CM	DC	FV	NA
1	INTP	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
2	SMGR	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
3	SMCB				1				1				1				1
4	AMFG				1				1				1				1
5	ARNA				1				1				1				1
6	IKAI				1				1				1				1
7	KIAS				1				1				1				1
8	MLIA				1				1				1				1
9	TOTO				1				1				1				1
10	ALKA				1				1				1				1
11	ALMI				1				1				1				1
12	BAJA				1				1				1				1
13	BTON				1				1				1				1
14	CTBN				1				1				1				1
15	GDST			1				1				1				1	
16	INAI	0.5		0.5		0.5		0.5				1		0.5		0.5	
17	ISSP				1				1				1	1			
18	JKSW				1				1				1				1
19	JPRS	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
20	KRAS				1				1				1				1
21	LION				1				1				1				1
22	LMSH	1				1				1				1			
23	NIKL				1				1				1				1
24	PICO				1				1				1				1
25	TBMS				1				1				1				1
26	BRPT	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
27	BUDI				1				1				1				1
28	DPNS	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
29	EKAD				1				1				1				1
30	INCI				1				1				1				1
31	SRSN	0.5		0.5				1				1				1	
32	TPIA				1				1				1				1
33	UNIC				1				1				1				1
34	AKPI				1				1				1				1
35	APLI				1				1				1				1

36	BRNA				1			1				1				1
37	FPNI				1			1				1				1
38	IGAR				1			1				1				1
39	TALF	1				1			1				1			
40	TRST				1			1				1				1
41	YPAS				1			1				1				1
42	CPIN				1			1				1				1
43	JPFA	1				1			1				1			
44	MAIN				1			1				1				1
45	SIPD				1			1				1				1
46	SULI				1			1				1				1
47	TIRT				1			1				1				1
48	ALDO				1			1				1				1
49	FASW				1			1				1				1
50	INKP				1			1				1				1
51	INRU				1			1				1				1
52	KBRI				1			1				1				1
53	SPMA				1			1				1				1
54	TKIM				1			1				1				1
55	ASII			1				1			1				1	
56	AUTO			1				1			1				1	
57	BRAM			1				1			1				1	
58	GDYR				1			1				1				1
59	GJTL				1			1			1				1	
60	IMAS				1			1				1			1	
61	INDS			1				1		1					1	
62	LPIN	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5
63	MASA				1			1				1				1
64	SMSM			1				1				1				1
65	ADMG				1			1				1				1
66	ARGO				1			1				1				1
67	ERTX				1			1				1				1
68	ESTI				1			1				1				1
69	HDTX				1			1				1				1
70	INDR				1			1				1				1
71	MYTX				1			1				1				1
72	PBRX				1			1				1				1
73	POLY				1			1				1				1

74	RICY			1			1			1			1		
75	SSTM				1			1				1			1
76	TFCO	1				1			1				1		
77	UNIT				1			1				1			1
78	BATA				1			1				1			1
79	JECC				1			1				1			1
80	KBLI				1			1				1			1
81	KBLM				1			1				1			1
82	VOKS				1			1				1			1
83	PTSN				1			1				1			1
84	ADES	1						1				1			1
85	DLTA				1			1				1			1
86	ICBP				1			1				1			1
87	INDF				1			1				1		1	
88	MLBI				1			1				1			1
89	MYOR				1			1				1			1
90	ROTI				1			1				1			1
91	SKLT				1			1				1			1
92	STTP	1				1			1				1		
93	ULTJ				1			1				1			1
94	GGRM				1			1				1			1
95	HMSP	1				0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	0.5
96	RMBA				1			1				1			1
97	DVLA				1			1				1			1
98	INAF				1			1				1		1	
99	KAEF				1			1				1			1
100	KLBF				1			1				1			1
101	MERK			1				1				1			1
102	PYFA				1			1				1			1
103	SCPI				1			1				1			1
104	TSPC				1			1				1			1
105	MRAT	1				1			1				1		
106	TCID				1			1				1			1
107	KICI	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	0.5
108	LMPI				1			1				1			1
109	APLN	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	0.5
110	ASRI	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	0.5
111	BAPA				1			1				1			1

112	BEST				1				1	1				0.5		0.5	
113	BIPP	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		1			
114	BKSL				1				1				1			1	
115	BSDE	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
116	COWL				1				1				1				1
117	CTRA	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
118	DART	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
119	DILD	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
120	DUTI	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
121	GAMA				1	1				1						1	
122	GMTD				1				1				1				1
123	GPRA	1				1				1				1			
124	GWSA	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5				1	
125	JRPT	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
126	KIJA	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
127	LAMI				1	1				1				1			
128	LPCK	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
129	LPKR	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
130	MDLN				1				1				1				1
131	MKPI	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
132	MTLA	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
133	OMRE	1				1				1				1			
134	PLIN	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
135	PWON	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
136	RBMS				1				1				1				1
137	RDTX	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
138	SMRA	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
139	SMDM				1				1	1				1			



No	Kode	Aset Tak Berwujud															
		2012				2013				2014				2015			
		CM	DC	FV	NA	CM	DC	FV	NA	CM	DC	FV	NA	CM	DC	FV	NA
1	INTP	1				1				1				1			
2	SMGR			1				1				1				1	
3	SMCB				1				1				1				1
4	AMFG				1				1	1				1			
5	ARNA				1				1				1				1
6	IKAI				1				1				1				1
7	KIAS				1				1				1	1			
8	MLIA				1				1				1				1
9	TOTO				1				1				1				1
10	ALKA				1				1				1				1
11	ALMI				1				1				1				1
12	BAJA				1				1				1				1
13	BTON				1				1				1				1
14	CTBN				1				1				1				1
15	GDST				1				1				1				1
16	INAI	1				1				1				1			
17	ISSP	1				1				1				1			
18	JKSW				1				1				1				1
19	JPRS				1				1				1				1
20	KRAS				1				1				1				1
21	LION				1				1				1				1
22	LMSH				1				1				1				1
23	NIKL				1				1				1				1
24	PICO				1				1				1				1
25	TBMS				1				1				1				1
26	BRPT				1				1				1				1
27	BUDI				1				1				1				1
28	DPNS				1				1				1				1
29	EKAD	1				1							1				1
30	INCI				1				1				1				1
31	SRSN	1				1				1				1			
32	TPIA				1				1				1				1
33	UNIC				1				1				1				1
34	AKPI				1	1				1				1			
35	APLI				1				1				1				1

36	BRNA	1				1				1				1			
37	FPNI				1	1				1				1			
38	IGAR				1				1				1				1
39	TALF	1				1				1				1			
40	TRST				1				1				1				1
41	YPAS				1				1				1				1
42	CPIN				1				1				1			1	
43	JPFA				1				1				1				1
44	MAIN				1				1				1				1
45	SIPD			1				1				1				1	
46	SULI				1				1				1				1
47	TIRT				1				1				1				1
48	ALDO				1				1				1				1
49	FASW	1				1				1				1			
50	INKP				1				1				1				1
51	INRU				1				1				1				1
52	KBRI				1				1				1				1
53	SPMA				1				1				1				1
54	TKIM				1				1				1				1
55	ASII	1				1				1				1			
56	AUTO	1				1				1				1			
57	BRAM				1				1				1	1			
58	GDYR				1	1				1				1			
59	GJTL				1				1				1				1
60	IMAS				1				1				1				1
61	INDS				1				1				1				1
62	LPIN				1				1				1	1			
63	MASA				1				1			1		1			
64	SMSM				1				1				1				1
65	ADMG				1				1				1				1
66	ARGO				1				1				1				1
67	ERTX	1				1							1	1			
68	ESTI				1				1				1				1
69	HDTX				1				1				1				1
70	INDR				1				1				1				1
71	MYTX				1				1				1				1
72	PBRX				1			1				1				1	
73	POLY	1				1				1				1			

74	RICY	1				1				1				1			
75	SSTM					1				1				1			1
76	TFCO					1				1				1			1
77	UNIT					1				1				1			1
78	BATA					1				1				1			1
79	JECC					1				1				1			1
80	KBLI					1				1				1			1
81	KBLM					1				1				1			1
82	VOKS					1				1				1			1
83	PTSN					1				1				1			1
84	ADES					1				1	1			1			
85	DLTA					1				1				1			1
86	ICBP	1												1			1
87	INDF	1								1				1			1
88	MLBI					1				1				1			1
89	MYOR					1				1				1			1
90	ROTI	1								1				1			
91	SKLT					1				1				1			1
92	STTP					1				1				1			1
93	ULTJ	1								1				1			
94	GGRM					1				1				1			1
95	HMSP					1				1				1			1
96	RMBA					1				1				1			1
97	DVLA	1								1				1			
98	INAF	1								1				1			
99	KAEF	1								1				1			
100	KLBF	1								1				1			
101	MERK	1								1				1			
102	PYFA	1								1				1			
103	SCPI	1								1				1			
104	TSPC					1				1				1			1
105	MRAT					1				1				1			1
106	TCID					1				1				1			1
107	KICI					1				1				1			1
108	LMPI					1				1				1			1
109	APLN					1				1				1			1
110	ASRI					1				1				1			1
111	BAPA					1				1				1			1

112	BEST				1				1				1				1
113	BIPP				1				1				1				1
114	BKSL	1				1				1						1	
115	BSDE	1				1				1				1			
116	COWL	1				1				1				1			
117	CTRA				1					1				1			1
118	DART				1					1				1			1
119	DILD				1					1				1			1
120	DUTI				1					1				1			1
121	GAMA				1					1				1			1
122	GMTD				1					1				1			1
123	GPRA				1					1				1			1
124	GWSA				1					1				1			1
125	JRPT				1					1				1			1
126	KIJA				1					1				1			1
127	LAMI	1				1				1				1			
128	LPCK				1					1				1			1
129	LPKR	1				1				1				1			
130	MDLN				1					1				1			1
131	MKPI				1					1				1			1
132	MTLA				1					1				1			1
133	OMRE				1					1				1			1
134	PLIN	1								1				1			1
135	PWON				1	1							1				1
136	RBMS				1					1				1			1
137	RDTX				1					1				1			1
138	SMRA				1					1				1			1
139	SMDM				1					1				1			1

No	Kode	Instrumen Keuangan Derivatif											
		2012			2013			2014			2015		
		CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA
1	INTP			1			1			1			1
2	SMGR			1			1			1			1
3	SMCB			1			1			1			1
4	AMFG			1			1			1			1
5	ARNA			1			1			1			1
6	IKAI			1			1			1			1
7	KIAS			1			1			1			1
8	MLIA			1			1			1			1
9	TOTO			1			1			1			1
10	ALKA			1			1			1			1
11	ALMI			1			1			1			1
12	BAJA			1			1			1			1
13	BTON			1			1			1			1
14	CTBN			1			1			1			1
15	GDST			1			1			1			1
16	INAI			1			1			1			1
17	ISSP			1			1			1			1
18	JKSW			1			1			1			1
19	JPRS			1			1			1			1
20	KRAS		1			1			1			1	
21	LION			1			1			1			1
22	LMSH			1			1			1			1
23	NIKL			1			1			1			1
24	PICO			1			1			1			1
25	TBMS			1			1			1			1
26	BRPT		1			1			1			1	
27	BUDI			1			1			1			1
28	DPNS			1			1			1			1
29	EKAD			1			1			1			1
30	INCI			1			1			1			1
31	SRSN			1			1			1			1
32	TPIA		1			1			1			1	
33	UNIC		1			1			1			1	
34	AKPI			1			1			1			1
35	APLI			1			1			1			1

36	BRNA			1			1			1			1
37	FPNI		1				1			1			1
38	IGAR			1			1			1			1
39	TALF			1			1			1			1
40	TRST			1			1			1			1
41	YPAS			1			1			1			1
42	CPIN		1				1			1			1
43	JPFA			1			1			1			1
44	MAIN			1			1			1		1	
45	SIPD			1			1			1			1
46	SULI			1			1			1			1
47	TIRT			1			1			1			1
48	ALDO			1			1			1			1
49	FASW		1				1			1			1
50	INKP			1			1			1			1
51	INRU			1			1			1			1
52	KBRI			1			1			1			1
53	SPMA			1			1			1			1
54	TKIM			1			1			1			1
55	ASII			1			1			1			1
56	AUTO			1			1			1			1
57	BRAM			1			1			1			1
58	GDYR			1			1			1			1
59	GJTL			1			1			1			1
60	IMAS			1			1			1			1
61	INDS			1			1			1			1
62	LPIN			1			1			1			1
63	MASA			1			1			1			1
64	SMSM		1				1			1			1
65	ADMG			1			1			1			1
66	ARGO			1			1			1			1
67	ERTX			1			1			1			1
68	ESTI			1			1			1			1
69	HDTX			1			1			1			1
70	INDR		1				1			1			1
71	MYTX			1			1			1			1
72	PBRX			1			1			1			1
73	POLY			1			1			1			1

74	RICY			1			1			1			1
75	SSTM			1			1			1			1
76	TFCO			1			1			1			1
77	UNIT			1			1			1			1
78	BATA			1			1			1			1
79	JECC			1			1			1			1
80	KBLI		1			1			1			1	
81	KBLM			1			1			1			1
82	VOKS		1			1			1			1	
83	PTSN			1			1			1			1
84	ADES			1			1			1			1
85	DLTA			1			1			1			1
86	ICBP			1			1			1			1
87	INDF			1			1			1			1
88	MLBI		1			1			1			1	
89	MYOR			1			1			1			1
90	ROTI			1			1			1			1
91	SKLT			1			1			1			1
92	STTP			1			1			1			1
93	ULTJ			1		1			1				1
94	GGRM			1			1			1			1
95	HMSP			1			1			1			1
96	RMBA			1			1			1			1
97	DVLA			1			1			1			1
98	INAF			1			1			1			1
99	KAEF			1			1			1			1
100	KLBF			1			1			1			1
101	MERK			1			1			1			1
102	PYFA			1			1			1			1
103	SCPI			1			1			1			1
104	TSPC			1			1			1			1
105	MRAT			1			1			1			1
106	TCID			1			1			1			1
107	KICI			1			1			1			1
108	LMPI			1			1			1			1
109	APLN			1			1			1			1
110	ASRI			1			1			1			1
111	BAPA			1			1			1			1

112	BEST			1			1			1			1
113	BIPP			1			1			1			1
114	BKSL			1			1			1			1
115	BSDE			1			1			1			1
116	COWL			1			1			1		1	
117	CTRA			1			1			1			1
118	DART			1			1			1			1
119	DILD			1			1			1			1
120	DUTI			1			1			1			1
121	GAMA			1			1			1			1
122	GMTD			1			1			1			1
123	GPRA			1			1			1			1
124	GWSA			1			1			1			1
125	JRPT			1			1			1			1
126	KIJA			1			1		1			1	
127	LAMI			1			1			1			1
128	LPCK			1			1			1			1
129	LPKR		1			1			1			1	
130	MDLN			1			1		1			1	
131	MKPI			1			1			1			1
132	MTLA			1			1			1			1
133	OMRE			1			1			1			1
134	PLIN			1			1			1			1
135	PWON			1			1		1			1	
136	RBMS			1			1			1			1
137	RDTX			1			1			1			1
138	SMRA			1			1			1			1
139	SMDM			1			1			1			1



No	Kode	Instrumen Keuangan Derivatif Lindung Nilai											
		2012			2013			2014			2015		
		CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA
1	INTP			1			1			1			1
2	SMGR			1			1			1			1
3	SMCB			1			1			1			1
4	AMFG			1			1			1			1
5	ARNA			1			1			1			1
6	IKAI			1			1			1			1
7	KIAS			1			1			1			1
8	MLIA			1			1			1			1
9	TOTO			1			1			1			1
10	ALKA			1			1			1			1
11	ALMI			1			1			1			1
12	BAJA			1			1			1			1
13	BTON			1			1			1			1
14	CTBN			1			1			1			1
15	GDST			1			1			1			1
16	INAI			1			1			1			1
17	ISSP			1			1			1			1
18	JKSW			1			1			1			1
19	JPRS			1			1			1			1
20	KRAS			1			1			1			1
21	LION			1			1			1			1
22	LMSH			1			1			1			1
23	NIKL			1			1			1			1
24	PICO			1			1			1			1
25	TBMS			1			1			1			1
26	BRPT			1			1			1			1
27	BUDI			1			1			1			1
28	DPNS			1			1			1			1
29	EKAD			1			1			1			1
30	INCI			1			1			1			1
31	SRSN			1			1			1			1
32	TPIA			1			1			1			1
33	UNIC			1			1			1			1
34	AKPI			1			1			1			1
35	APLI			1			1			1			1

36	BRNA			1			1			1			1
37	FPNI			1			1			1			1
38	IGAR			1			1			1			1
39	TALF			1			1			1			1
40	TRST			1			1			1			1
41	YPAS			1			1			1			1
42	CPIN			1			1			1			1
43	JPFA			1			1			1			1
44	MAIN			1			1			1			1
45	SIPD			1			1			1			1
46	SULI			1			1			1			1
47	TIRT			1			1			1			1
48	ALDO			1			1			1			1
49	FASW			1			1			1			1
50	INKP			1			1			1			1
51	INRU			1			1			1			1
52	KBRI			1			1			1			1
53	SPMA			1			1			1			1
54	TKIM			1			1			1			1
55	ASII		1			1			1			1	
56	AUTO			1			1			1			1
57	BRAM			1			1			1			1
58	GDYR			1			1			1			1
59	GJTL			1			1			1			1
60	IMAS		1			1			1			1	
61	INDS			1			1			1			1
62	LPIN			1			1			1			1
63	MASA			1			1			1			1
64	SMSM			1			1			1			1
65	ADMG			1			1			1			1
66	ARGO			1			1			1			1
67	ERTX			1			1			1			1
68	ESTI			1			1			1			1
69	HDTX			1			1			1			1
70	INDR			1			1			1			1
71	MYTX			1			1			1			1
72	PBRX			1			1			1			1
73	POLY			1			1			1			1

74	RICY			1			1			1			1
75	SSTM			1			1			1			1
76	TFCO			1			1			1			1
77	UNIT			1			1			1			1
78	BATA			1			1			1			1
79	JECC		1				1			1			1
80	KBLI			1			1			1			1
81	KBLM			1			1			1			1
82	VOKS			1			1			1			1
83	PTSN			1			1			1			1
84	ADES			1			1			1			1
85	DLTA			1			1			1			1
86	ICBP			1			1			1			1
87	INDF			1		1			1			1	
88	MLBI			1			1			1			1
89	MYOR			1			1			1			1
90	ROTI			1			1			1			1
91	SKLT			1			1			1			1
92	STTP			1			1			1			1
93	ULTJ			1			1			1			1
94	GGRM			1			1			1			1
95	HMSP			1			1			1			1
96	RMBA			1			1			1			1
97	DVLA			1			1			1			1
98	INAF			1			1			1			1
99	KAEF			1			1			1			1
100	KLBF			1			1			1			1
101	MERK			1			1			1			1
102	PYFA			1			1			1			1
103	SCPI			1			1			1			1
104	TSPC			1			1			1			1
105	MRAT			1			1			1			1
106	TCID			1			1			1			1
107	KICI			1			1			1			1
108	LMPI			1			1			1			1
109	APLN			1			1			1			1
110	ASRI			1			1			1			1
111	BAPA			1			1			1			1

112	BEST			1			1			1			1
113	BIPP			1			1			1			1
114	BKSL			1			1			1			1
115	BSDE			1			1			1			1
116	COWL			1			1			1			1
117	CTRA			1			1			1		1	
118	DART			1			1			1			1
119	DILD			1			1			1			1
120	DUTI			1			1			1			1
121	GAMA			1			1			1			1
122	GMTD			1			1			1			1
123	GPRA			1			1			1			1
124	GWSA			1			1			1			1
125	JRPT			1			1			1			1
126	KIJA			1			1			1			1
127	LAMI			1			1			1			1
128	LPCK			1			1			1			1
129	LPKR			1			1			1			1
130	MDLN		1				1			1			1
131	MKPI			1			1			1			1
132	MTLA			1			1			1			1
133	OMRE			1			1			1			1
134	PLIN			1			1			1			1
135	PWON			1			1			1			1
136	RBMS			1			1			1			1
137	RDTX			1			1			1			1
138	SMRA			1			1			1			1
139	SMDM			1			1			1			1

No	Kode	Instrumen Keuangan Diperdagangkan											
		2012			2013			2014			2015		
		CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA
1	INTP			1			1			1			1
2	SMGR			1			1			1			1
3	SMCB			1			1			1			1
4	AMFG			1			1			1			1
5	ARNA			1			1			1			1
6	IKAI			1			1			1			1
7	KIAS			1			1			1			1
8	MLIA		1			1			1			1	
9	TOTO			1			1			1			1
10	ALKA		1				1			1			1
11	ALMI			1			1			1			1
12	BAJA			1			1			1			1
13	BTON			1			1			1			1
14	CTBN			1			1			1			1
15	GDST			1			1			1			1
16	INAI			1			1			1			1
17	ISSP			1			1			1			1
18	JKSW			1			1			1			1
19	JPRS			1			1			1			1
20	KRAS			1			1			1			1
21	LION			1			1			1			1
22	LMSH			1			1			1			1
23	NIKL			1			1			1			1
24	PICO			1			1			1			1
25	TBMS		1			1			1			1	
26	BRPT			1			1			1			1
27	BUDI			1			1			1			1
28	DPNS			1			1			1			1
29	EKAD			1			1			1			1
30	INCI			1			1			1			1
31	SRSN			1			1			1			1
32	TPIA			1			1			1			1
33	UNIC			1			1			1			1
34	AKPI		1			1			1			1	
35	APLI			1			1			1			1

36	BRNA		1		1		1		1
37	FPNI		1		1		1		1
38	IGAR		1		1		1		1
39	TALF		1		1		1		1
40	TRST		1		1		1		1
41	YPAS		1		1		1		1
42	CPIN		1		1		1		1
43	JPFA		1		1		1		1
44	MAIN		1		1		1		1
45	SIPD		1		1		1		1
46	SULI		1		1		1		1
47	TIRT		1		1		1		1
48	ALDO		1		1		1		1
49	FASW		1		1		1		1
50	INKP		1	1		1		1	
51	INRU		1		1		1		1
52	KBRI		1		1	1			1
53	SPMA		1		1		1		1
54	TKIM		1	1		1		1	
55	ASII		1		1		1		1
56	AUTO		1		1		1		1
57	BRAM		1		1		1		1
58	GDYR		1		1		1		1
59	GJTL	1			1		1		1
60	IMAS		1		1		1		1
61	INDS		1		1		1		1
62	LPIN		1		1		1		1
63	MASA		1		1		1		1
64	SMSM		1		1		1		1
65	ADMG	1			1		1		1
66	ARGO		1		1		1		1
67	ERTX		1		1		1		1
68	ESTI		1		1		1		1
69	HDTX		1		1		1		1
70	INDR		1		1		1		1
71	MYTX		1		1		1		1
72	PBRX		1		1		1		1
73	POLY		1		1		1		1

74	RICY			1		1		1		1
75	SSTM			1		1		1		1
76	TFCO			1		1		1		1
77	UNIT			1		1		1		1
78	BATA			1		1		1		1
79	JECC			1		1		1		1
80	KBLI			1		1		1		1
81	KBLM			1		1		1		1
82	VOKS			1		1		1		1
83	PTSN			1		1		1		1
84	ADES			1		1		1		1
85	DLTA			1		1		1		1
86	ICBP			1		1		1		1
87	INDF			1		1		1		1
88	MLBI			1		1		1		1
89	MYOR			1		1		1		1
90	ROTI			1		1		1		1
91	SKLT			1		1		1		1
92	STTP			1		1		1		1
93	ULTJ			1		1		1		1
94	GGRM			1		1		1		1
95	HMSP			1		1		1		1
96	RMBA			1		1		1		1
97	DVLA			1		1		1		1
98	INAF			1		1		1		1
99	KAEF			1		1		1		1
100	KLBF			1		1		1		1
101	MERK			1		1		1		1
102	PYFA			1		1		1		1
103	SCPI			1		1		1		1
104	TSPC		1			1		1		1
105	MRAT		1			1		1		1
106	TCID			1		1		1		1
107	KICI			1		1		1		1
108	LMPI			1		1		1		1
109	APLN			1		1		1		1
110	ASRI		1			1		1		1
111	BAPA			1		1		1		1

112	BEST			1			1			1			1
113	BIPP			1			1			1			1
114	BKSL			1			1			1			1
115	BSDE			1			1			1			1
116	COWL			1			1			1			1
117	CTRA		1				1			1			1
118	DART			1			1			1			1
119	DILD			1			1			1			1
120	DUTI			1			1			1			1
121	GAMA			1			1			1			1
122	GMTD			1			1			1			1
123	GPRA			1			1			1			1
124	GWSA			1			1			1			1
125	JRPT			1			1			1			1
126	KIJA			1			1			1			1
127	LAMI			1			1			1			1
128	LPCK			1			1			1			1
129	LPKR			1			1			1			1
130	MDLN			1			1			1			1
131	MKPI			1			1			1			1
132	MTLA			1			1			1			1
133	OMRE			1			1			1			1
134	PLIN		1				1			1			1
135	PWON			1			1			1			1
136	RBMS			1			1			1			1
137	RDTX			1			1			1			1
138	SMRA			1			1			1			1
139	SMDM		1				1			1		1	



No	Kode	Instrumen Keuangan Tersedia untuk Dijual											
		2012			2013			2014			2015		
		CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA
1	INTP			1			1			1			1
2	SMGR		1			1			1			1	
3	SMCB			1			1			1			1
4	AMFG			1			1			1			1
5	ARNA			1			1			1			1
6	IKAI	1			1			1			1		
7	KIAS			1			1			1			1
8	MLIA	1			1			1			1		
9	TOTO		1			1			1			1	
10	ALKA			1			1			1			1
11	ALMI		1			1			1			1	
12	BAJA			1			1			1			1
13	BTON		1			1			1			1	
14	CTBN			1			1			1			1
15	GDST		1			1			1			1	
16	INAI			1			1			1			1
17	ISSP			1			1			1			1
18	JKSW			1			1			1			1
19	JPRS		1			1			1			1	
20	KRAS	1			1			1			1		
21	LION			1			1			1			1
22	LMSH			1			1			1			1
23	NIKL	1			1			1			1		
24	PICO			1			1			1			1
25	TBMS			1			1			1			1
26	BRPT		1			1			1			1	
27	BUDI			1			1			1			1
28	DPNS		1			1			1			1	
29	EKAD		1			1			1			1	
30	INCI			1			1			1			1
31	SRSN		1			1			1			1	
32	TPIA			1			1			1			1
33	UNIC			1			1			1			1
34	AKPI			1			1			1			1
35	APLI			1			1			1			1

36	BRNA			1		1			1			1
37	FPNI			1		1			1			1
38	IGAR			1		1			1			1
39	TALF			1		1			1			1
40	TRST			1		1			1			1
41	YPAS			1		1			1			1
42	CPIN			1		1	1			1		
43	JPFA			1		1	1			1		
44	MAIN			1		1			1			1
45	SIPD			1		1			1			1
46	SULI	1			1		1			1		
47	TIRT	1			1		1			1		
48	ALDO			1		1			1			1
49	FASW			1		1			1			1
50	INKP			1		1			1			1
51	INRU		1			1			1			1
52	KBRI		1			1			1			1
53	SPMA		1			1			1			1
54	TKIM			1		1			1			1
55	ASII		1			1			1			1
56	AUTO	1			1			1				1
57	BRAM	1			1			1		1		
58	GDYR			1		1			1			1
59	GJTL		1			1			1			1
60	IMAS		1			1			1			1
61	INDS			1		1			1			1
62	LPIN			1		1			1			1
63	MASA			1		1			1			1
64	SMSM	1			1			1		1		
65	ADMG		1			1			1			1
66	ARGO			1		1			1			1
67	ERTX			1		1			1			1
68	ESTI		1			1			1			1
69	HDTX	1			1			1		1		
70	INDR	1			1			1				1
71	MYTX	1			1			1		1		
72	PBRX	1			1			1		1		
73	POLY			1		1			1			1

74	RICY			1			1			1			1
75	SSTM			1			1			1			1
76	TFCO			1			1			1			1
77	UNIT			1			1			1			1
78	BATA			1			1			1			1
79	JECC		1			1			1			1	
80	KBLI		1			1			1			1	
81	KBLM			1			1			1			1
82	VOKS			1			1			1			1
83	PTSN			1			1			1			1
84	ADES			1			1			1			1
85	DLTA	1				1			1			1	
86	ICBP		1			1			1			1	
87	INDF		1			1			1			1	
88	MLBI			1			1			1			1
89	MYOR			1			1			1			1
90	ROTI			1			1			1			1
91	SKLT			1	1				1			1	
92	STTP			1			1			1			1
93	ULTJ			1			1			1			1
94	GGRM			1			1			1			1
95	HMSP			1			1			1			1
96	RMBA			1			1			1			1
97	DVLA			1			1			1			1
98	INAF	1				1			1			1	
99	KAEF	1				1			1			1	
100	KLBF		1			1			1			1	
101	MERK			1			1			1			1
102	PYFA			1			1			1			1
103	SCPI			1			1			1			1
104	TSPC	1				1			1			1	
105	MRAT			1			1			1			1
106	TCID		1			1			1			1	
107	KICI			1			1			1			1
108	LMPI			1			1			1			1
109	APLN	1				1			1			1	
110	ASRI			1			1			1			1
111	BAPA			1			1			1			1

112	BEST			1			1			1			1
113	BIPP	1			0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
114	BKSL		1			1			1			1	
115	BSDE	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
116	COWL			1	1			1			1		
117	CTRA	1					1			1			1
118	DART		1			1				1			1
119	DILD		1			1		1			1		
120	DUTI	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
121	GAMA			1			1			1			1
122	GMTD			1			1			1			1
123	GPRA			1	1			1			1		
124	GWSA			1			1			1			1
125	JRPT	1			1			1			1		
126	KIJA	1			1			1			1		
127	LAMI			1			1			1			1
128	LPCK	1			1			1				1	
129	LPKR	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
130	MDLN			1			1			1			1
131	MKPI			1			1			1			1
132	MTLA		1				1			1			1
133	OMRE	1			1			1			1		
134	PLIN			1	1			1			1		
135	PWON			1			1		1			1	
136	RBMS		1			1		1			1		
137	RDTX		1			1			1			1	
138	SMRA	1			1			1			1		
139	SMDM	1			1			1			1		

No	Kode	Instrumen Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo											
		2012			2013			2014			2015		
		CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA
1	INTP			1			1			1			1
2	SMGR			1			1			1			1
3	SMCB			1			1			1			1
4	AMFG			1			1			1			1
5	ARNA			1			1			1			1
6	IKAI			1			1			1			1
7	KIAS			1			1			1			1
8	MLIA			1			1			1			1
9	TOTO			1			1			1			1
10	ALKA			1			1			1			1
11	ALMI			1			1			1			1
12	BAJA			1			1			1			1
13	BTON			1			1			1			1
14	CTBN			1			1			1			1
15	GDST			1			1			1			1
16	INAI			1			1			1			1
17	ISSP			1			1			1			1
18	JKSW			1			1			1			1
19	JPRS			1			1			1			1
20	KRAS			1			1			1			1
21	LION			1			1			1			1
22	LMSH			1			1			1			1
23	NIKL			1			1			1			1
24	PICO			1			1			1			1
25	TBMS			1			1			1			1
26	BRPT			1			1			1			1
27	BUDI			1			1			1			1
28	DPNS			1			1			1	1		
29	EKAD			1			1			1			1
30	INCI			1			1			1			1
31	SRSN			1			1			1			1
32	TPIA			1			1			1			1
33	UNIC			1			1			1			1
34	AKPI			1			1			1			1
35	APLI			1			1			1			1

36	BRNA			1			1			1			1
37	FPNI			1			1			1			1
38	IGAR			1			1			1			1
39	TALF			1			1			1			1
40	TRST			1			1			1			1
41	YPAS			1			1			1			1
42	CPIN			1			1			1			1
43	JPFA	1			1			1					1
44	MAIN			1			1			1			1
45	SIPD			1			1			1			1
46	SULI			1			1			1			1
47	TIRT			1			1			1			1
48	ALDO			1			1			1			1
49	FASW			1			1			1			1
50	INKP			1			1			1			1
51	INRU			1			1			1			1
52	KBRI			1			1			1			1
53	SPMA			1			1			1			1
54	TKIM	1			1			1					1
55	ASII		1				1			1		1	
56	AUTO			1			1			1			1
57	BRAM			1			1			1			1
58	GDYR			1			1			1			1
59	GJTL			1			1			1			1
60	IMAS			1			1			1			1
61	INDS			1			1			1			1
62	LPIN	1					1			1			1
63	MASA			1			1			1	1		
64	SMSM			1			1			1			1
65	ADMG			1			1			1			1
66	ARGO			1			1			1			1
67	ERTX			1			1			1			1
68	ESTI			1			1			1			1
69	HDTX			1			1			1			1
70	INDR			1			1			1			1
71	MYTX			1			1			1			1
72	PBRX			1			1			1			1
73	POLY			1			1			1			1

74	RICY			1		1			1			1
75	SSTM			1		1			1			1
76	TFCO			1		1			1			1
77	UNIT			1		1			1			1
78	BATA			1		1			1			1
79	JECC			1		1			1			1
80	KBLI			1		1			1			1
81	KBLM			1		1			1			1
82	VOKS			1		1			1			1
83	PTSN			1		1			1			1
84	ADES			1		1			1			1
85	DLTA			1		1			1			1
86	ICBP			1		1			1			1
87	INDF			1		1			1			1
88	MLBI			1		1			1			1
89	MYOR			1		1			1			1
90	ROTI			1		1			1			1
91	SKLT			1		1			1			1
92	STTP			1		1			1			1
93	ULTJ			1		1			1			1
94	GGRM			1		1			1			1
95	HMSP			1		1			1			1
96	RMBA			1		1			1			1
97	DVLA			1		1			1			1
98	INAF			1		1			1			1
99	KAEF			1		1			1			1
100	KLBF			1		1			1			1
101	MERK			1		1			1			1
102	PYFA			1		1			1			1
103	SCPI			1		1			1			1
104	TSPC			1		1			1			1
105	MRAT			1		1			1			1
106	TCID			1		1			1			1
107	KICI			1		1			1			1
108	LMPI			1		1			1			1
109	APLN			1		1			1			1
110	ASRI			1		1			1			1
111	BAPA			1		1			1			1

112	BEST			1			1			1			1
113	BIPP			1			1			1			1
114	BKSL			1			1			1			1
115	BSDE			1			1			1			1
116	COWL			1			1			1			1
117	CTRA			1			1			1			1
118	DART			1			1			1			1
119	DILD	1			1			1					1
120	DUTI			1			1			1			1
121	GAMA			1			1			1			1
122	GMTD			1			1			1			1
123	GPRA			1			1			1			1
124	GWSA			1			1			1			1
125	JRPT			1			1			1			1
126	KIJA			1			1			1			1
127	LAMI			1			1			1			1
128	LPCK			1			1			1			1
129	LPKR			1			1			1	0.5	0.5	
130	MDLN			1			1			1			1
131	MKPI			1			1			1			1
132	MTLA			1			1			1			1
133	OMRE			1			1			1			1
134	PLIN			1			1			1			1
135	PWON			1			1			1			1
136	RBMS			1			1			1			1
137	RDTX			1			1			1			1
138	SMRA			1			1			1			1
139	SMDM			1			1			1			1



No	Kode	Instrumen Keuangan Piutang											
		2012			2013			2014			2015		
		CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA
1	INTP	1			1			1			1		
2	SMGR	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
3	SMCB	1			1			1			1		
4	AMFG	1			1			1			1		
5	ARNA	1			1			1			1		
6	IKAI	1			1			1			1		
7	KIAS	1			1			1			1		
8	MLIA	1			1			1			1		
9	TOTO	1			1			1			1		
10	ALKA	1			1			1			1		
11	ALMI	1			1			1			1		
12	BAJA	1			1			1			1		
13	BTON	1			1			1			1		
14	CTBN	1			1			1			1		
15	GDST	1			1			1			1		
16	INAI	1			1			1			1		
17	ISSP	1			1			1			1		
18	JKSW	1			1			1			1		
19	JPRS	1			1			1			1		
20	KRAS	1			1			1			1		
21	LION	1			1			1			1		
22	LMSH	1			1			1			1		
23	NIKL	1			1			1			1		
24	PICO	1			1			1			1		
25	TBMS	1			1			1			1		
26	BRPT	1			1			1			1		
27	BUDI	1			1			1			1		
28	DPNS	1			1			1			1		
29	EKAD	1			1			1			1		
30	INCI	1			1			1			1		
31	SRSN	1			1			1			1		
32	TPIA	1			1			1			1		
33	UNIC	1			1			1			1		
34	AKPI	1			1			1			1		
35	APLI	1			1			1			1		

36	BRNA	1			1			1			1		
37	FPNI	1			1			1			1		
38	IGAR	1			1			1			1		
39	TALF	1			1			1			1		
40	TRST	1			1			1			1		
41	YPAS	1			1			1			1		
42	CPIN	1			1			1			0.5	0.5	
43	JPFA	1			1			1			1		
44	MAIN	1			1			1			1		
45	SIPD	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
46	SULI	1			1			1			1		
47	TIRT	1			1			1			1		
48	ALDO	1			1			1			1		
49	FASW	1			1			1			1		
50	INKP	1			1			1			1		
51	INRU	1			1			1			1		
52	KBRI	1			1			1			1		
53	SPMA	1			1			1			1		
54	TKIM	1			1			1			1		
55	ASII	1			1			1			1		
56	AUTO	1			1			1			1		
57	BRAM	1			1			1			1		
58	GDYR	1			1			1			1		
59	GJTL	1			1			1			1		
60	IMAS	1			1			1			1		
61	INDS	1			1			1			1		
62	LPIN	1			1			1			1		
63	MASA	1			1			1			1		
64	SMSM	1			1			1			1		
65	ADMG	1			1			1			1		
66	ARGO	1			1			1			1		
67	ERTX	1			1			1			1		
68	ESTI	1			1			1			1		
69	HDTX	1			1			1			1		
70	INDR	1			1			1			1		
71	MYTX	1			1			1			1		
72	PBRX	1			1			1			1		
73	POLY	1			1			1			1		

74	RICY	1			1			1			1		
75	SSTM	1			1			1			1		
76	TFCO	1			1			1			1		
77	UNIT	1			1			1			1		
78	BATA	1			1			1			1		
79	JECC	1			1			1			1		
80	KBLI	1			1			1			1		
81	KBLM	1			1			1			1		
82	VOKS	1			1			1			1		
83	PTSN	1			1			1			1		
84	ADES	1			1			1			1		
85	DLTA	1			1			1			1		
86	ICBP	1			1			1			1		
87	INDF	1			1			1			1		
88	MLBI	1			1			1			1		
89	MYOR	1			1			1			1		
90	ROTI	1			1			1			1		
91	SKLT	1			1			1			1		
92	STTP	1			1			1			1		
93	ULTJ	1			1			1			1		
94	GGRM	1			1			1			1		
95	HMSP	1			1			1			1		
96	RMBA	1			1			1			1		
97	DVLA	1			1			1			1		
98	INAF	1			1			1			1		
99	KAEF	1			1			1			1		
100	KLBF	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
101	MERK	1			1			1			1		
102	PYFA	1			1			1			1		
103	SCPI	1			1			1			1		
104	TSPC	1			1			1			1		
105	MRAT	1			1			1			1		
106	TCID	1			1			1			1		
107	KICI	1			1			1			1		
108	LMPI	1			1			1			1		
109	APLN	1			1			1			1		
110	ASRI	1			1			1			1		
111	BAPA	1			1			1			1		

112	BEST	1			1			1			1		
113	BIPP	1			1			1			1		
114	BKSL	1			1			1			0.5	0.5	
115	BSDE	1			1			1			1		
116	COWL	1			1			1			1		
117	CTRA	1			1			1			1		
118	DART	1			1			1			1		
119	DILD	1			1			1			1		
120	DUTI	1			1			1			1		
121	GAMA	1			1			1			1		
122	GMTD	1			1			1			1		
123	GPRA	1			1			1			1		
124	GWSA	1			1			1			1		
125	JRPT	1			1			1			1		
126	KIJA	1			1			1			1		
127	LAMI	1			1			1			1		
128	LPCK	1			1			1			0.5	0.5	
129	LPKR	1			1			1			1		
130	MDLN	1			1			0.5	0.5		0.5	0.5	
131	MKPI	1			1			1			1		
132	MTLA	1			1			1			1		
133	OMRE	1			1			1			1		
134	PLIN	1			1			1			1		
135	PWON	1			1			0.5	0.5		0.5	0.5	
136	RBMS	1			1			1			1		
137	RDTX	1			1			1			1		
138	SMRA	1			1			1			1		
139	SMDM	1			1			1			1		

No	Kode	Instrumen Keuangan Pinjaman											
		2012			2013			2014			2015		
		CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA
1	INTP	1			1			1			1		
2	SMGR	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
3	SMCB	1			1			1			1		
4	AMFG	1			1			1			1		
5	ARNA	1			1			1			1		
6	IKAI	1			1			1			1		
7	KIAS	1			1			1			1		
8	MLIA	1			1			1			1		
9	TOTO	1			1			1			1		
10	ALKA	1			1			1			1		
11	ALMI	1			1			1			1		
12	BAJA	1			1			1			1		
13	BTON	1			1			1			1		
14	CTBN	1			1			1			1		
15	GDST	1			1			1			1		
16	INAI	1			1			1			1		
17	ISSP	1			1			1			1		
18	JKSW	1			1			1			1		
19	JPRS	1			1			1			1		
20	KRAS	1			1			1			1		
21	LION	1			1			1			1		
22	LMSH	1			1			1			1		
23	NIKL	1			1			1			1		
24	PICO	1			1			1			1		
25	TBMS	1			1			1			1		
26	BRPT	1			1			1			1		
27	BUDI	1			1			1			1		
28	DPNS	1			1			1			1		
29	EKAD	1			1			1			1		
30	INCI	1			1			1			1		
31	SRSN	1			1			1			1		
32	TPIA	1			1			1			1		
33	UNIC	1			1			1			1		
34	AKPI	1			1			1			1		
35	APLI	1			1			1			1		

36	BRNA	1			1			1			1		
37	FPNI	1			1			1			1		
38	IGAR	1			1			1			1		
39	TALF	1			1			1			1		
40	TRST	1			1			1			1		
41	YPAS	1			1			1			1		
42	CPIN	1			1			1			0.5	0.5	
43	JPFA	1			1			1			1		
44	MAIN	1			1			1			1		
45	SIPD	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
46	SULI	1			1			1			1		
47	TIRT	1			1			1			1		
48	ALDO	1			1			1			1		
49	FASW	1			1			1			1		
50	INKP	1			1			1			1		
51	INRU	1			1			1			1		
52	KBRI	1			1			1			1		
53	SPMA	1			1			1			1		
54	TKIM	1			1			1			1		
55	ASII	1			1			1			1		
56	AUTO	1			1			1			1		
57	BRAM	1			1			1			1		
58	GDYR	1			1			1			1		
59	GJTL	1			1			1			1		
60	IMAS	1			1			1			1		
61	INDS	1			1			1			1		
62	LPIN	1			1			1			1		
63	MASA	1			1			1			1		
64	SMSM	1			1			1			1		
65	ADMG	1			1			1			1		
66	ARGO	1			1			1			1		
67	ERTX	1			1			1			1		
68	ESTI	1			1			1			1		
69	HDTX	1			1			1			1		
70	INDR	1			1			1			1		
71	MYTX	1			1			1			1		
72	PBRX	1			1			1			1		
73	POLY	1			1			1			1		

74	RICY	1			1			1			1		
75	SSTM	1			1			1			1		
76	TFCO	1			1			1			1		
77	UNIT	1			1			1			1		
78	BATA	1			1			1			1		
79	JECC	1			1			1			1		
80	KBLI	1			1			1			1		
81	KBLM	1			1			1			1		
82	VOKS	1			1			1			1		
83	PTSN	1			1			1			1		
84	ADES	1			1			1			1		
85	DLTA	1			1			1			1		
86	ICBP	1			1			1			1		
87	INDF	1			1			1			1		
88	MLBI	1			1			1			1		
89	MYOR	1			1			1			1		
90	ROTI	1			1			1			1		
91	SKLT	1			1			1			1		
92	STTP	1			1			1			1		
93	ULTJ	1			1			1			1		
94	GGRM	1			1			1			1		
95	HMSP	1			1			1			1		
96	RMBA	1			1			1			1		
97	DVLA	1			1			1			1		
98	INAF	1			1			1			1		
99	KAEF	1			1			1			1		
100	KLBF	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	
101	MERK	1			1			1			1		
102	PYFA	1			1			1			1		
103	SCPI	1			1			1			1		
104	TSPC	1			1			1			1		
105	MRAT	1			1			1			1		
106	TCID	1			1			1			1		
107	KICI	1			1			1			1		
108	LMPI	1			1			1			1		
109	APLN	1			1			1			1		
110	ASRI	1			1			1			1		
111	BAPA	1			1			1			1		

112	BEST	1			1			1			1		
113	BIPP	1			1			1			1		
114	BKSL	1			1			1			0.5	0.5	
115	BSDE	1			1			1			1		
116	COWL	1			1			1			1		
117	CTRA	1			1			1			1		
118	DART	1			1			1			1		
119	DILD	1			1			1			1		
120	DUTI	1			1			1			1		
121	GAMA	1			1			1			1		
122	GMTD	1			1			1			1		
123	GPRA	1			1			1			1		
124	GWSA	1			1			1			1		
125	JRPT	1			1			1			1		
126	KIJA	1			1			1			1		
127	LAMI	1			1			1			1		
128	LPCK	1			1			1			1		
129	LPKR	1			1			1			1		
130	MDLN	1			1			0.5	0.5		0.5	0.5	
131	MKPI	1			1			1			1		
132	MTLA	1			1			1			1		
133	OMRE	1			1			1			1		
134	PLIN	1			1			0.5	0.5		0.5	0.5	
135	PWON	1			1			0.5	0.5		0.5	0.5	
136	RBMS	1			1			1			1		
137	RDTX	1			1			1			1		
138	SMRA	1			1			1			1		
139	SMDM	1			1			1			1		



No	Kode	Instrumen Keuangan - Hutang Obligasi											
		2012			2013			2014			2015		
		CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA	CM	FV	NA
1	INTP			1			1			1			1
2	SMGR			1			1			1			1
3	SMCB			1			1			1			1
4	AMFG			1			1			1			1
5	ARNA			1			1			1			1
6	IKAI			1			1			1			1
7	KIAS			1			1			1			1
8	MLIA			1			1			1			1
9	TOTO			1			1			1			1
10	ALKA			1			1			1			1
11	ALMI			1			1			1			1
12	BAJA			1			1			1			1
13	BTON			1			1			1			1
14	CTBN			1			1			1			1
15	GDST			1			1			1			1
16	INAI			1			1			1			1
17	ISSP			1			1			1			1
18	JKSW			1			1			1			1
19	JPRS			1			1			1			1
20	KRAS			1			1			1			1
21	LION			1			1			1			1
22	LMSH			1			1			1			1
23	NIKL			1			1			1			1
24	PICO			1			1			1			1
25	TBMS			1			1			1			1
26	BRPT	1					1			1			1
27	BUDI			1			1			1			1
28	DPNS			1			1			1			1
29	EKAD			1			1			1			1
30	INCI			1			1			1			1
31	SRSN			1			1			1			1
32	TPIA		1				1			1			1
33	UNIC			1			1			1			1
34	AKPI			1			1			1			1
35	APLI			1			1			1			1

36	BRNA			1		1		1		1		1
37	FPNI		1			1		1				1
38	IGAR			1		1		1				1
39	TALF			1		1		1				1
40	TRST			1		1		1				1
41	YPAS			1		1		1				1
42	CPIN			1		1		1				1
43	JPFA		1			1		1			1	
44	MAIN		1			1		1				1
45	SIPD			1		1		1				1
46	SULI			1		1		1				1
47	TIRT			1		1		1				1
48	ALDO			1		1		1				1
49	FASW			1		1		1				1
50	INKP		1			1		1			1	
51	INRU			1		1		1				1
52	KBRI			1		1		1				1
53	SPMA			1		1		1				1
54	TKIM	1			1			1				1
55	ASII		1			1		1			1	
56	AUTO			1		1		1				1
57	BRAM			1		1		1				1
58	GDYR			1		1		1				1
59	GJTL		1			1		1			1	
60	IMAS	1			1			1			1	
61	INDS			1		1		1				1
62	LPIN			1		1		1				1
63	MASA			1		1		1				1
64	SMSM	1			1			1				1
65	ADMG			1		1		1				1
66	ARGO			1		1		1				1
67	ERTX			1		1		1				1
68	ESTI			1		1		1				1
69	HDTX			1		1		1				1
70	INDR			1		1		1				1
71	MYTX			1		1		1				1
72	PBRX			1		1		1				1
73	POLY			1		1		1				1

74	RICY			1			1			1			1
75	SSTM			1			1			1			1
76	TFCO			1			1			1			1
77	UNIT			1			1			1			1
78	BATA			1			1			1			1
79	JECC			1			1			1			1
80	KBLI			1			1			1			1
81	KBLM			1			1			1			1
82	VOKS			1			1			1			1
83	PTSN			1			1			1			1
84	ADES			1			1			1			1
85	DLTA			1			1			1			1
86	ICBP			1			1			1			1
87	INDF	1			1			1			1		
88	MLBI			1			1			1			1
89	MYOR		1		1				1			1	
90	ROTI			1		1			1			1	
91	SKLT			1			1			1			1
92	STTP			1			1	1			1		
93	ULTJ			1			1			1			1
94	GGRM			1			1			1			1
95	HMSP			1			1			1			1
96	RMBA			1			1			1			1
97	DVLA			1			1			1			1
98	INAF	1					1			1	1		
99	KAEF			1			1			1			1
100	KLBF			1			1			1			1
101	MERK			1			1			1			1
102	PYFA			1			1			1			1
103	SCPI			1			1			1			1
104	TSPC			1			1			1			1
105	MRAT			1			1			1			1
106	TCID			1			1			1			1
107	KICI			1			1			1			1
108	LMPI			1			1			1			1
109	APLN		1			1			1			1	
110	ASRI		1			1			1			1	
111	BAPA			1			1			1			1

112	BEST			1			1			1			1
113	BIPP			1			1			1			1
114	BKSL			1			1			1			1
115	BSDE		1			1			1			1	
116	COWL			1			1			1			1
117	CTRA			1			1		1			1	
118	DART			1		1			1			1	
119	DILD			1		1			1			1	
120	DUTI		1				1			1			1
121	GAMA			1			1			1			1
122	GMTD			1			1			1			1
123	GPRA			1			1			1			1
124	GWSA			1			1			1		1	
125	JRPT			1			1			1			1
126	KIJA	1				1			1			1	
127	LAMI			1			1			1			1
128	LPCK			1			1			1			1
129	LPKR		1			1			1			1	
130	MDLN	1				1			1			1	
131	MKPI			1			1			1			1
132	MTLA			1			1			1			1
133	OMRE			1			1			1			1
134	PLIN			1			1			1			1
135	PWON		1			1			1			1	
136	RBMS			1			1			1			1
137	RDTX			1			1			1			1
138	SMRA		1		1			1			1		
139	SMDM	1			1			1			1		

## LAMPIRAN 4

### Hasil Pengukuran Uji Beda

#### Aset Tetap (PP&E)

No	KODE	2012	2013	2014	2015	Total	2012-2013	2014-2015
1	INTP	1	1	1	1		2	2
2	SMGR	1	1	1	1		2	2
3	SMCB	1	1	1	1		2	2
4	AMFG	0.5	1	1	1		1.5	2
5	ARNA	1	1	1	1		2	2
6	IKAI	1	1	1	0.5		2	1.5
7	KIAS	1	1	1	1		2	2
8	MLIA	1	1	1	1		2	2
9	TOTO	1	1	1	1		2	2
10	ALKA	1	1	1	1		2	2
11	ALMI	1	1	1	1		2	2
12	BAJA	1	0.5	0.5	0.5		1.5	1
13	BTON	1	1	1	1		2	2
14	CTBN	1	1	1	0.5		2	1.5
15	GDST	1	1	1	1		2	2
16	INAI	1	1	1	1		2	2
17	ISSP	1	1	1	1		2	2
18	JKSW	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
19	JPRS	1	1	1	1		2	2
20	KRAS	1	1	1	1		2	2
21	LION	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
22	LMSH	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
23	NIKL	1	1	1	1		2	2
24	PICO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
25	TBMS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
26	BRPT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
27	BUDI	1	1	1	1		2	2
28	DPNS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
29	EKAD	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
30	INCI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
31	SRSN	0.5	1	1	1		1.5	2
32	TPIA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
33	UNIC	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1

34	AKPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
35	APLI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
36	BRNA	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
37	FPNI	1	1	1	1		2	2
38	IGAR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
39	TALF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
40	TRST	1	1	1	1		2	2
41	YPAS	1	1	0.5	0.5		2	1
42	CPIN	1	1	1	1		2	2
43	JPFA	1	0.5	0.5	1		1.5	1.5
44	MAIN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
45	SIPD	1	1	1	1		2	2
46	SULI	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
47	TIRT	0.5	1	1	1		1.5	2
48	ALDO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
49	FASW	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
50	INKP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
51	INRU	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
52	KBRI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
53	SPMA	1	1	1	1		2	2
54	TKIM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
55	ASII	1	1	1	1		2	2
56	AUTO	1	1	1	1		2	2
57	BRAM	1	1	1	1		2	2
58	GDYR	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
59	GJTL	1	1	1	1		2	2
60	IMAS	1	1	1	1		2	2
61	INDS	1	1	1	1		2	2
62	LPIN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
63	MASA	0.5	1	1	1		1.5	2
64	SMSM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
65	ADMG	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
66	ARGO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
67	ERTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
68	ESTI	1	1	1	1		2	2
69	HDTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
70	INDR	1	1	1	1		2	2
71	MYTX	0.5	1	1	1		1.5	2

72	PBRX	0.5	1	1	1		1.5	2
73	POLY	1	1	1	1		2	2
74	RICY	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
75	SSTM	1	1	1	1		2	2
76	TFCO	1	0.5	1	1		1.5	2
77	UNIT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
78	BATA	1	1	1	1		2	2
79	JECC	1	1	1	1		2	2
80	KBLI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
81	KBLM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
82	VOKS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
83	PTSN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
84	ADES	1	1	1	1		2	2
85	DLTA	1	1	1	1		2	2
86	ICBP	0.5	0.5	1	1		1	2
87	INDF	0.5	1	1	1		1.5	2
88	MLBI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
89	MYOR	1	1	1	1		2	2
90	ROTI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
91	SKLT	1	1	1	1		2	2
92	STTP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
93	ULTJ	0.5	0.5	1	1		1	2
94	GGRM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
95	HMSP	1	1	1	1		2	2
96	RMBA	1	1	1	1		2	2
97	DVLA	1	1	1	1		2	2
98	INAF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
99	KAEF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
100	KLBF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
101	MERK	1	1	1	1		2	2
102	PYFA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
103	SCPI	1	1	1	1		2	2
104	TSPC	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
105	MRAT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
106	TCID	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
107	KICI	1	1	1	1		2	2
108	LMPI	1	1	1	1		2	2
109	APLN	1	1	1	1		2	2

110	ASRI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
111	BAPA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
112	BEST	1	1	1	1		2	2
113	BIPP	1	1	1	1		2	2
114	BKSL	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
115	BSDE	1	1	1	1		2	2
116	COWL	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
117	CTRA	1	1	1	1		2	2
118	DART	1	0.5	0.5	0.5		1.5	1
119	DILD	1	1	1	1		2	2
120	DUTI	1	1	1	1		2	2
121	GAMA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
122	GMTD	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
123	GPRA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
124	GWSA	1	1	1	1		2	2
125	JRPT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
126	KIJA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
127	LAMI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
128	LPCK	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
129	LPKR	0.5	1	1	1		1.5	2
130	MDLN	0.5	0.5	1	1		1	2
131	MKPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
132	MTLA	1	1	1	1		2	2
133	OMRE	1	1	1	1		2	2
134	PLIN	1	1	1	1		2	2
135	PWON	0.5	0.5	1	1		1	2
136	RBMS	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
137	RDTX	1	1	1	1		2	2
138	SMRA	1	1	1	1		2	2
139	SMDM	1	1	1	1		2	2



### Aset Takberwujud

No	KODE	2012	2013	2014	2015	Total	2012-2013	2014-2015
1	INTP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
2	SMGR	1	1	1	1		2	2
3	AMFG	0	0	0.5	0.5			1
4	KIAS	0	0	0	0.5			0.5
5	INAI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
6	ISSP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
7	EKAD	0.5	0.5	0	0		1	
8	SRSN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
9	AKPI	0	0.5	0.5	0.5		0.5	1
10	BRNA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
11	FPNI	0	0.5	0.5	0.5		0.5	1
12	TALF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
13	CPIN	0	0	0	1			1
14	SIPD	1	1	1	1		2	2
15	FASW	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
16	ASII	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
17	AUTO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
18	BRAM	0	0	0	0.5			0.5
19	GDYR	0	0.5	0.5	0.5		0.5	1
20	LPIN	0	0	0	0.5			0.5
21	MASA	0	0	1	0.5			1.5
22	ERTX	0.5	0.5	0	0.5		1	0.5
23	PBRX	0	1	1	1		1	2
24	POLY	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
25	RICY	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
26	ADES	0	0	0.5	0.5			1
27	ICBP	0.5	0.5	1	1		1	2
28	INDF	0.5	1	1	1		1.5	2
29	ROTI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
30	ULTJ	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
31	DVLA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
32	INAF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
33	KAEF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
34	KLBF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
35	MERK	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
36	PYFA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1

37	SCPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
38	BKSL	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
39	BSDE	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
40	COWL	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
41	LAMI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
42	LPCK	0	0	0	1			1
43	LPKR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
44	LPIN	0.5	0	0	0		0.5	
45	PWON	0	0.5	1	0		0.5	1

### Imbalan Kerja

No	KODE	2012	2013	2014	2015	Total	2012-2013	2014-2015
1	INTP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
2	SMGR	1	1	1	1		2	2
3	SMCB	1	1	1	1		2	2
4	AMFG	1	1	1	1		2	2
5	ARNA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
6	IKAI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
7	KIAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
8	MLIA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
9	TOTO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
10	ALKA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
11	ALMI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
12	BAJA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
13	BTON	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
14	CTBN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
15	GDST	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
16	INAI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
17	ISSP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
18	JKSW	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
19	JPRS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
20	KRAS	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
21	LION	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
22	LMSH	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
23	NIKL	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
24	PICO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
25	TBMS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
26	BRPT	1	1	1	1		2	2

27	BUDI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
28	DPNS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
29	EKAD	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
30	INCI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
31	SRSN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
32	TPIA	1	1	1	1		2	2
33	UNIC	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
34	AKPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
35	APLI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
36	BRNA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
37	FPNI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
38	IGAR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
39	TALF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
40	TRST	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
41	YPAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
42	CPIN	1	1	1	1		2	2
43	JPFA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
44	MAIN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
45	SIPD	1	1	1	1		2	2
46	SULI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
47	TIRT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
48	ALDO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
49	FASW	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
50	INKP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
51	INRU	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
52	KBRI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
53	SPMA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
54	TKIM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
55	ASII	1	1	1	1		2	2
56	AUTO	1	1	1	1		2	2
57	BRAM	0.5	1	1	1		1.5	2
58	GDYR	1	1	1	1		2	2
59	GJTL	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
60	IMAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
61	INDS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
62	LPIN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
63	MASA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
64	SMSM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1

65	ADMG	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
66	ARGO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
67	ERTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
68	ESTI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
69	HDTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
70	INDR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
71	MYTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
72	PBRX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
73	POLY	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
74	RICY	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
75	SSTM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
76	TFCO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
77	UNIT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
78	BATA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
79	JECC	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
80	KBLI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
81	KBLM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
82	VOKS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
83	PTSN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
84	ADES	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
85	DLTA	1	1	1	1		2	2
86	ICBP	0.5	0.5	1	1		1	2
87	INDF	0.5	1	1	1		1.5	2
88	MLBI	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
89	MYOR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
90	ROTI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
91	SKLT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
92	STTP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
93	ULTJ	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
94	GGRM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
95	HMSP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
96	RMBA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
97	DVLA	1	1	1	0.5		2	1.5
98	INAF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
99	KAEF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
100	KLBF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
101	MERK	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
102	PYFA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1

103	SCPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
104	TSPC	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
105	MRAT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
106	TCID	1	1	1	1		2	2
107	KICI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
108	LMPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
109	APLN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
110	ASRI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
111	BAPA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
112	BEST	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
113	BIPP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
114	BKSL	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
115	BSDE	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
116	COWL	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
117	CTRA	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
118	DART	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
119	DILD	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
120	DUTI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
121	GAMA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
122	GMTD	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
123	GPRA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
124	GWSA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
125	JRPT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
126	KIJA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
127	LAMI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
128	LPCK	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
129	LPKR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
130	MDLN	0.5	0.5	1	1		1	2
131	MKPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
132	MTLA	1	1	1	1		2	2
133	OMRE	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
134	LPIN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
135	PWON	0.5	0.5	1	1		1	2
136	RBMS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
137	RDTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
138	SMRA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
139	SMDM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1

### Properti Investasi

No	KODE	2012	2013	2014	2015	Total	2012-2013	2014-2015
1	INTP	1	1	1	1		2	2
2	SMGR	1	1	1	1		2	2
3	GDST	1	1	1	1		2	2
4	INAI	1	1	1	1		2	2
5	ISSP	0	0	0	0.5			0.5
6	JPRS	1	1	1	1		2	2
7	LMSH	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
8	BRPT	1	1	1	1		2	2
9	DPNS	1	1	1	1		2	2
10	SRSN	1	1	1	1		2	2
11	TALF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
12	JPFA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
13	ASII	1	1	1	1		2	2
14	AUTO	1	1	1	1		2	2
15	BRAM	1	1	1	1		2	2
16	GJTL	0	0	1	1			2
17	IMAS	0	0	0	1			1
18	INDS	1	1	0.5	1		2	1.5
19	LPIN	1	1	1	1		2	2
20	SMSM	1	0	0	0		1	
21	RICY	1	1	1	1		2	2
22	TFCO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
23	ADES	0.5	0	0	0		0.5	
24	INDF	0	0	0	1			1
25	STTP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
26	HMSP	0.5	1	1	1		1.5	2
27	INAF	0	0	0	1			1
28	MERK	1	0	0	0		1	
29	MRAT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
30	KICI	1	1	1	1		2	2
31	APLN	1	1	1	1		2	2
32	ASRI	1	1	1	1		2	2
33	BEST	0	0	0.5	1			1.5
34	BIPP	1	1	1	0.5		2	1.5
35	BKSL	0	0	0	1			1
36	BSDE	1	1	1	1		2	2

37	CTRA	1	1	1	1		2	2
38	DART	1	1	1	1		2	2
39	DILD	1	1	1	1		2	2
40	DUTI	1	1	1	1		2	2
41	GAMA	0	0.5	0.5	1		0.5	1.5
42	GPRA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
43	GWSA	1	1	1	1		2	2
44	JRPT	1	1	1	1		2	2
45	KIJA	1	1	1	1		2	2
46	LAMI	0	0.5	0.5	0.5		0.5	1
47	LPCK	1	1	1	1		2	2
48	LPKR	1	1	1	1		2	2
49	MKPI	1	1	1	1		2	2
50	MTLA	1	1	1	1		2	2
51	OMRE	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
52	LPIN	1	1	1	1		2	2
53	PWON	1	1	1	1		2	2
54	RDTX	1	1	1	1		2	2
55	SMRA	1	1	1	1		2	2
56	SMDM	0	0	0.5	0.5			1

### Instrumen Keuangan Derivatif

No	KODE	2012	2013	2014	2015	Total	2012-2013	2014-2015
1	KRAS	1	1	1	1		2	2
2	BRPT	1	1	1	1		2	2
3	TPIA	1	1	1	1		2	2
4	UNIC	1	1	1	1		2	2
5	FPNI	1	1	1	1		2	2
6	CPIN	1	1	1	1		2	2
7	JPFA	0	0	1	0			1
8	MAIN	0	0	0	1			1
9	FASW	1	1	1	1		2	2
10	SMSM	1	1	1	1		2	2
11	INDR	1	1	1	1		2	2
12	KBLI	1	1	1	1		2	2
13	VOKS	1	1	1	1		2	2
14	MLBI	1	1	1	1		2	2
15	ULTJ	0	1	1	0		1	1

16	COWL	0	0	0	1			1
17	KIJA	0	0	1	1			2
18	LPKR	1	1	1	1		2	2
19	MDLN	0	0	1	1			2
20	PWON	0	0	1	1			2

### Instrumen Keuangan Derivatif Lindung Nilai

No	KODE	2012	2013	2014	2015	Total	2012-2013	2014-2015
1	ASII	1	1	1	1		2	2
2	IMAS	1	1	1	1		2	2
3	JECC	1	0	0	0		1	
4	INDF	0	1	1	1		1	2
5	CTRA	0	0	0	1			1
6	MDLN	1	0	0	0		1	

### Instrumen Keuangan Diperdagangkan

No	KODE	2012	2013	2014	2015	Total	2012-2013	2014-2015
1	MLIA	1	1	1	1		2	2
2	ALKA	1	0	0	0		1	
3	TBMS	1	1	1	1		2	2
4	AKPI	1	1	1	1		2	2
5	BRNA	1	1	1	1		2	2
6	INKP	0	1	1	1		1	2
7	KBRI	0	0	1	0			1
8	TKIM	0	1	1	1		1	2
9	GJTL	1	1	1	1		2	2
10	ADMG	1	1	0	0		2	
11	TSPC	1	1	1	1		2	2
12	MRAT	1	1	1	0		2	1
13	ASRI	1	1	1	1		2	2
14	CTRA	1	0	0	0		1	
15	PLIN	1	1	1	0		2	1
16	SMDM	1	1	1	1		2	2



### Instrumen Keuangan Tersedia untuk Dijual

No	KODE	2012	2013	2014	2015	Total	2012-2013	2014-2015
1	SMGR	1	1	1	1		2	2
2	IKAI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
3	MLIA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
4	TOTO	1	1	1	1		2	2
5	ALMI	1	1	1	1		2	2
6	BTON	1	1	1	1		2	2
7	GDST	1	1	1	1		2	2
8	JPRS	1	1	1	1		2	2
9	KRAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
10	NIKL	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
11	BRPT	1	1	1	1		2	2
12	DPNS	1	1	1	1		2	2
13	EKAD	1	1	1	1		2	2
14	SRSN	1	1	1	1		2	2
15	APLI	0	0	1	1			2
16	CPIN	0	0	0.5	0.5			1
17	JPFA	0	0	0.5	0.5			1
18	SULI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
19	TIRT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
20	INRU	1	1	1	1		2	2
21	KBRI	1	1	0	0		2	
22	SPMA	1	1	1	1		2	2
23	ASII	1	1	1	1		2	2
24	AUTO	0.5	0.5	0.5	0		1	0.5
25	BRAM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
26	GJTL	1	1	1	1		2	2
27	IMAS	1	1	1	1		2	2
28	MASA	0	0	1	1			2
29	SMSM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
30	ADMG	1	1	1	1		2	2
31	ESTI	1	1	1	1		2	2
32	HDTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
33	INDR	0.5	0.5	0.5	0		1	0.5
34	MYTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
35	PBRX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
36	JECC	1	1	1	1		2	2

37	KBLI	1	1	1	1		2	2
38	KBLM	0	0	1	1			2
39	DLTA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
40	ICBP	1	1	1	1		2	2
41	INDF	1	1	1	1		2	2
42	SKLT	0	0.5	0.5	0.5		0.5	1
43	INAF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
44	KAEF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
45	KLBF	1	1	1	1		2	2
46	TSPC	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
47	TCID	1	1	1	1		2	2
48	APLN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
49	BIPP	0.5	1	1	1		1.5	2
50	BKSL	1	1	1	1		2	2
51	BSDE	1	1	1	1		2	2
52	COWL	0	0.5	0.5	0.5		0.5	1
53	CTRA	0.5	0	0	0		0.5	
54	DART	1	1	0	0		2	
55	DILD	1	1	0.5	0.5		2	1
56	DUTI	1	1	1	1		2	2
57	GPRA	0	0.5	0.5	0.5		0.5	1
58	JRPT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
59	KIJA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
60	LPCK	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
61	LPKR	1	1	1	1		2	2
62	MTLA	1	0	0	0		1	
63	OMRE	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
64	LPIN	0	0.5	0.5	0.5		0.5	1
65	PWON	0	0	1	1			2
66	RBMS	1	1	0.5	0.5		2	1
67	RDTX	1	1	1	1		2	2
68	SMRA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
69	SMDM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1

### Instrumen Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

No	KODE	2012	2013	2014	2015	Total	2012-2013	2014-2015
1	DPNS	0	0	0	0.5			0.5
2	JPFA	0.5	0.5	0.5	0		1	0.5
3	TKIM	0.5	0.5	0.5	0		1	0.5
4	ASII	1	0	0	1		1	1
5	LPIN	0.5	0	0	0		0.5	
6	MASA	0	0	0	0.5			0.5
7	DILD	0.5	0.5	0.5	0		1	0.5
8	LPKR	0	0	0	1			1

### Instrumen Keuangan Piutang

No	KODE	2012	2013	2014	2015	Total	2012-2013	2014-2015
1	INTP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
2	SMGR	1	1	1	1		2	2
3	SMCB	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
4	AMFG	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
5	ARNA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
6	IKAI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
7	KIAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
8	MLIA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
9	TOTO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
10	ALKA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
11	ALMI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
12	BAJA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
13	BTON	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
14	CTBN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
15	GDST	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
16	INAI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
17	ISSP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
18	JKSW	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
19	JPRS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
20	KRAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
21	LION	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
22	LMSH	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
23	NIKL	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
24	PICO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1

25	TBMS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
26	BRPT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
27	BUDI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
28	DPNS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
29	EKAD	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
30	INCI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
31	SRSN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
32	TPIA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
33	UNIC	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
34	AKPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
35	APLI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
36	BRNA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
37	FPNI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
38	IGAR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
39	TALF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
40	TRST	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
41	YPAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
42	CPIN	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
43	JPFA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
44	MAIN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
45	SIPD	1	1	1	1		2	2
46	SULI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
47	TIRT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
48	ALDO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
49	FASW	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
50	INKP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
51	INRU	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
52	KBRI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
53	SPMA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
54	TKIM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
55	ASII	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
56	AUTO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
57	BRAM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
58	GDYR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
59	GJTL	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
60	IMAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
61	INDS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
62	LPIN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1

63	MASA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
64	SMSM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
65	ADMG	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
66	ARGO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
67	ERTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
68	ESTI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
69	HDTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
70	INDR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
71	MYTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
72	PBRX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
73	POLY	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
74	RICY	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
75	SSTM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
76	TFCO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
77	UNIT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
78	BATA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
79	JECC	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
80	KBLI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
81	KBLM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
82	VOKS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
83	PTSN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
84	ADES	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
85	DLTA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
86	ICBP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
87	INDF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
88	MLBI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
89	MYOR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
90	ROTI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
91	SKLT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
92	STTP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
93	ULTJ	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
94	GGRM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
95	HMSP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
96	RMBA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
97	DVLA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
98	INAF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
99	KAEF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
100	KLBF	1	1	1	1		2	2

101	MERK	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
102	PYFA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
103	SCPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
104	TSPC	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
105	MRAT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
106	TCID	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
107	KICI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
108	LMPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
109	APLN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
110	ASRI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
111	BAPA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
112	BEST	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
113	BIPP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
114	BKSL	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
115	BSDE	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
116	COWL	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
117	CTRA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
118	DART	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
119	DILD	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
120	DUTI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
121	GAMA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
122	GMTD	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
123	GPRA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
124	GWSA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
125	JRPT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
126	KIJA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
127	LAMI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
128	LPCK	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
129	LPKR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
130	MDLN	0.5	0.5	1	1		1	2
131	MKPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
132	MTLA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
133	OMRE	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
134	LPIN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
135	PWON	0.5	0.5	1	1		1	2
136	RBMS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
137	RDTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
138	SMRA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1

139	SMDM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
-----	------	-----	-----	-----	-----	--	---	---

### Instrumen Keuangan Pinjaman

No	KODE	2012	2013	2014	2015	Total	2012-2013	2014-2015
1	INTP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
2	SMGR	1	1	1	1		2	2
3	SMCB	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
4	AMFG	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
5	ARNA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
6	IKAI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
7	KIAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
8	MLIA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
9	TOTO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
10	ALKA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
11	ALMI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
12	BAJA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
13	BTON	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
14	CTBN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
15	GDST	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
16	INAI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
17	ISSP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
18	JKSW	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
19	JPRS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
20	KRAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
21	LION	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
22	LMSH	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
23	NIKL	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
24	PICO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
25	TBMS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
26	BRPT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
27	BUDI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
28	DPNS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
29	EKAD	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
30	INCI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
31	SRSN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
32	TPIA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
33	UNIC	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
34	AKPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1

35	APLI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
36	BRNA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
37	FPNI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
38	IGAR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
39	TALF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
40	TRST	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
41	YPAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
42	CPIN	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
43	JPFA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
44	MAIN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
45	SIPD	1	1	1	1		2	2
46	SULI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
47	TIRT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
48	ALDO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
49	FASW	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
50	INKP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
51	INRU	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
52	KBRI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
53	SPMA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
54	TKIM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
55	ASII	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
56	AUTO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
57	BRAM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
58	GDYR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
59	GJTL	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
60	IMAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
61	INDS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
62	LPIN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
63	MASA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
64	SMSM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
65	ADMG	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
66	ARGO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
67	ERTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
68	ESTI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
69	HDTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
70	INDR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
71	MYTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
72	PBRX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1



73	POLY	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
74	RICY	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
75	SSTM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
76	TFCO	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
77	UNIT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
78	BATA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
79	JECC	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
80	KBLI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
81	KBLM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
82	VOKS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
83	PTSN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
84	ADES	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
85	DLTA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
86	ICBP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
87	INDF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
88	MLBI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
89	MYOR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
90	ROTI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
91	SKLT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
92	STTP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
93	ULTJ	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
94	GGRM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
95	HMSP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
96	RMBA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
97	DVLA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
98	INAF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
99	KAEF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
100	KLBF	1	1	1	1		2	2
101	MERK	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
102	PYFA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
103	SCPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
104	TSPC	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
105	MRAT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
106	TCID	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
107	KICI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
108	LMPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
109	APLN	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
110	ASRI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1

111	BAPA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
112	BEST	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
113	BIPP	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
114	BKSL	0.5	0.5	0.5	1		1	1.5
115	BSDE	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
116	COWL	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
117	CTRA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
118	DART	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
119	DILD	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
120	DUTI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
121	GAMA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
122	GMTD	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
123	GPRA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
124	GWSA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
125	JRPT	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
126	KIJA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
127	LAMI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
128	LPCK	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
129	LPKR	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
130	MDLN	0.5	0.5	1	1		1	2
131	MKPI	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
132	MTLA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
133	OMRE	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
134	LPIN	0.5	0.5	1	1		1	2
135	PWON	0.5	0.5	1	1		1	2
136	RBMS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
137	RDTX	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
138	SMRA	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
139	SMDM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1

### Instrumen Keuangan – Hutang Obligasi

No	KODE	2012	2013	2014	2015	Total	2012-2013	2014-2015
1	BRPT	0.5	0	0	0		0.5	
2	TPIA	1	0	0	0		1	
3	FPNI	1	1	1	0		2	1
4	JPFA	1	1	1	1		2	2
5	MAIN	1	0	0	0		1	
6	TKIM	0.5	0.5	0	0		1	

7	ASII	1	1	1	1		2	2
8	GJTL	1	1	1	1		2	2
9	IMAS	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
10	SMSM	0.5	0.5	0.5	0		1	0.5
11	INDF	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
12	MYOR	1	0.5	1	1		1.5	2
13	ROTI	0	1	1	1		1	2
14	STTP	0	0	0.5	0.5			1
15	INAF	0.5	0	0	0.5		0.5	0.5
16	APLN	1	1	1	1		2	2
17	ASRI	1	1	1	1		2	2
18	BSDE	1	1	1	1		2	2
19	CTRA	0	0	1	1			2
20	DART	0	1	1	1		1	2
21	DILD	0	1	1	1		1	2
22	DUTI	1	0	0	0		1	
23	GWSA	0	0	0	1			1
24	KIJA	0.5	1	1	1		1.5	2
25	LPKR	1	1	1	1		2	2
26	MDLN	0.5	1	1	1		1.5	2
27	PWON	1	1	1	1		2	2
28	SMRA	1	0.5	0.5	0.5		1.5	1
29	SMDM	0.5	0.5	0.5	0.5		1	1
30	INKP	1	1	1	1		2	2

الجامعة الإسلامية  
الاستاذ الدكتور

**LAMPIRAN 5**  
**Hasil Output SPSS**

**Aset Tetap (PP&E)**

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PSAK 68 Fair Value	1.4892	139	.47954	.04067
	Previous (PP&E)				
	PSAK 68 Fair Value (PP&E)	1.5540	139	.48038	.04075

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	PSAK 68 Fair Value			
	Previous (PP&E) & PSAK 68 Fair Value (PP&E)	139	.852	.000

**Paired Samples Test**

		Pair 1	
		PSAK 68 Fair Value Previous (PP&E) - PSAK 68 Fair Value (PP&E)	
Paired Differences	Mean	-.06475	
	Std. Deviation	.26123	
	Std. Error Mean	.02216	
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower Upper	-.10856 -.02094
	t		-2.922
df		138	
Sig. (2-tailed)		.004	

## Aset Takberwujud

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
PSAK 68 Fair Value Previous (Intangible Assets)	37	1.0000	.31180	.50	2.00
PSAK 68 Fair Value (Intangible Assets)	43	1.0930	.38197	.50	2.00

## Wilcoxon Signed Ranks Test

### Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
PSAK 68 Fair Value (Intangible Assets) - PSAK 68 Fair Value Previous (Intangible Assets)	Negative Ranks	1 <sup>a</sup>	4.00	4.00
	Positive Ranks	8 <sup>b</sup>	5.13	41.00
	Ties	26 <sup>c</sup>		
	Total	35		

- Sesudah Penerapan PSAK 68 < Sebelum Penerapan PSAK 68
- Sesudah Penerapan PSAK 68 > Sebelum Penerapan PSAK 68
- Sesudah Penerapan PSAK 68 = Sebelum Penerapan PSAK 68

### Test Statistics<sup>a</sup>

	PSAK 68 Fair Value (Intangible Assets) - PSAK 68 Fair Value Previous (Intangible Assets)
Z	-2.310 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.021

- Wilcoxon Signed Ranks Test
- Based on negative ranks.

## Imbalan Kerja

### Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PSAK 68 Fair Value Previous (Employee Benefits)	1.1079	139	.30552	.02591
	PSAK 68 Fair Value (Employee Benefits)	1.1475	139	.34291	.02908

### Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	PSAK 68 Fair Value Previous (Employee Benefits) & PSAK 68 Fair Value (Employee Benefits)	139	.850	.000

### Paired Samples Test

		Pair 1	
		PSAK 68 Fair Value Previous (Employee Benefits) - PSAK 68 Fair Value (Employee Benefits)	
Paired Differences	Mean	-.03957	
	Std. Deviation	.18123	
	Std. Error Mean	.01537	
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower Upper	-.06996 -.00917
	t		-2.574
df		138	
Sig. (2-tailed)		.011	

## Properti Investasi

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
PSAK 68 Fair Value Previous (Investment Property)	48	1.6875	.51183	.50	2.00
PSAK 68 Fair Value (Investment Property)	53	1.6698	.46969	.50	2.00

## Wilcoxon Signed Ranks Test

### Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
PSAK 68 Fair Value (Investment Property) -	Negative Ranks	2 <sup>a</sup>	2.50	5.00
	Positive Ranks	3 <sup>b</sup>	3.33	10.00
PSAK 68 Fair Value Previous (Investment Property)	Ties	40 <sup>c</sup>		
	Total	45		

- Sesudah Penerapan PSAK 68 < Sebelum Penerapan PSAK 68
- Sesudah Penerapan PSAK 68 > Sebelum Penerapan PSAK 68
- Sesudah Penerapan PSAK 68 = Sebelum Penerapan PSAK 68

### Test Statistics<sup>a</sup>

	PSAK 68 Fair Value (Investment Property) - PSAK 68 Fair Value Previous (Investment Property)
Z	-.707 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.480

- Wilcoxon Signed Ranks Test
- Based on negative ranks.

## Instrumen Keuangan Derivatif

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
PSAK 68 Fair Value Previous (Derivative)	14	1.9286	.26726	1.00	2.00
PSAK 68 Fair Value (Derivative)	20	1.8000	.41039	1.00	2.00

## McNemar Test

### PSAK 68 Fair Value Previous (Derivative) & PSAK 68 Fair Value (Derivative)

PSAK 68 Fair Value Previous (Derivative)	PSAK 68 Fair Value (Derivative)	
	Fair Value	2.00
Fair Value	1	0
2.00	0	13

### Test Statistics<sup>a</sup>

	PSAK 68 Fair Value Previous (Derivative) & PSAK 68 Fair Value (Derivative)
N	14
Exact Sig. (2-tailed)	1.000 <sup>b</sup>

- a. McNemar Test
- b. Binomial distribution used.



## Instrumen Keuangan Derivatif Lindung Nilai

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
PSAK 68 Fair Value Previous (Hedging)	5	1.4000	.54772	1.00	2.00
PSAK 68 Fair Value (Hedging)	4	1.7500	.50000	1.00	2.00

### McNemar Test

#### PSAK 68 Fair Value Previous (Hedging) & PSAK 68 Fair Value (Hedging)

PSAK 68 Fair Value Previous (Hedging)	PSAK 68 Fair Value (Hedging)	
	Fair Value	2.00
Fair Value	0	1
2.00	0	2

#### Test Statistics<sup>a</sup>

	PSAK 68 Fair Value Previous (Hedging) & PSAK 68 Fair Value (Hedging)
N	3
Exact Sig. (2-tailed)	1.000 <sup>b</sup>

- a. McNemar Test
- b. Binomial distribution used.

## Instrumen Keuangan Diperdagangkan

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
PSAK 68 Fair Value Previous (Traded)	15	1.7333	.45774	1.00	2.00
PSAK 68 Fair Value (Traded)	13	1.7692	.43853	1.00	2.00

### McNemar Test

#### PSAK 68 Fair Value Previous (Traded) & PSAK 68 Fair Value (Traded)

PSAK 68 Fair Value Previous (Traded)	PSAK 68 Fair Value (Traded)	
	Fair Value	2.00
Fair Value	0	2
2.00	2	8

#### Test Statistics<sup>a</sup>

	PSAK 68 Fair Value Previous (Traded) & PSAK 68 Fair Value (Traded)
N	12
Exact Sig. (2-tailed)	1.000 <sup>b</sup>

- a. McNemar Test
- b. Binomial distribution used.

## Instrumen Keuangan Tersedia untuk Dijual

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
PSAK 68 Fair Value Previous (Available for Sale)	63	1.4762	.55669	.50	2.00
PSAK 68 Fair Value (Available for Sale)	65	1.5000	.52291	.50	2.00

## Wilcoxon Signed Ranks Test

### Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
PSAK 68 Fair Value (Available for Sale) - PSAK 68 Fair Value Previous (Available for Sale)	Negative Ranks	4 <sup>a</sup>	7.00	28.00
	Positive Ranks	6 <sup>b</sup>	4.50	27.00
	Ties	49 <sup>c</sup>		
	Total	59		

- Sesudah Penerapan PSAK 68 < Sebelum Penerapan PSAK 68
- Sesudah Penerapan PSAK 68 > Sebelum Penerapan PSAK 68
- Sesudah Penerapan PSAK 68 = Sebelum Penerapan PSAK 68

### Test Statistics<sup>a</sup>

	PSAK 68 Fair Value (Available for Sale) - PSAK 68 Fair Value Previous (Available for Sale)
Z	-.054 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.957

- Wilcoxon Signed Ranks Test
- Based on positive ranks.

## Instrumen Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
PSAK 68 Fair Value Previous (Held to Maturity)	5	.9000	.22361	.50	1.00
PSAK 68 Fair Value (Held to Maturity)	7	.6429	.24398	.50	1.00

### McNemar Test

#### PSAK 68 Fair Value Previous (Held to Maturity) & PSAK 68 Fair Value (Held to Maturity)

PSAK 68 Fair Value Previous (Held to Maturity)	PSAK 68 Fair Value (Held to Maturity)	
	Cost Method	Fair Value
Cost Method	0	0
Fair Value	3	1

#### Test Statistics<sup>a</sup>

	PSAK 68 Fair Value Previous (Held to Maturity) & PSAK 68 Fair Value (Held to Maturity)
N	4
Exact Sig. (2-tailed)	.250 <sup>b</sup>

- a. McNemar Test
- b. Binomial distribution used.

## Instrumen Keuangan Piutang

### Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 PSAK 68 Fair Value Previous (Receivable)	1.0216	139	.14584	.01237
PSAK 68 Fair Value (Receivable)	1.0468	139	.19866	.01685

### Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 PSAK 68 Fair Value Previous (Receivable) & PSAK 68 Fair Value (Receivable)	139	.715	.000

### Paired Samples Test

		Pair 1	
		PSAK 68 Fair Value Previous (Receivable) - PSAK 68 Fair Value (Receivable)	
Paired Differences	Mean	-.02518	
	Std. Deviation	.13888	
	Std. Error Mean	.01178	
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower Upper	-.04847 -.00189
	t		-2.138
df		138	
Sig. (2-tailed)		.034	

## Instrumen Keuangan Pinjaman

### Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
PSAK 68 Fair Value Pair 1 Previous (Loan)	1.0216	139	.14584	.01237
PSAK 68 Fair Value (Loan)	1.0504	139	.21106	.01790

### Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
PSAK 68 Fair Value Pair 1 Previous (Loan) & PSAK 68 Fair Value (Loan)	139	.671	.000

### Paired Samples Test

		Pair 1
		PSAK 68 Fair Value Previous (Loan) - PSAK 68 Fair Value (Loan)
	Mean	-.02878
	Std. Deviation	.15661
Paired Differences	Std. Error Mean	.01328
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower Upper
		-.05504 -.00251
t		-2.166
df		138
Sig. (2-tailed)		.032

## Instrumen Keuangan – Hutang Obligasi

### Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
PSAK 68 Fair Value Previous (Bond Payable)	27	1.4074	.51956	.50	2.00
PSAK 68 Fair Value (Bond Payable)	25	1.6000	.55902	.50	2.00

### Wilcoxon Signed Ranks Test

#### Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
PSAK 68 Fair Value (Bond Payable) - PSAK 68 Fair Value Previous (Bond Payable)	Negative Ranks	3 <sup>a</sup>	4.50	13.50
	Positive Ranks	6 <sup>b</sup>	5.25	31.50
	Ties	13 <sup>c</sup>		
	Total	22		

- Sesudah Penerapan PSAK 68 < Sebelum Penerapan PSAK 68
- Sesudah Penerapan PSAK 68 > Sebelum Penerapan PSAK 68
- Sesudah Penerapan PSAK 68 = Sebelum Penerapan PSAK 68

#### Test Statistics<sup>a</sup>

	PSAK 68 Fair Value (Bond Payable) - PSAK 68 Fair Value Previous (Bond Payable)
Z	-1.095 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.273

- Wilcoxon Signed Ranks Test
- Based on negative ranks.